



**Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Kota Cirebon**

LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2025



**Pemerintah Kota Cirebon
2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Ridha dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 ini sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2025. LKIP berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Penyusunan LKIP Badan DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun demikian kami menyadari bahwa dalam penyusunan tersebut masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja DKIS Kota Cirebon khususnya dan bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah pada umumnya.

Cirebon, 15 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON



MA'RUF NURYASA, AP., MM

NIP. 19760330 199602 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan dan bidang Penelitian Pengembangan tahun 2025 sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan wujud akuntabilitas dan DKIS Kota Cirebon dalam menjalankan amanah pembangunan selama satu tahun anggaran. Sepanjang tahun ini, DKIS telah melakukan lompatan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data melalui 5 (lima) sasaran:

- 1. Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi),** DKIS berhasil mengakselerasi implementasi Pemerintah Digital melalui penguatan infrastruktur dan integrasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Capaian ini ditandai dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta ketersediaan akses konektivitas yang lebih stabil bagi seluruh OPD, guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
- 2. Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik,** dalam menjaga arus informasi antara pemerintah dan masyarakat, DKIS senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik. Melalui penyebaran konten yang edukatif, proaktif, dan transparan di berbagai kanal komunikasi, kami memastikan masyarakat Kota Cirebon mendapatkan akses informasi yang akurat sekaligus memperkuat kanal pengaduan publik sebagai instrumen keterlibatan warga dalam pembangunan.

3. **Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**, badar bahwa kebijakan yang baik bermula dari data yang valid, DKIS telah memperkuat peran statistik sektoral. Peningkatan penggunaan data sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah memastikan setiap program pemerintah kota lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis pada realitas lapangan (evidence-based policy).
4. **Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah**, seiring dengan masifnya digitalisasi, DKIS memberikan perhatian serius pada aspek keamanan siber. Melalui serangkaian audit keamanan, peningkatan kesadaran SDM, dan proteksi sistem, kami berhasil menekan risiko ancaman siber, menjaga integritas data pemerintah, dan memastikan keberlangsungan layanan publik digital tanpa gangguan berarti.
5. **Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah**, secara internal, DKIS terus berbenah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Melalui manajemen sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta efisiensi birokrasi, DKIS berkomitmen menjadi perangkat daerah yang lincah (*agile*) dan profesional dalam melayani masyarakat Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja DKIS Kota Cirebon, diperoleh tingkat capaian kinerja sasaran I **“Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)”** sebesar 100 % dengan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan, sasaran II **“Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik”** sebesar 91,40% dengan dukungan oleh 1 program dan 1 kegiatan, sasaran III **“Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah”** sebesar 100,00% didukung dengan 1 program dan 1 kegiatan, sasaran ke IV **“Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah”** sebesar 137,00% didukung dengan 1 program dan 2 kegiatan dan sasaran kinerja ke V **“Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah”** sebesar 90,09% didukung dengan 1 program dan 6 kegiatan . Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan DKIS

Kota Cirebon tersebut merupakan rincian capaian kinerja sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Cirebon tahun 2025 - 2029.

Pencapaian sasaran kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala DKIS Kota Cirebon Nomor: 050/KEP.74-DKIS tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2025, DKIS Kota Cirebon melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 67 sub kegiatan..

Pada Tahun Anggaran 2025 DKIS Kota Cirebon memperoleh anggaran sebesar Rp 21.785.304.465,00 digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKIS Kota Cirebon serta untuk mencapai target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Realisasi anggaran sebesar Rp 20.418.068.581,00 atau sekitar 93,72% dari total anggaran yang diterima.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon.....	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
1.4 Aspek dan Isu Strategis DKIS Kota Cirebon	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
2.1 Perencanaan Strategis	24
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	38
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	38
2.4 Perjanjian Kinerja.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Implementasi SAKIP	50
3.2 Capaian Kinerja DKIS Kota Cirebon	55
3.3 Capaian Kinerja atas IKU DKIS Kota Cirebon	60
3.4 Evaluasi dan Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tiap Tahun	61
3.5 Realisasi Anggaran Kota Cirebon.....	214
3.6 Akuntabilitas Keuangan	222
3.7 Prestasi dan Penghargaan.....	225
3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penghambat serta Evaluasi	228
BAB IV PENUTUP	231
4.1 Kesimpulan	231
4.2 Saran.....	231

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan Kota Cirebon	3
Tabel 1. 2 Banyaknya Kelurahan, RW dan RT	4
Tabel 1. 3 Ketinggian Wilayah Diatas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kota Cirebon.....	7
Tabel 1. 4 Kemiringan Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Cirebon	7
Tabel 1. 5 Urusan Komunikasi dan Informatika	13
Tabel 1. 6 Urusan Statistik	13
Tabel 1. 7 Urusan Persandian	13
Tabel 1. 8 Jumlah ASN Pemerintah Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Usia.....	18
Tabel 1. 9 Jumlah ASN DKIS Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Usia.....	19
Tabel 1. 10 Daftar Pegawai DKIS.....	19
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra (RPD) DKIS Kota Cirebon 2024-2026	25
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra (RPJMD) DKIS Kota Cirebon 2025-2029.....	29
Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025	39
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja DKIS Tahun 2025 (awal tahun anggaran) RPD 2024-2026	42
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja DKIS Tahun 2025 (Perubahan anggaran) RPJMD 2025-2029	43
Tabel 3. 1 Cara Pengukuran Kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 (Renstra RPD 2024-2026).....	46
Tabel 3. 2 Cara Pengukuran Kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	48
Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 berdasarkan renstra RPD 2024-2026	56
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 berdasarkan	59
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Atas IKU DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2024-2026.....	60
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Atas IKU DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2025-2029.....	60
Tabel 3. 7 Waktu Pelaksanaan SKM DKIS Kota Cirebon	210
Tabel 3. 8 Rekapitulasi Nilai Rata-Rata (NRR)/Unsur	211

Tabel 3. 9 Nilai Rata-Rata (NRR)/Unsur IKMNilai Rata-Rata (NRR)/Unsur IKM.....	211
Tabel 3. 10 Tabel Realisasi per jenis Belanja.....	214
Tabel 3. 11 Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	215
Tabel 3. 12 Berdasarkan Renstra RPD 2024-2026	223
Tabel 3. 13 Berdasarkan Renstra RPJMD 2025-2029.....	223
Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	224
Tabel 3. 15 Tabel Laporan AKIP 2025	225
Tabel 3. 16 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Upaya Pemecahan Masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran DKIS Kota Cirebon.....	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Cirebon	5
Gambar 1. 2 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Cirebon	6
Gambar 1. 3 Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon	8
Gambar 1. 4 Peta Jenis Tanah Kota Cirebon	10
Gambar 3. 1 Infografis Sasaran Pertama	64
Gambar 3. 2 Topologi Jaringan Intra Pemerintah yang Terlayani Akses Internet dan Intranet	64
Gambar 3. 3 Topologi Jaringan Intra Pemerintah	64
Gambar 3. 4 Bimbingan Teknis Pengelola Domain dan Sub Domain Penggunaan CMS Pada Seluruh SKPD/OPD/Puskesmas Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon di Ruang Cirebon Command Center Kantor SETDA Kota Cirebon dimulai dari Tgl 11, 14, 19 s.d 21 Bulan Agustus 2025.....	68
Gambar 3. 5 Koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi penyelenggaraan SPBE	69
Gambar 3. 6 Instalasi UPS	70
Gambar 3. 7 Server x fusion terpasang	70
Gambar 3. 8 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE	72
Gambar 3. 9 Rapat evaluasi SIKOPER	72
Gambar 3. 10 Rapat Pembahasan JDIH dan SIKOPER	73
Gambar 3. 11 Diskusi pembangunan CMS dengan IT Genic	73
Gambar 3. 12 Pengembangan CMS Website	74
Gambar 3. 13 Pengembangan aplikasi SEDULUR.....	75
Gambar 3. 14 Pemeliharaan jaringan DPUTR.....	77
Gambar 3. 15 Pemeliharaan jaringan BPKAD	77
Gambar 3. 16 Pemeliharaan jaringan DLH.....	79
Gambar 3. 17 Pemeliharaan jaringan BAKESBANGPOL	80
Gambar 3. 18 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan Al Ichsan.....	82
Gambar 3. 19 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan Al Falah	82
Gambar 3. 20 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan LKSA Parahita	83
Gambar 3. 21 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Darul Ulum	83

Gambar 3. 22 Peningkatan literasi digital/digital parenting kade P2WKSS RW06 Suradinaya Utara Kota Cirebon.....	83
Gambar 3. 23 Coding dan Pemanfaatan AI di TK Negeri Pembina	84
Gambar 3. 24 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon.....	84
Gambar 3. 25 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (2)	85
Gambar 3. 26 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (3)	85
Gambar 3. 27 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (4)	85
Gambar 3. 28 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (5)	85
Gambar 3. 29 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di DKUKMPP Kota Cirebon.....	87
Gambar 3. 30 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di DKUKMPP Kota Cirebon.....	87
Gambar 3. 31 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di Balai UPT Veteriner DKP3 Kota Cirebon.....	88
Gambar 3. 32 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon	89
Gambar 3. 33 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di UPT Farmasi Dinkes Kota Cirebon.....	90
Gambar 3. 34 Infografis Sasaran Kedua	92
Gambar 3. 35 Dokumentasi Media Gathering di RM. Ono Solo	94
Gambar 3. 36 Dokumentasi Media Gathering Malam Gala Dinner.....	94
Gambar 3. 37 Dokumentasi Press Conference 24 Maret 2025	96
Gambar 3. 38 Kegiatan Press Conference dan Launching Aplikasi SIMERCI.....	98
Gambar 3. 39 Kegiatan Press Conference 28 November 2025.....	99
Gambar 3. 40 Tampilan Aplikasi SIMERCI.....	101
Gambar 3. 41 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMERCI melalui Zoom	102
Gambar 3. 42 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMERCI melalui Zoom (2)	103
Gambar 3. 43 Pendataan Media dan Jurnalis Melalui SIMERCI	104
Gambar 3. 44 kegiatan Sarasehan Ketua FK-KIM Season 1.....	105
Gambar 3. 45 Kegiatan Sarasehan Season 2 dan Rapat Koordinasi Ketua FK-KIM.	106
Gambar 3. 46 Kegiatan Silaturahmi anggota KIM se-Kota Cirebon	107
Gambar 3. 47 Kegiatan Silaturahmi Bersama Pegiat Sosial Media	108
Gambar 3. 48 Kegiatan Seminar Navigasi Era Digital dengan Tema: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelegent” Hari pertama di Kampus UINSSC.....	109

Gambar 3. 49 Kegiatan Seminar Navigasi Era Digital dengan Tema: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelegent” Hari kedua di Kampus UCIC	110
Gambar 3. 50 Kegiatan Seminar Navigasi Era Digital dengan Tema: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelligent” Hari ketiga di Kampus STMIK IKMI	112
Gambar 3. 51 Kegiatan Pelantikan Komisioner Komisi Informasi	114
Gambar 3. 52 Bimbingan Teknis SP4N-LAPOR!	117
Gambar 3. 53 Monev PPID	118
Gambar 3. 54 Evaluasi PPID	120
Gambar 3. 55 Layanan Cirebon Siaga 112	121
Gambar 3. 56 Rapat persiapan peraturan penggunaan dana hibah yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Januari 2025	122
Gambar 3. 57 Rapat lanjutan pengesahan peraturan penggunaan dana hibah yang dilaksanakan pada Selasa, 7 Januari 2025	122
Gambar 3. 58 Pemantauan isu publik pada media cetak dan media online yang dilaksanakan setiap harinya	123
Gambar 3. 59 Pemantauan aduan di Kanal SP4N LAPOR Kota Cirebon yang dilaksanakan setiap harinya	123
Gambar 3. 60 Dokumentasi Informasi hoax/bohong yang beredar di Masyarakat.....	124
Gambar 3. 61 Publikasi Konten Penurunan Stunting Website Kota Cirebon Januari – Maret 2025	126
Gambar 3. 62 Publikasi Konten Penurunan Stunting Instagram Pemerintah Kota Cirebon Januari – Maret 2025	127
Gambar 3. 63 Publikasi Konten Penurunan Stunting Media Online Lokal Januari – Maret 2025	128
Gambar 3. 64 Publikasi Konten Penurunan Stunting Website Kota Cirebon April – Juni 2025	129
Gambar 3. 65 Publikasi Konten Penurunan Stunting Instagram Pemerintah Kota Cirebon April – Juni 2025	130
Gambar 3. 66 Publikasi Konten Penurunan Stunting Website Kota Cirebon Juli – September 2025	131
Gambar 3. 67 Publikasi Konten Penurunan Stunting Instagram Kota Cirebon Juli – September 2025	132
Gambar 3. 68 Pembuatan Video Percepatan Penurunan Stunting	133

Gambar 3. 69 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Website Kota Cirebon.....	134
Gambar 3. 70 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Media Online Lokal Kota Cirebon.....	135
Gambar 3. 71 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Media Cetak Lokal Kota Cirebon.....	136
Gambar 3. 72 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Talkshow TV Lokal	137
Gambar 3. 73 Publikasi Portal Berita Online Capaian, Agenda, Program Prioritas Pemerintah Daerah Triwulan I.....	138
Gambar 3. 74 Publikasi Media Online Lokal Capaian, Agenda, Program Prioritas Pemerintah Daerah Triwulan II.....	139
Gambar 3. 75 Publikasi Media Online Lokal Capaian, Agenda, Program Prioritas Pemerintah Daerah Triwulan III.....	140
Gambar 3. 76 Publikasi Media Online Lokal Capaian, Agenda, Program Prioritas Pemerintah Daerah Triwulan IV.....	141
Gambar 3. 77 Contoh Publikasi Media Cetak Lokal Triwulan I.....	142
Gambar 3. 78 Contoh Publikasi Media Cetak Lokal Triwulan III.....	143
Gambar 3. 79 Contoh Publikasi Media Cetak Lokal Triwulan IV.....	144
Gambar 3. 80 Contoh Publikasi Live Streaming Triwulan III.....	147
Gambar 3. 81 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Cirebon Terkini #1	149
Gambar 3. 82 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Siap Siaga Bencana #2	150
Gambar 3. 83 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Persiapan Pemerintah Kota Cirebon Sambut Lebaran 1446 H #3.....	150
Gambar 3. 84 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Uji Publik RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 #4	151
Gambar 3. 85 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Hari Jadi Cirebon ke-598 "Cirebon Manyungi Ian Nyumponi,Cirebon Idola" #6	152
Gambar 3. 86 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Tantangan Penataan Wilayah Perkotaan yang Inklusif dan Berkelanjutan #7	153
Gambar 3. 87 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Dari Pemuda untuk Indonesia:Kobarkan Semangat, Genggam Masa Depan Indonesia #8	153
Gambar 3. 88 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Peran Warga & Inovasi Laporan Tingkatkan Perbaikan PJU Demi Keamanan Lalu Lintas Cirebon #9	154
Gambar 3. 89 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Spesial	

SumpahPemuda: Pemuda Bersatu, Indonesia Maju”	154
Gambar 3. 90 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Antisipasi Cuaca Ekstrem: Strategi Mitigasi dan Pemetaan Titik Rawan	155
Gambar 3. 91 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Kota Cirebon Berkilau: Satu Tahun Aksi Nyata Jelang Nataru”	155
Gambar 3. 92 Publikasi Terintegrasi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) dan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia, Pencegahan HIV-AIDS, dan Kampanye “Gempur Rokok Ilegal”.	158
Gambar 3. 93 Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik bagi Admin Media Sosial	164
Gambar 3. 94 Infografis Sasaran Ketiga	165
Gambar 3. 95 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Penyajian Data dengan Google Workspace Basics.....	168
Gambar 3. 96 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Visualisasi Data Kewilayahan.....	169
Gambar 3. 97 Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	170
Gambar 3. 98 Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi Data Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025.....	171
Gambar 3. 99 Tangkapan Layar Sampul dan Kata Pengantar Buku Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025	172
Gambar 3. 100 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025	173
Gambar 3. 101 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025	175
Gambar 3. 102 Tangkapan Layar Sampul dan Kata Pengantar Laporan Pendahuluan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025	175
Gambar 3. 103 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025	176
Gambar 3. 104 Tangkapan Layar Sampul dan Kata Pengantar Laporan Akhir Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025	177
Gambar 3. 105 Dokumentasi Kegiatan Desk e-Walidata Tahun 2025.....	178
Gambar 3. 106 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi dan Penghargaan Cirebon Satu Data Tahun 2025	180
Gambar 3. 107 Dokumentasi Kegiatan Desk Metadata Statistik Sektoral Tahun 2025	182

Gambar 3. 108 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Standar Data Statistik dan Pemanfaatannya untuk Pembangunan Daerah	183
Gambar 3. 109 Dokumentasi Kegiatan Rapat Penentuan Lokus EPSS Tahun 2025	184
Gambar 3. 110 Dokumentasi Kegiatan Rapat Penetapan Lokus EPSS Tahun 2025	185
Gambar 3. 111 Dokumentasi Sosialisasi Desa Cantik Tahun 2025.....	186
Gambar 3. 112 Dokumentasi Sosialisasi Desa Cantik Tahun 2026.....	187
Gambar 3. 113 Piagam Pencanangan Desa Cantik Tahun 2026	187
Gambar 3. 114 Dokumentasi Kegiatan Desk Update Data.....	189
Gambar 3. 115 Infografis Sasaran Keempat	190
Gambar 3. 116 Kegiatan Audit Surveillance ISO 27001:2022	193
Gambar 3. 117 Kegiatan Sosialisasi Perwal Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.....	194
Gambar 3. 118 Kegiatan Audit Internal ISO 27001:2022.....	195
Gambar 3. 119 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kesehatan	196
Gambar 3. 120 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Astanagarib	197
Gambar 3. 121 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Drajat.....	197
Gambar 3. 122 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Cangkol	197
Gambar 3. 123 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Gunungjati.....	198
Gambar 3. 124 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Jagasatru	198
Gambar 3. 125 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Jalan Kembang	198
Gambar 3. 126 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kalijaga Permai	199
Gambar 3. 127 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kalitanjung.....	199
Gambar 3. 128 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kesambi	199
Gambar 3. 129 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kesunean	200

Gambar 3. 130 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Larangan	200
Gambar 3. 131 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Nelayan	200
Gambar 3. 132 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Pamitran	201
Gambar 3. 133 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Pegambiran	201
Gambar 3. 134 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Pekalangan	201
Gambar 3. 135 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Pesisir	202
Gambar 3. 136 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Perumnas Utara	202
Gambar 3. 137 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Sunyaragi	202
Gambar 3. 138 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Sitopeng	202
Gambar 3. 139 Layanan Help Desk Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon	203
Gambar 3. 140 Pengujian Pentest pada website milik Disdukcapil Kota Cirebon	204
Gambar 3. 141 Sosialisasi Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	205
Gambar 3. 142 Bimbingan Teknis Agen CSIRT di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon	206
Gambar 3. 143 Konsultasi dan implementasi sandi data di aplikasi SIMPEG	207
Gambar 3. 144 Monitoring dan Evaluasi Email Sanapati	207
Gambar 3. 145 Inforgrafis Sasaran Kelima	209
Gambar 3. 146 Penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat	227
Gambar 3. 147 Penerimaan Penghargaan CSD Award oleh Kasubbag Program dan Pelaporan DKIS	227
Gambar 3. 148 Audit Surveillance ISO 27001:2022	228

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas implementasi kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern. Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan setiap langkah organisasi selaras dengan tujuan besar pembangunan daerah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh SKPD termasuk DKIS Kota Cirebon diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun yaitu pada tahun 2025 - 2029. Untuk periode tahunan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD. Tahun 2025 ini, melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 050/KEP.74-DKIS tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Sebagai motor penggerak transformasi digital di Kota Cirebon, DKIS telah menetapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis melalui 5 (lima) pilar utama yang menjadi fokus evaluasi dalam laporan ini:

1. **Akselerasi Pemerintah Digital (Pemdi):** Meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai tulang punggung pelayanan publik yang transparan dan efisien.
2. **Optimalisasi Komunikasi Publik:** Memperkuat pengelolaan layanan informasi demi menjamin hak masyarakat atas informasi yang akurat serta mempererat partisipasi publik.

3. **Transformasi Data Sektoral:** Mendorong penggunaan data statistik sektoral yang valid sebagai basis tunggal dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (*Evidence-based Policy*).
4. **Kedaulatan Keamanan Informasi:** Membangun sistem keamanan informasi yang tangguh untuk melindungi aset digital Pemerintah Daerah dari ancaman siber yang kian kompleks.
5. **Ekselensi Kinerja Perangkat Daerah:** Meningkatkan standar kinerja internal, akuntabilitas, dan profesionalisme SDM di lingkungan DKIS guna memberikan pelayanan yang prima.

Melalui kelima sasaran tersebut, DKIS berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Cirebon di era digital.

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh SKPD termasuk DKIS Kota Cirebon diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun yaitu pada tahun 2025 - 2029. Untuk periode tahunan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD. Tahun 2025 ini, melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 050/KEP.74-DKIS tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang wajib disusun setiap akhir tahun termasuk oleh DKIS Kota Cirebon.

1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kota Cirebon berada pada posisi 6,42° Lintang Selatan dan 108,33° bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5

meter. Kota ini terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, luas wilayah administratif Kota Cirebon adalah 39,44 km² atau sekitar 3.944 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan Kota Cirebon

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha) (Perhitungan Pemetaan)
1	Harjamukti	Argasunya	684,18
		Kalijaga	422,95
		Harjamukti	234,67
		Kecapi	229,65
		Larangan	190,51
2	Lemahwungkuk	Pegambiran ^{*)}	442,93
		Kesepuhan ^{*)}	75,34
		Lemahwungkuk ^{*)}	63,73
		Panjunan ^{*)}	134,13
3	Pekalipan	Jagastu	35,37
		Pulasaren	31,37
		Pekalipan	42,61
		Pekalangan	49,33
4	Kesambi	Karyamulya	318,73
		Sunyaragi	226,76
		Drajat	93,52
		Kesambi	100,72
		Pekiringan	126,47
5	Kejaksan	Kejaksan	66,38
		Kebonbaru	74,10
		Sukapura	157,32
		Kesenden	147,08

Sumber: Cirebon Satu Data (2024)

Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru;
2. Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Drajat;
3. Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan;
4. Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemahwungkuk;
5. Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan Kalijaga.

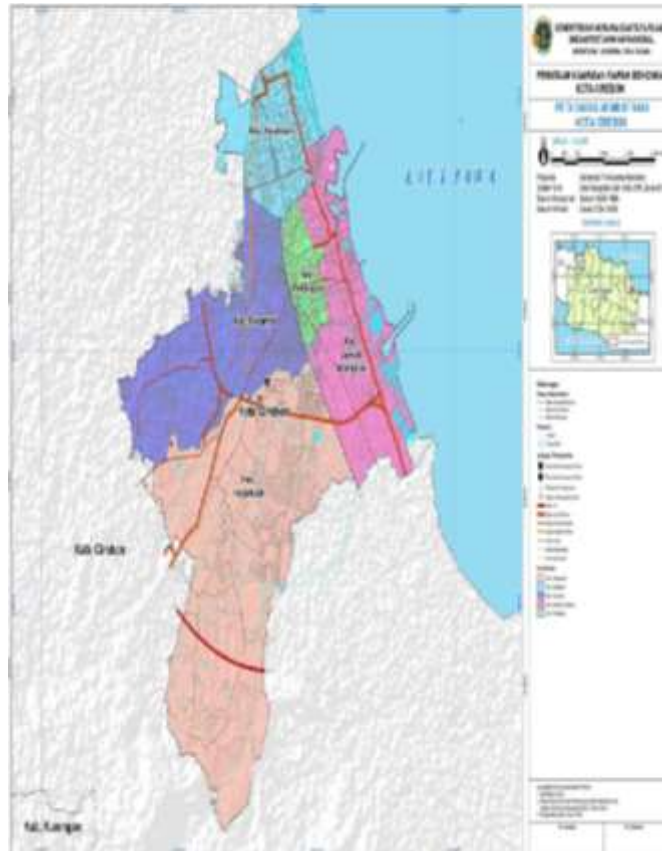
Lebih rinci lagi, wilayah administrasi Kota Cirebon terbagi atas 22 kelurahan, 249 Rukun Warga, dan 1.383 Rukun Tetangga. Rincian jumlah masing-masing kelurahan beserta dengan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Banyaknya Kelurahan, RW dan RT

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	2	3	4	5
1.	Harjamukti	5	77	469
2.	Lemahwungkuk	4	42	232
3.	Pekalipan	4	39	186
4.	Kesambi	5	56	313
5.	Kejaksan	4	35	183
Jumlah		22	249	1.383

Sumber: Cirebon Satu Data (2024)

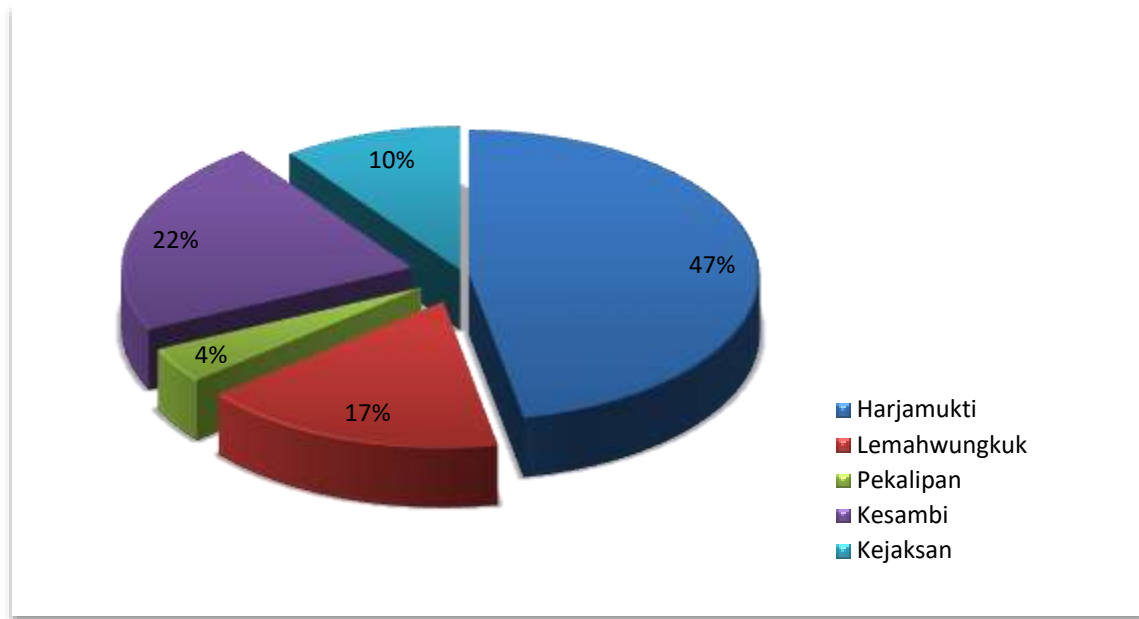
Lebih jelasnya, gambaran wilayah administrasi Kota Cirebon dapat dilihat pada Peta Administrasi Kota Cirebon:



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Cirebon

Sumber: Laporan Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon (2020)

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang paling luas dengan jumlah RT dan RW terbanyak. Sementara itu, Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil, namun jumlah RW dan RT terkecil berada di Kecamatan Kejaksan.



Gambar 1. 2 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Cirebon

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2020, BPS yang dikelola dalam SIPD (2021)

1.2.2 Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah yang berkembang sebagai pusat kegiatan perkotaan. Sebagian kecil lainnya merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Topografi wilayah perkotaan yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbangun ke laut menjadi lambat sehingga berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Oleh karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Wilayah Kota Cirebon yang merupakan dataran rendah memiliki ketinggian bervariasi pada kisaran 0-200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian dimulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, dengan ketinggian maksimal 200 meter.

Tabel 1. 3 Ketinggian Wilayah Diatas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kota Cirebon

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Ketinggian
1.	Harjamukti	Kalijaga	18
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	3
3.	Pekalipan	Pekalipan	3
4.	Kesambi	Kesambi	3
5.	Kejaksan	Kesenden	6

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon (2021)

Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan rentang berikut:

1. Kemiringan 0-3 % terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti;
2. Kemiringan 3-8 % terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
3. Kemiringan 8-15 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
4. Kemiringan 15-18 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Kemiringan Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Cirebon

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Persentase
1	2	3	4
1.	Harjamukti	Kalijaga	18,00
2.	Lemahwungkuk	Pegambiran	3,00
3.	Pekalipan	Pekalipan	3,00
4.	Kesambi	Kesambi	3,00
5.	Kejaksan	Kejaksan	6,00

Sumber: DLH Kota Cirebon, yang dikelola dalam SIPD (2020)

Adapun gambaran topografi berdasarkan kemiringan lereng lahan di wilayah Kota Cirebon dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon

Sumber: : Dokumen Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon (2020)

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material *alluvial* endapan *quarter* (Qa) dengan luas wilayah 2.877,76 hektar dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen *pliosen-plistosen* dengan luas total 1.061,24 hektar. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah *alluvial* dengan luas lahan 2.509,27 hektar, tanah *latosol* dengan luas 322,84 hektar dan jenis tanah *grumosol* dengan luas lahan 1.106,91 hektar.

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah *tipe argosol* yang berasal dari endapan lava dan *piroklastik* (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas:

1. Regosol coklat kelabu, asosiasi regosol kelabu;
2. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu;
3. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu;
4. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu, dan latosol;
5. Asosiasi mediteran coklat dan litosol; dan
6. Latosol coklat kemerahan.

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kedalaman 0-30 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasanya, Kecamatan Harjamukti;
2. Kedalaman 30-60 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasanya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
3. Kedalaman lebih dari 60 meter: terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas.

Kota Cirebon yang berada di tepi laut memiliki temperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara minimum rata-rata 26,4° C dan maksimum rata-rata 30,2° C dan banyaknya curah hujan 2.869,2 mm per tahun dengan hari hujan 129 hari. Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar dari pasokan Perumda Air Minum Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis - Kabupaten Kuningan.

1.2.3 Geologi

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokkan menjadi dua kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material alluvial endapan *quarter* (Qi) dengan luas wilayah 2.877,76 hektar dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen pliosen- pleistosen dengan luas total 1.061,24 hektar. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah aluvial dengan luas lahan 2.509,27 hektar, tanah latosol dengan luas 322,84 hektar dan jenis tanah grumosol dengan luas lahan 1.106,91 hektar. Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas:

1. Regosol coklat kelabu, asosiasi regosol kelabu;
2. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu;
3. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu;
4. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu, dan latosol;
5. Asosiasi mediteran coklat dan litosol; dan
6. Latosol coklat kemerahan.

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kedalaman 0-30 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
2. Kedalaman 30-60 meter: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi;
3. Kedalaman lebih dari 60 meter: terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas.

Sebaran terkait jenis tanah yang ada di Kota Cirebon disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Peta Jenis Tanah Kota Cirebon

Sumber: Dokumen Penataan Kawasan Rawan Bencana Kota Cirebon (2020)

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
7. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

DKIS Kota Cirebon mempunyai tugas pokok: *"membantu Wali Kota melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian"*.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DKIS Kota Cirebon mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, DKIS Kota Cirebon mempunyai 3 (tiga) urusan yang ditangani, yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika;
2. Urusan Statistik; dan
3. Urusan Persandian.

Berikut adalah rincian kewenangan dari urusan yang ditangani oleh DKIS Kota Cirebon:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 1. 5 Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota
2.	Aplikasi Informatika	Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Urusan Statistik

Tabel 1. 6 Urusan Statistik

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota.

3. Urusan Persandian

Tabel 1. 7 Urusan Persandian

No.	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Susunan Organisasi DKIS Kota Cirebon terdiri atas :

Kepala Dinas, membawahkan:

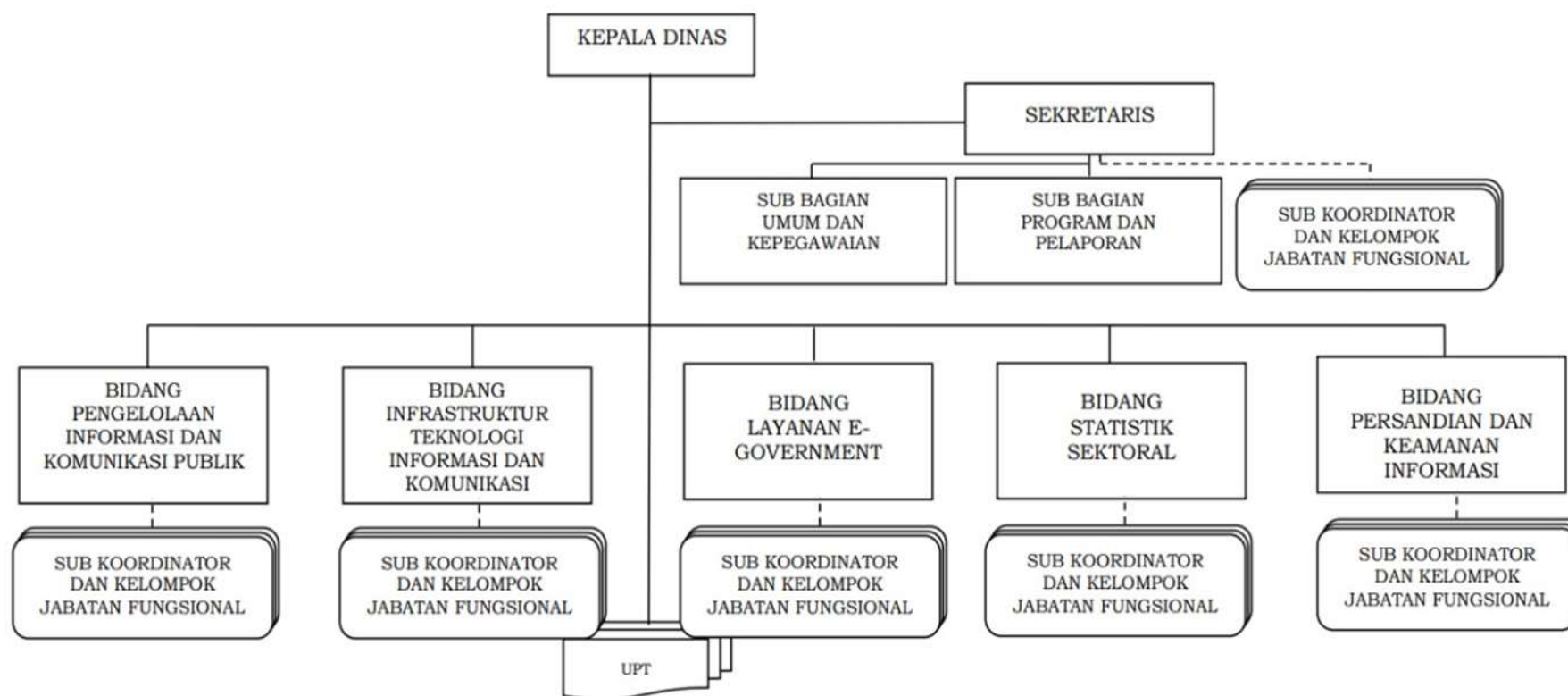
1. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Koordinator Keuangan.
- 2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 - c. Sub Koordinator Kemitraan Komunikasi.
- 3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Domain;
 - b. Sub Koordinator Penatalaksanaan dan Pengawasan; dan
 - c. Sub Koordinator Sistem Jaringan Informatika.
- 4. Bidang Layanan *E-Government*, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Tata Kelola *E-Government*;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Pusat Data; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi.
- 5. Bidang Statistik Sektoral, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Pengumpulan dan Analisis Data;
 - b. Sub Koordinator Sumber Daya Statistik Sektoral; dan
 - c. Sub Koordinator Layanan dan Penyebarluasan Data.
- 6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Persandian;
 - b. Sub Koordinator Keamanan Informasi; dan
 - c. Sub Koordinator Layanan Keamanan Informasi.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 96 Tahun 2021
TANGGAL 29 Desember 2021



1.4 Aspek dan Isu Strategis DKIS Kota Cirebon

1.4.1 Aspek Strategis

DKIS Kota Cirebon sebagai Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Kondisi penyelenggaraan pelayanan DKIS Kota Cirebon dalam urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1. Kelembagaan

Kelembagaan DKIS Kota Cirebon sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon bahwa dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh Sekretaris dan Lima Kepala Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Layanan *E-Government*, Bidang Statistik Sektoral dan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

2. Mekanisme Urusan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah transformasi digital . Transformasi digital terbagi dalam beberapa aspek yang mendukung dalam pencapaian pembangunan nasional yaitu :

a. Aspek Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan **UU No. 23 Tahun 2014** sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf p dan q, DKIS Mempunyai mandat :

- Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik: Menjadi saluran resmi komunikasi antara negara dan warga.

- Penyelenggaraan Infrastruktur TIK: Mengelola ekosistem digital agar seluruh urusan pemerintahan bisa berjalan secara elektronik.
- Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem Digital: Memastikan integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah.

b. Aspek Urusan Statistik (Statistik Sektoral)

Berdasarkan **UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik** dan ditegaskan kembali dalam UU Pemda, DKIS berperan sebagai **Wali Data** tingkat daerah:

- DKIS bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendiseminasikan data yang dihasilkan oleh OPD (Produsen Data);
- Aspek strategisnya adalah mendukung **Satu Data Indonesia**, di mana data statistik sektoral menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang akurat.

c. Aspek Urusan Persandian (Keamanan Informasi)

Berdasarkan regulasi turunan mengenai keamanan siber:

- DKIS bertanggung jawab atas Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- Melindungi kerahasiaan (*Confidentiality*), keutuhan (*Integrity*), dan ketersediaan (*Availability*) data pemerintah guna mencegah kebocoran data negara dan gangguan layanan publik.

d. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk pada **Perpres No. 95 Tahun 2018**, DKIS adalah motor penggerak SPBE di tingkat kota:

- Mengarahkan efisiensi birokrasi melalui penghapusan redundansi aplikasi.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam membantu tugas Wali Kota menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran ASN tersebut antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, perencana dan implementasi program, melaksanakan administrasi dan tata kelola pemerintahan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja. Berdasarkan data dari Cirebon Satu Data, ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon berjumlah 5087 orang pegawai dengan rincian kategori usia sebagai berikut:

Tabel 1. 8 Jumlah ASN Pemerintah Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah orang
20-24	26 orang
25-29	439 orang
30-34	652 orang
35-39	590 orang
40-44	798 orang
45-49	789 orang
50-54	883 orang
55-59	898 orang
60-64	12 orang
Jumlah	5087 orang

Sumber data Cirebon Satu Data, 2024

Dari Jumlah 5087 ASN Pemerintah Kota Cirebon, kelompok usia pegawai diatas 44 tahun masih dominan sejumlah 2582 orang atau 50,76%. Generasi ASN yang muda sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal.

Jumlah ASN di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon tercatat sebanyak 71 orang. Adapun rincian berdasarkan kelompok usia disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 9 Jumlah ASN DKIS Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur	Jumlah orang
20-24	1 orang
25-29	16 orang
30-34	18 orang
35-39	12 orang
40-44	7 orang
45-49	12 orang
50-54	9 orang
55-59	6 orang
Jumlah	81 orang

Berdasarkan data pada Tabel 5, ASN DKIS Kota Cirebon yang berusia di atas 44 tahun (kelompok usia 45–59 tahun) berjumlah 28 orang atau sekitar 39 persen, sedangkan ASN yang berusia di bawah 44 tahun (kelompok usia 20–44 tahun) berjumlah 43 orang atau sekitar 61 persen. Dengan demikian, proporsi ASN berusia muda lebih dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN di DKIS Kota Cirebon berasal dari generasi yang relatif muda, yang umumnya memiliki kemampuan adaptasi tinggi serta kompetensi yang bpaik di bidang Teknologi Informasi. Hal tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Adapun struktur jabatan ASN di DKIS dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 10 Daftar Pegawai DKIS

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	Jabatan Tinggi Pratama (JPT)	1 Orang
2	Sekretaris Dinas	Jabatan Administrator (JA)	1 Orang
3	Kepala Bidang	Jabatan Administrator (JA)	5 Orang
4	Kasubag	Jabatan Pengawas (JP)	2 Orang
5	Pelaksana	Jabatan Pelaksana (Pelaksana)	20 Orang
6	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional (JF)	22 Orang
7	PPPK	PPPK 2024/2025	17 Orang
8	PPPK Paruh Waktu	PPPK PW 2025	13 Orang
Jumlah ASN			81 Orang
8	Non ASN		5 Orang
Total Pegawai			86 Orang

4. Hasil Kinerja

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DKIS Kota Cirebon telah melaksanakan kegiatan utama di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, antara lain:

- a. Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS (100%).
- b. Capaian Indeks SPBE Tahun 2024 dengan skor 4,13.
- c. Capaian Indeks KAMI Tahun 2025 dengan Nilai 679 poin.
- d. Terselenggaranya Program Cirebon Matahatiku yaitu CCTV yang dapat diakses oleh masyarakat melalui tautan link <https://cctv.cirebonkota.go.id>
- e. Capaian EPSS Tahun 2024 dengan nilai 2,98 poin
- f. Terselenggaranya portal aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik pada “SAMPEAN” dan “SEDULUR”
- g. Ditetapkannya Kota Cirebon sebagai Kota Informatif tingkat provinsi dengan skor 91,4 poin di tahun 2025
- h. Penyelenggaraan Tanda Tangan Eleketronik (TTE) untuk seluruh ASN di Pemerintah Kota Cirebon.
- i. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) telah meraih sertifikat ISO 27001:2022

5. Dukungan Anggaran

DKIS Kota Cirebon, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan dukungan anggaran dari APBD kota Cirebon sebesar Rp 21.785.304.465,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 9.459.224.047,-, Belanja Barang dan Jasa Rp 8.498.290.187,-, Belanja Modal Rp 2.477.790.351,- dan Belanja Hibah Rp. 1.349.999.880,-. Anggaran tersebut cukup memadai untuk mendukung pencapaian kinerja DKIS Kota Cirebon yang telah ditargetkan.

1.4.2 Isu Strategis DKIS KOTA CIREBON

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) bagi DKIS Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi)

Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan Pemerintah Digital saat ini utamanya disebabkan oleh masih kuatnya ego sektoral yang memicu pengembangan aplikasi secara parsial dan tidak terintegrasi di setiap unit kerja. Fenomena ini menciptakan tumpang tindih layanan dan pemborosan anggaran, di mana data publik tersebar di berbagai platform yang tidak saling terhubung (*silo data*). Akibatnya, asas interoperabilitas dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan maksimal, sehingga masyarakat masih sering menghadapi birokrasi digital yang rumit karena harus berinteraksi dengan banyak sistem yang berbeda untuk satu urusan layanan publik. Selain kendala sistem, tantangan besar juga bersumber dari kesenjangan kompetensi SDM dan budaya kerja yang belum sepenuhnya bertransformasi ke arah digital. Adaptasi teknologi sering kali hanya menyentuh aspek formalitas tanpa mengubah pola pikir operasional, sehingga proses bisnis internal masih cenderung konvensional meskipun telah didukung oleh infrastruktur digital. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam penyederhanaan tata kelola dan peningkatan literasi digital bagi seluruh aparatur agar layanan pemerintah digital tidak sekadar memindahkan proses manual ke layar, melainkan benar-benar menciptakan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat..

b. Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial untuk perencanaan, penyusunan program, evaluasi dan pengambilan kebijakan

Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial saat ini disebabkan oleh masih terbatasnya integrasi data lintas sektor dan minimnya ketersediaan data spasial yang mutakhir serta akurat. Banyak program pembangunan yang disusun tanpa visualisasi pemetaan yang jelas, sehingga terjadi ketidakselarasan antara perencanaan di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan. Tanpa dukungan infrastruktur data spasial yang terintegrasi (seperti Satu Peta), pengambilan kebijakan cenderung bersifat umum dan kurang presisi, yang pada akhirnya berisiko menyebabkan tumpang tindih pemanfaatan lahan serta alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran.

Di sisi lain, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis spasial yang mendalam membuat data geospasial hanya sebatas menjadi pelengkap administratif, bukan instrumen utama dalam evaluasi kebijakan. Padahal, penggunaan teknologi berbasis lokasi sangat vital untuk memantau progres pembangunan secara *real-time* dan memprediksi dampak lingkungan maupun sosial dari sebuah program. Transformasi menuju perencanaan berbasis spasial sangat diperlukan agar setiap kebijakan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki akurasi tinggi dalam memitigasi tantangan wilayah di masa depan melalui pendekatan yang lebih saintifik dan terukur

c. Belum optimalnya keamanan data dan informasi serta penanganan insiden keamanan informasi

Belum optimalnya keamanan data dan informasi saat ini disebabkan oleh belum meratanya standar perlindungan teknis dan tata kelola di seluruh unit kerja, sehingga menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ancaman seperti kebocoran data sensitif dan serangan siber lainnya sering kali terjadi karena lemahnya mekanisme kontrol akses serta belum terbangunnya budaya sadar keamanan di tingkat aparatur. Kondisi ini diperparah dengan belum tersedianya prosedur pemulihan bencana (*Disaster Recovery*) yang

teruji secara berkala, sehingga keberlangsungan layanan publik digital berisiko terhenti dalam waktu lama apabila terjadi gangguan pada infrastruktur utama.

Selain itu, efektivitas penanganan insiden keamanan informasi masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas tim respon cepat dan lambatnya koordinasi antar-instansi saat terjadi serangan. Tanpa adanya sistem deteksi dini yang bekerja secara *real-time* dan prosedur penanganan insiden yang terstandarisasi, tindakan mitigasi sering kali bersifat reaktif dan tidak tuntas dalam menyentuh akar permasalahan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan pemerintah dapat menurun, sehingga diperlukan penguatan kapasitas teknis tim keamanan siber dan pemutakhiran regulasi internal secara berkelanjutan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DKIS Kota Cirebon harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 Kota Cirebon. Dalam Renstra DKIS Kota Cirebon menetapkan tujuan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:

"Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi"

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan Transformasi layanan publik berbasis digital pada DKIS Kota Cirebon merumuskan sasaran birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel. Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai.

- Tujuan Ketiga : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan

andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi maka perlu ditentukan Sasaran Strategis DKIS Kota Cirebon berupa Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra (RPD) DKIS Kota Cirebon 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun		
				2024	2025	2026
.	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2 Poin	3,3 Poin	3,4 Poin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun		
				2024	2025	2026
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan (jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%)	100 %	100 %	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun		
				2024	2025	2026
		Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Pemeringkatan Badan publik oleh komisi informasi (skoring) 0	93%	94%	95 %
		Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah/seluruh PD x 100%)	75%	75%	75%
		Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	477 Poin	496 poin	516 Poin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun		
				2024	2025	2026
2	Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 poin	83 poin	85 Poin

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra (RPJMD) DKIS Kota Cirebon 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi		Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)				4.13 Poin*	4.13 Poin*	2.70 Poin	2.70 Poin	2.90 Poin	2.90 Poin	3.00 Poin	
		Meningkatnya a Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Administrasi Pemerintahan											
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	38%	39%	40%	41%	42%	43%	44%	
		Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)				93	94	95	95	96	96	97	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	87%	88%	88.5%	89%	89.5%	90%	90.5%	
		Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)				2.98 Poin	2.98 Poin	3.00 Poin	3.00 Poin	3.10 Poin	3.10 Poin	3.20 Poin	Penilaian dilakukan di tahun genap, perubahan nilai indeks dipengaruhi oleh locus dan tim penilai badan yang berbeda
				Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.98 Poin	2.98 Poin	3.00 Poin	3.00 Poin	3.10 Poin	3.10 Poin	3.20 Poin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Sistem Statistik Nasional (SSN)										
		Meningkatnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi				559 Poin	565 Poin	570 Poin	575 Poin	580 Poin	585 Poin	590 Poin	Pergantian versi dari 4.2 ke 5.0
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon	86%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				81,75 Poin	82 Poin	82,15 Poin	82,30 Poin	82,50 Poin	82,75 Poin	83,00 Poin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Terpenuhinya Dukungan Teknis, Administratif, dan Operasional bagi Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kematangan Organisasi	44 Poin	44 Poin	45 Poin	46 Poin	47 Poin	48 Poin	49 Poin	

2.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, DKIS Kota Cirebon telah menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- **Kebijakan Digitalisasi Layanan Terpadu**

Bahwa seluruh layanan publik di Kota Cirebon diintegrasikan ke dalam satu platform (portal) yaitu SAMPEAN (Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan) dan SEDULUR (Sistem Elektronik Terpadu Layanan untuk Rakyat)

- **Standarisasi Interoperabilitas Data**

Menerapkan standar dan mekanisme keterhubungan serta pertukaran data antar sistem informasi perangkat daerah melalui pemanfaatan *Application Programming Interface* (API), sehingga pertukaran dan pemanfaatan data dapat dilakukan secara terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.

- **Penguatan Portal "Cirebon Satu Data"**

Pada tahun 2025 DKIS Kota Cirebon melalui bidang Statistik Sektor melakukan pengembangan *Landing Page* yang didalam terdapat seluruh layanan Cirebon Satu Data yaitu data terkait Statistik dan data Geospasial. Menjadikan portal statistik sebagai *single source of truth*. Kebijakan ini mewajibkan pemutakhiran data statistik sektoral secara berkala dan terbuka (open data) agar dapat diakses oleh publik dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.

- **Pembentukan dan Penguatan Cirebon-CSIRT**

Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Cirebon telah dibentuk sejak tahun 2021 sebagai

bagian dari upaya penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Sejak pembentukannya, tim CSIRT Kota Cirebon secara konsisten mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelaksanaan bimbingan teknis agen CSIRT yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mendeteksi, menangani, dan memitigasi insiden siber secara efektif. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan bimbingan teknis agen CSIRT dengan topik khusus mengenai ancaman phishing sebagai salah satu bentuk serangan siber yang semakin kompleks. Melalui kegiatan ini, para agen CSIRT dibekali pemahaman teknis dan strategis dalam mengidentifikasi serta merespons upaya penipuan digital. Upaya berkelanjutan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam membangun sistem keamanan informasi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

- **Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi** Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak tahun 2021 dalam rangka penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Hingga saat ini, melalui kerja sama tersebut telah diterbitkan sebanyak 1.924 sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik dari 7258 pegawai. Layanan ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi digital dan peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan. Pada tahun 2025, DKIS Kota Cirebon menerbitkan sebanyak 464 sertifikat elektronik untuk tenaga kesehatan di puskesmas se-Kota Cirebon. Selain itu, sebanyak 60 sertifikat elektronik juga diberikan kepada

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Cirebon. Capaian ini mencerminkan komitmen DKIS Kota Cirebon dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, aman, dan terpercaya..

- **Literasi Digital dan Pendampingan Masyarakat**

Menjalankan program edukasi berkelanjutan bagi warga Cirebon (khususnya tingkat kecamatan/kelurahan, sekolah hingga perguruan tinggi) agar mampu menggunakan layanan digital secara mandiri dan aman dari penipuan daring.

- **Audit Keamanan Informasi Berkala**

Menetapkan kebijakan audit keamanan sistem informasi secara rutin (minimal setahun sekali) pada aplikasi-aplikasi vital milik pemkot untuk mendeteksi celah keamanan sebelum dieksploitasi pihak luar

- **Pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik**

Meningkatkan layanan PPID, layanan SP4N-LAPOR, pengelolaan Website dan media social serta layanan nomor Tunggal panggilan darurat Cirebon Siaga 112.

- **Peningkatan Kualitas Informasi**

Mewujudkan pengelolaan kualitas informasi publik melalui rilis berita, penyusunan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan, peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik, pembuatan konten dan analisis isu publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.

2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;

Kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

Kegiatan :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama DKIS Kota Cirebon berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 050/Kep.043-DKIS/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2024-2026. IKU DKIS Kota Cirebon diambil dari indikator tujuan dan sasaran di Renstra DKIS Kota Cirebon 2024 - 2026 yang terdiri dari 1 indikator yaitu " Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".

Selanjutnya untuk penetapan indikator kinerja utama DKIS Kota Cirebon berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 050/Kep.75-DKIS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025-2029. IKU DKIS Kota Cirebon diambil dari indikator tujuan dan sasaran di Renstra DKIS Kota Cirebon 2025 – 2029 yang terdiri dari 1 indikator yaitu " Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)"

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ada, Rencana Kinerja Tahunan 2025 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen yang memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka memudahkan penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PD) maka DKIS Kota Cirebon telah menyusun rencana kinerja tahunan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) DKIS Kota Cirebon Tahun 2024 - 2026. Adapun rencana kinerja tahun 2025 DKIS Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja 2025	Keterangan
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan (jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%)	100%	

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja 2025	Keterangan
	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	100%	
	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi (jumlah Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi dibagi jumlah Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dikali 100%)	39%	
Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Pemeringkatan Badan publik oleh komisi informasi (skoring)	94%	
	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk x 100%)	88%	

Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja 2025	Keterangan
Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah/seluruh PD x 100%)	75%	
	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral (jumlah PD yg melakukan pengolahan data yang sesuai dengan manajemen CSD dibagi seluruh PD x 100%)	50%	
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	496 poin	
	Presentase Terselenggaranya Layanan Persandian dan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Jumlah layanan yang diselenggarakan dibagi jumlah layanan persandian dan keamanan informasi dikali 100%)	93%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP	79,50 Poin	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh DKIS Kota Cirebon dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan melalui rencana program dan kegiatan

dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Namun dalam perjalanannya Perjanjian Kinerja DKIS Kota pada tahun 2025 mengalami perubahan , hal ini dikarenakan pada perubahan anggaran tahun 2025 terdapat penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Adapun uraian perjanjian kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja DKIS Tahun 2025 (awal tahun anggaran) RPD 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	'Meningkatnya Layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan (jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menyenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%)	100 %	Program Aplikasi Informatika	3.441.170.993
2	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi (skoring)	94 %	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.632.367.460
3	Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral dalam menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan	75 %	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	409.655.806

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ seluruh Perangkat Daerah x 100%)			
4	Meningkatnya Keamanan Indormasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	496 Poin	Program Penyelenggara n Persandian untuk pengamanan Informasi	1.482.211.336
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Kab/Kota	13.089.727.779

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja DKIS Tahun 2025 (Perubahan anggaran) RPJMD 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	100 Persen	Program Aplikasi Informatika	2.875.626.910
2	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	94 Poin	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.570.706.892
3	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,98 Poin	Program Penyelenggara n Statistik Sektoral	314.789.613

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	565 Poin	Program Penyelenggaraa n Persandian untuk pengamanan Informasi	1.482.211.336
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Kab/Kota	1.270.794.052

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja selama tahun 2025 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja DKIS Kota Cirebon.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator sasaran. Pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja DKIS Kota Cirebon tahun 2025, yaitu :

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2025 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah.
2. Indikator Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator (jumlah kegiatan); jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan

tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

- Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan/atau relatif (%).

Cara pengukuran/penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Cara Pengukuran Kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 (Renstra RPD 2024-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	'Meningkatnya Layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%
2	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi (skoring)	Jumlah keterisian quisioner klasifikasi informasi oleh Komisi Informasi provinsi Jawa Barat dan penilaian kualitas pelayanan informasi
3	Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral dalam menyusun Perencanaan	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Daerah/ seluruh Perangkat Daerah x 100%
4	Meningkatnya Keamanan Indormasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	Perolehan nilai Indeks KAMI dilakukan melalui pengisian tools resmi berbentuk Microsoft Excel yang disediakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang mencakup 8 Kategori yaitu sistem elektronik, tata kelola, risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi, perlindungan data pribadi, dan suplemen. Nilai Kategori I + II ... VIII = Nilai Indeks KAMI
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM dihitung dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan metode rata-rata tertimbang 9 unsur pelayanan dan dikonversi ke skala 0–100 menggunakan rumus IKM = NRR tertimbang × 25

Tabel 3. 2 Cara Pengukuran Kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%
2	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Jumlah keterisian quisioner klasifikasi informasi oleh Komisi Informasi provinsi Jawa Barat dan penilaian kualitas pelayanan informasi
3	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	rata-rata tertimbang dari nilai indeks lima domain utama yaitu Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional yang diperoleh dari hasil penilaian mandiri dan penilaian badan/BPS terhadap tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan statistik di Kota Cirebon
4		Nilai Indeks Keamanan Informasi	Perolehan nilai Indeks KAMI dilakukan melalui pengisian tools resmi berbentuk Microsoft Excel yang disediakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang mencakup 8 Kategori yaitu sistem

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		elektronik, tata kelola, risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi, perlindungan data pribadi, dan suplemen. Nilai Kategori I + II ... VIII = Nilai Indeks KAMI
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP diukur melalui akumulasi rata-rata tertimbang dari empat komponen utama Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%) untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran berbasis hasil di instansi pemerintah

Karakteristik indikator kinerja DKIS Kota Cirebon bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian yang semakin baik dengan rumusan :

$$\% \text{ tingkat capaian kinerja} = \frac{REALISASI}{RENCANA} \times 100\%$$

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 90\%$ sampai dengan 100% = Sangat Baik
- Capain kinerja $\geq 75\%$ sampai dengan $89,99\%$ = Baik
- Capain kinerja $\geq 65\%$ sampai dengan $74,99\%$ = Cukup
- Capaian kinerja $\geq 50\%$ sampai dengan $64,99\%$ = Kurang
- Capaian Kinerja $\leq 49,99\%$ sampai dengan 0% = Sangat Kurang

3.1 Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Implementasi SAKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon memperoleh nilai 79,35 atau kategori **SANGAT BAIK** dengan predikat (**BB**). Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat akuntabilitas yang baik ditandai dengan pencapaian sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DKIS. Hal tersebut ditandai dengan sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Sub.Koordinator. Namun total Nilai SAKIP mengalami penurunan sebesar 2,40 poin dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya mendapat nilai 81,75 atau kategori memuaskan (A). Dalam upaya terus meningkatkan implementasi AKIP dan Akuntabilitas dapat lebih optimal, DKIS berkomitmen akan terus mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di DKIS serta menumbuhkan inovasi dan ide-ide baru yang bermanfaat.

Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik agar lebih meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Rencana Aksi yang disusun akan berfokus pada dua hal yaitu mempertahankan pencapaian yang mendapatkan predikat A serta meningkatkan pencapaian yang masih mendapatkan predikat BB atau B. Komponen-komponen tersebut terdiri dari :

1. Komponen Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00) mendapatkan nilai 24,60 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 25,50. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi, sebagai berikut :
 - a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 berbeda dengan indikator yang tercantum dalam Renstra, PK dan Renja Tahun 2024;

Rencana Aksi :

Akan dilakukan penyelerasaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Renja dan dokumen perencanaan lainnya akan disusun berdasarkan Renstra DKIS Kota Cirebon tahun 2025-2029;

- b. Terdapat perbedaan sasaran dan indikator pada Renstra, IKU dan PK yang tidak selaras. Indikator pada Renja Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan dokumen perencanaan lainnya, karena Renja tidak menjelaskan indikator sasaran;

Rencana Aksi :

Akan dilakukan penyelerasaan sasaran dan indikator, dan pencantuman indikator dalam setiap sasaran terutama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Renja dan dokumen perencanaan lainnya akan disusun berdasarkan Renstra DKIS Kota Cirebon tahun 2025-2029;

- c. Belum dilakukan reviu IKU secara berkala;

Rencana Aksi :

Akan dilakukan reviu IKU secara berkala bersamaan dengan penyusunan laporan kinerja interim pertriwulanan dan melengkapi bukti dukung berupa surat undangan, daftar hadir dan notula;

- d. Target Renstra belum memenuhi kriteria yang baik, yaitu dapat dicapai, menantang dan realistis untuk sasaran Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (75%), karena target sama untuk setiap tahunnya (2024, 2025, dan 2026).

Rencana Aksi :

Telah disusun target kinerja berdasarkan renstra 2025-2029 untuk sasaran meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator indeks pembangunan statistik (IPS) yang cenderung naik setiap 2 (dua) tahun dikarenakan untuk penilaian indeks pembangunan statistik

(IPS) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali.

2. Komponen Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00) mendapatkan nilai 24,60 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 22,50. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang memuat Definisi Operasional untuk indikator sasaran. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja. Pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran telah dilakukan melalui esakip.cirebonkota.go.id. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik juga telah menyusun laporan capaian Kinerja triwulanan melalui laporan interim yang berisi capaian kinerja, capaian output serta permasalahan yang dihadapi. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi komponen Pengukuran Kinerja, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dalam bentuk evaluasi kinerja belum terdapat alur yang jelas jika terjadi kesalahan data.

Rencana aksi

- Akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon
 - Membuat dokumen SOP pengukuran kinerja dengan menambahkan komponen alur kesalahan data disertai dengan mitigasinya.
3. Komponen Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00) mendapatkan nilai 11,85 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 12,75. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi, sebagai berikut :
 - a. LKIP disusun tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

LKIP DKIS	Pedoman Penyusunan LKIP
BAB I Pendahuluan	BAB I Pendahuluan
BAB II Perencanaan Kinerja	BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Perencanaan Kinerja	BAB III Akuntabilitas Kinerja
Membandingkan :	Membandingkan :
1. Menyajikan target dan realisasi sasaran RPJMD;	1. Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil kinerja dengan mengukur capaian PK dan IKU;
2. belum menyajikan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	2. realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. belum menyajikan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	3. realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Analisis :	Analisis :
1. Belum menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya;	1. penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya;
2. belum menyajikan penyebab analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan	2. program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
BAB IV Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah	BAB IV Penutup
BAB V Penutup	

Rencana Aksi :

- DKIS akan melakukan rapat evaluasi penyusunan LKIP sesuai dengan DKIS Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- DKIS Kota Cirebon akan menyusun sistematika LKIP dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;

b. LKIP belum menyajikan :

- 1) data realisasi capaian kinerja sasaran PK tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 2) realisasi kinerja yang terdapat dalam sasaran PK dalam jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3) efisiensi penggunaan sasaran sumber daya atas program dan kegiatan;
- 4) penyebab analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Rencana aksi :

- Dalam penyusunan LKIP DKIS Kota Cirebon Tahun 2026, DKIS Kota Cirebon akan menyajikan :
 - 1) realisasi capaian kinerja sasaran PK tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 2) penjelasan realisasi kinerja yang terdapat dalam sasaran PK dalam jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 3) efisiensi penggunaan sasaran sumber daya atas program dan kegiatan;
 - 4) pemasalahan, penyebab analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan atau peningkatan/penurunan realisasi terhadap target indikator sasaran serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00) mendapatkan nilai 18,00 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 21,00. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi, sebagai berikut :
 - DKIS Kota Cirebon belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Terdapat 1 (satu) rekomendasi hasil evaluasi Tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti dari 9 (sembilan) rekomendasi, yaitu mempertahankan ketersediaan dokumen serta kualitas dokumen laporan kinerja.

Rencana aksi :

- Menindaklanjuti rekomendasi yaitu dengan melengkapi ketersediaan dokumen serta kualitas dokumen laporan kinerja untuk tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang.

3.2 Capaian Kinerja DKIS Kota Cirebon

Selanjutnya, untuk Pencapaian sasaran strategis DKIS Kota Cirebon pada tahun 2025, sesuai dengan dokumen renstra DKIS Kota Cirebon tahun 2024 - 2026 dan renstra DKIS Kota Cirebon tahun 2025-2029 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak lima sasaran telah ditetapkan pada tahun 2025 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 yang memiliki 5 indikator sasaran yang terdiri dari 4 indikator sasaran untuk Sasaran strategis dan 1 untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis DKIS Kota Cirebon Tahun 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 berdasarkan renstra RPD 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				Tingkat Capaian Akhir tahun	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan (Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Pemeringkatan Badan Publik oleh komisi informasi (skoring) Jumlah Badan Publik Informatif x 100%	94%	0%	0%	0%	91,40%	95%	Belum Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				Tingkat Capaian Akhir tahun	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
3	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah/seluruh PD X 100%)	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Melebihi Target
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	496 poin	0	0	0	679 poin	516 poin	Melebihi Target
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat	83%	88,37	84,26	89,99	90,09	85 poin	Melebihi Target

Berdasarkan uraian pada tabel 5 di atas, dapat terlihat bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja, semua indikatornya tingkat capaiannya diatas 100% atau melebihi target indikator. Adapun tingkat capaian terendah sebesar 95% pada sasaran “*Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik*” dan tingkat capaian 100% pada sasaran “*Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*”.

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 berdasarkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				Tingkat Capaian Akhir tahun	Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	100%				100%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	94%				91,40%	97%	Belum Tercapai
3	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,98 Poin				2,98	100%	Tercapai
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi	565 poin				679 poin	120%	Melebihi Target
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Nilai Sakip	82 Poin				79,35%	97%	Belum Tercapai

Berdasarkan uraian pada tabel 5 di atas, dapat terlihat bahwa dari 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaiannya diatas 100% atau melebihi target indikator yaitu sasaran ” *Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah*” . Adapun tingkat capaian terendah sebesar 97% terdapat pada 2 (dua) sasaran yaitu “*Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik*” dan “*Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah*”. Selanjutnya terdapat 2 (dua) tingkat capaian 100% pada sasaran “*Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)*” dan “*Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah*”

3.3 Capaian Kinerja atas IKU DKIS Kota Cirebon

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Atas IKU DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2024-2026

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3 Poin	4,13 Poin	125,15%	memuaskan

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU DKIS Kota Cirebon telah menunjukkan tingkat capaian yang memuaskan, dengan capaian angka 125,15% dengan indikator kinerja utamanya adalah Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Atas IKU DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2025-2029

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	4,13 Poin	4,13 Poin	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU DKIS Kota Cirebon telah menunjukkan tingkat capaian yang memuaskan, dengan capaian angka 100% dengan indikator kinerja utamanya adalah Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Saat ini, Indeks SPBE masih dijadikan indikator kinerja utama pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan sistem penilaian ini. Aktualisasi penyelenggaraan indeks Pemerintah Digital (Pemdi) akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan penyesuaian Indikator pada Tujuan 3 Sasaran 1, yang semula Indeks SPBE disesuaikan menjadi Indeks Pemerintah Digital.

3.4 Evaluasi dan Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tiap Tahun

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja yang berkaitan dengan tujuan pertama “Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan” adalah sebagai berikut:

3.4.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Capaian Sasaran Pertama

Sasaran 1: “Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka implementasi Pemerintah Digital (Pemdi)”

Hasil pencapaian kinerja sasaran (Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan (jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan dibagi Jumlah Perangkat Daerah dikali 100%), capaian indikator pada sasaran ini pada triwulan IV tahun 2025 realisasinya sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Dengan demikian capaian kinerja pada sasaran 1 adalah **TERCAPAI** dengan capaian 100%. Sasaran ini pada triwulan IV, sama hanya saja dalam peningkatan pelayanan menjadi lebih baik.

A. Pencapaian Indikator



Selain perangkat daerah DKIS juga telah melayani internet dan intranet pada kelurahan dan puskesmas dengan topologi sebagai berikut :

Berdasarkan topologi diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah jaringan intra untuk perangkat daerah adalah 32 (tiga puluh dua) titik simpul jaringan, untuk

kelurahan berjumlah 22 (dua puluh dua) titik simpul jaringan dan puskesmas 22 (dua puluh dua) titik simpul jaringan.

Berdasarkan perhitungan Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung

NAMA PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG
DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO KOTA CIREBON

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
2	Sekretariat DPRD Kota Cirebon	
3	Inspektorat Daerah Kota Cirebon	
4	Dinas Pendidikan Kota Cirebon	
5	Dinas Kesehatan Kota Cirebon	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cirebon	
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon	
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon	
10	Dinas Sosial Kota Cirebon	
11	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon	
13	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon	
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon	
16	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
17	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon	
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon	
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Cirebon	
24	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon	
28	Kecamatan Kejaksan	
29	Kecamatan Kesambi	
30	Kecamatan Harjamukti	
31	Kecamatan Lemahwungkuk	
32	Kecamatan Pekalipan	

dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS mencapai 100 % .

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$\frac{32 PD}{32 PD} = 100 \%$, maka pencapaian kinerja tersebut adalah $\frac{100\%}{100\%} = 100\%$ dengan predikat ***Tercapai***.

Upaya dalam mewujudkan peningkatan pencapaian Sasaran 1 perlu adanya rencana aksi dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Program ini dianggarkan sebesar Rp 2.875.626.910,00 terealisasi sebesar 2.732.643.771,00 (95,03 %)

1) **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** meliputi: Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 63.694.000,- terealisasi sebesar Rp 61.774.950,00 (96,99%) yaitu:

A. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan;

a) Kegiatan Sub Kordinator Pengelolaan Domain yang dilaksanakan:

- Pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain SKPD / OPD dan Puskesmas lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- Pengawasan Penggunaan Pengelolaan Sub Domain SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon

b) Kegiatan Bimtek Pengelolaan Domain dan Sub Domain Menggunakan CMS pada seluruh SKPD / OPD dan Puskesmas Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon

- Bimtek Pengelolaan Domain dan Sub Domain Penggunaan CMS pada seluruh SKPD / OPD dan Puskesmas Lingkup Pemerintah Daerah Kota

Cirebon



Gambar 3. 4 Bimbingan Teknis Pengelola Domain dan Sub Domain Penggunaan CMS Pada Seluruh SKPD/OPD/Puskesmas Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon di Ruang Cirebon Command Center Kantor SETDA Kota Cirebon dimulai dari Tgl 11, 14, 19 s.d 21 Bulan Agustus 2025

B. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 16 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.811.932.910,00 terealisasi sebesar Rp 2.670.868.821,00 (94,98%) yaitu :

a) Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD

Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini diambil sebagai bentuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis.

b) Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis

Kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini diambil sebagai bentuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis

c) Kegiatan Pengelolaan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

- Koordinasi dan sinkronisasi fasilitas penyelenggaraan SPBE

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa - Rabu tanggal 25-27 November 2025 bertempat di Ruang Rapat DKIS Bypass, kegiatan ini dihadiri oleh Bidang Layanan E-Government, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dan Bidang Infrastruktur TIK. 2. Kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pusat Data, Keamanan Informasi, Data dan Informasi layanan digital dan keamanan informasi di Pusat Data Kota Cirebon.



Gambar 3. 5 Koordinasi dan sinkronisasi fasilitas penyelenggaraan SPBE

- Pengadaan UPS dilaksanakan menggunakan metode

pemilihan melalui e-purchasing Katalog Elektronik LKPP
<https://katalog.inaproc.id/>

Nama Produk : APC SRTG20KXLI Smart UPS ONLINE 20KVA 20000va
Smart Rackmount Link Katalog :

<https://katalog.inaproc.id/cendana-solusindo/apc-srtg20kxli-smart-ups-onli ne-20kva-20000va-smart-rackmount>

Perangkat telah diperiksa dan telah terpasang berfungsi baik di ruang
Pusat Data:



Gambar 3. 6 Instalasi UPS

- Pengadaan Server dilaksanakan menggunakan metode pemilihan melalui e-purchasing Katalog Elektronik LKPP
<https://katalog.inaproc.id/> Nama Produk : Server X-Fusion
2288H V6 Link Katalog :

<https://katalog.inaproc.id/pt-indosat-tbk-iju9/server-x-fusion-2288h-v6>

Perangkat telah diperiksa dan telah terpasang berfungsi baik di ruang
Pusat Data:



Gambar 3. 7 Server x fusion terpasang

d) Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini diambil sebagai bentuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis.

e) Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

- Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Cirebon Tahun 2025-2029

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 bertempat di Ruang Prabayaksa, Gedung SETDA Lt. 3, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Asisten Administrasi Umum, Tenaga Ahli Arsitektur Pemerintah Digital, dan seluruh SKPD / OPD Kota Cirebon. Sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, telah disusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE untuk periode 2025-2030. Dokumen ini menjadi dasar bersama dalam mengarahkan pengembangan dan integrasi layanan digital di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

f) Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini diambil sebagai bentuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis.



Gambar 3. 8 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta

g) Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

- **Rapat Evaluasi SIKOPER**

Kegiatan Rapat Evaluasi SIKOPER telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum SETDA Kota Cirebon, sebagai upaya untuk pengembangan dan evaluasi Aplikasi SIKOPER.



Gambar 3. 9 Rapat evaluasi SIKOPER

- Rapat Pembahasan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi hukum (JDIH) dan Aplikasi SIKOPER.

Kegiatan Rapat Evaluasi SIKOPER telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 bertempat di Ruang Rapat Bagian Hukum SETDA Kota Cirebon, sebagai upaya untuk pengembangan dan evaluasi Aplikasi SIKOPER.



Gambar 3. 10 Rapat Pembahasan JDIH dan SIKOPER

- Diskusi Pembangunan CMS dengan IT Genic
Kegiatan Diskusi Pembangunan CMS dengan IT Genic telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 bertempat

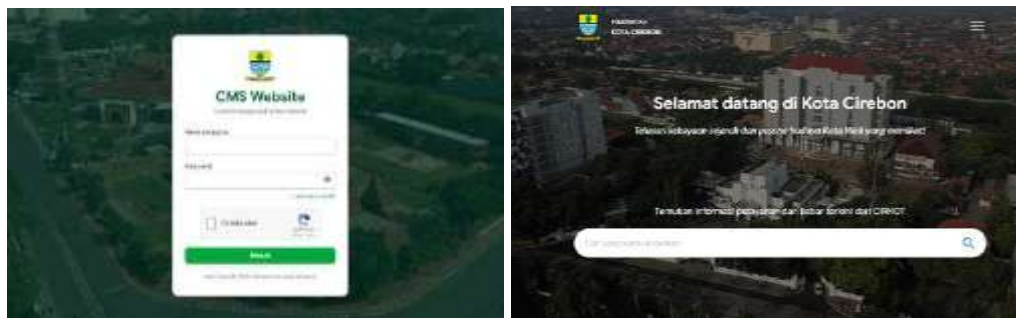


Gambar 3. 11 Diskusi pembangunan CMS dengan IT Genic

di CWS DKIS Kota Cirebon, sebagai upaya untuk pembuatan laman resmi Kota Cirebon, Perangkat Daerah, Kecamatan Kelurahan, Rumah Sakit dan OPD Lainnya.

- Pengembangan CMS Website

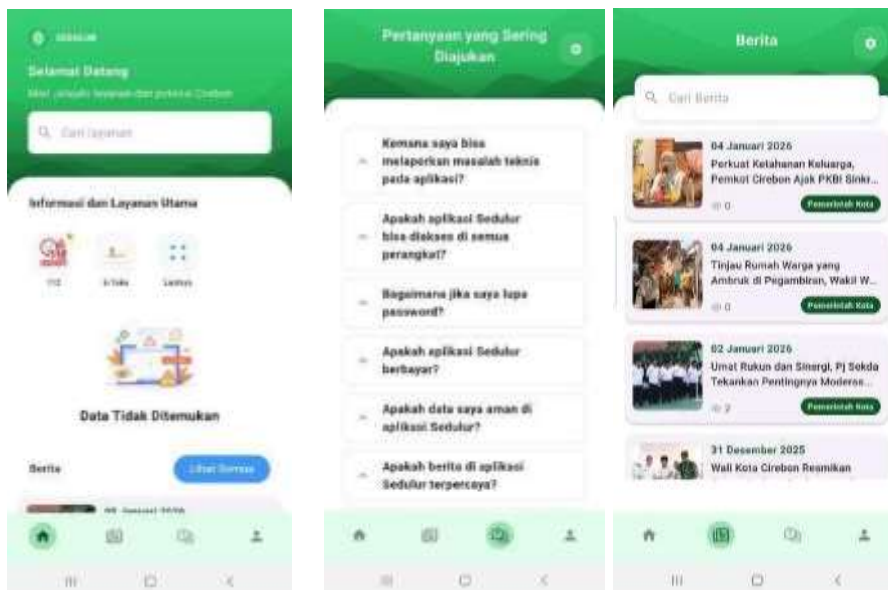
Kegiatan pengembangan CMS untuk website pemerintah Kota Cirebon adalah sistem terintegrasi bernama "Website BERPIJAR", yang diluncurkan oleh DKIS Kota Cirebon pada Agustus 2025 untuk standarisasi, kemudahan pengelolaan konten, keamanan, dan transparansi publikasi digital di seluruh unit kerja pemkot. Sistem ini memungkinkan setiap dinas/unit mengelola kontennya sendiri dengan desain dan kerangka standar, didukung pelatihan intensif untuk



Gambar 3. 12 Pengembangan CMS Website
meningkatkan kompetensi pengelola situs web.

- **Pengembangan Aplikasi SEDULUR Cirebon**

Pengembangan aplikasi Portal Layanan Masyarakat melalui perangkat mobile dengan tampilan yang lebih mudah untuk pengguna dan juga telah dibuatkan CMS website untuk pengelolaan aplikasi SEDULUR Cirebon agar lebih mudah dikelola.



Gambar 3. 13 Pengembangan aplikasi SEDULUR

- h) Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini diambil sebagai bentuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis.

- i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini diambil sebagai

bentuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis.

j) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

i. Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

1. Pemeliharaan Jaringan DPUTR Kota Cirebon

Pada hari tersebut Senin 20 Januari 2025 team sistem jaringan Infra TIK Dkis Kota Cirebon melaksanakan kunjungan Monitoring/Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon di Kantor DPUTR Kota Cirebon untuk melakukan pemeliharaan perangkat jaringan yang di sebabkan putusnya kabel jaringan fiber optik Komplek Perkantoran Bima.

Uraian kegiatan:

- ✓ Pengecekan perangkat jaringan dan jalur kabel LAN
- ✓ Penyambungan splicing kabel fiber optic
- ✓ Konfigurasi ulang perangkat jaringan
- ✓ Test bandwidth melalui jaringan Lan dan wireless

Hasil Kegiatan :

Dari hasil pengecekan, penyambungan dan konfigurasi ulang perangkat jaringan, jalur dan test bandwith yang dilakukan oleh team sistem jaringan distribusi internet/jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon telah berjalan dengan baik maupun perangkatnya bekerja secara maksimal.

Rekomendasi Hasil Kegiatan:

Kami merekomendasikan untuk penggantian perangkat jaringan dengan teknologi yang terbaru dan pemasangan BOX perangkat jaringan.



Gambar 3. 14 Pemeliharaan jaringan DPUTR

ii. Pemeliharaan Jaringan BPKAD Kota Cirebon

Pada Tanggal 8 April 2025 Hari Selasa team sistem jaringan Infra TIK Dkis Kota Cirebon melaksanakan kunjungan Monitoring/Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon di BPKAD Kota Cirebon untuk menindaklanjuti laporan gangguan layanan jaringan pada Kantor tersebut

Uraian Kegiatan:

- ✓ Pengecekan perangkat jaringan beserta jalur kabel Lan
- ✓ Penggantian perangkat jaringan/switch dan konfigurasinya
- ✓ Test bandwidth melalui jaringan wireless dan LAN

Hasil kegiatan:



Gambar 3. 15 Pemeliharaan jaringan BPKAD

Dari hasil pengecekan dan penggantian perangkat jaringan router switch yang dilakukan oleh team sistem jaringan distribusi internet/jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon telah berjalan dengan baik maupun perangkatnya bekerja secara maksimal.

- iii. Pemeliharaan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
- Pada hari Jumat 4 Juli 2025 team sistem jaringan Infra TIK Dkis Kota Cirebon melaksanakan kunjungan Monitoring/Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon di DLH Kota Cirebon untuk menindaklanjuti laporan terkait putusnya jaringan internet.

Uraian Kegiatan:

- ✓ Pengecekan perangkat komputer jaringan/router
- ✓ Pengecekan kabel jaringan Test Bandwith melalui jaringan wireless dan LAN

Hasil Kegiatan:

Dari hasil pengecekan perangkat Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon yang dilakukan oleh team sistem jaringan DKIS Kota Cirebon di dapati kabel jaringan tidak menancap dengan baik kedalam Port Lan pada router jaringan sehingga mengakibatkan tidak tersedianya jaringan internet. setelah dilakukan perbaikan internet berjalan dengan baik maupun perangkatnya bekerja secara maksimal.

Rekomendasi Hasil Kegiatan:

Kami merekomendasikan untuk dilakukan pemasangan box pengaman perangkat jaringan pada kantor tersebut.



Gambar 3. 16 Pemeliharaan jaringan DLH

iv. Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon pada BAKESBANGPOL Kota Cirebon

Pada tanggal 17 Desember 2025 team sistem jaringan DKIS Kota Cirebon melakukan kunjungan di BAKESBANGPOL terkait laporan distribusi jaringan internal pada kantor tersebut kurang maksimal dan dilakukan dengan penambahan kabel jaringan Lan disertai pemasangan perangkat akses point/WIFI.

Uraian Kegiatan:

- ✓ Penarikan kabel jaringan Lan dari switch router menuju ruangan yang akan di pasang perangkat wifi/akses point.
- ✓ Pemasangan perangkat jaringan akses point/wifi.
- ✓ Instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan disertai setting SSID Akses Point beserta konektng kabel jaringan menuju masing - masing perangkat komputer pengguna.
- ✓ Test Bandwidth menggunakan kabel Lan dan Akses Point. Hasil

kegiatan: Setelah dilakukan penarikan kabel jaringan menuju perangkat komputer dan instalasi akses point, jaringan internet dan intranet dapat berjalan dengan lancar dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Rekomendasi Kegiatan:

Kami mendapati Port Router Jaringan sudah penuh penggunaanya sehingga kami merekomendasikan untuk penyediaan perangkat jaringan router yang lebih kompleks dan terbaru.



Gambar 3. 17 Pemeliharaan jaringan BAKESBANGPOL

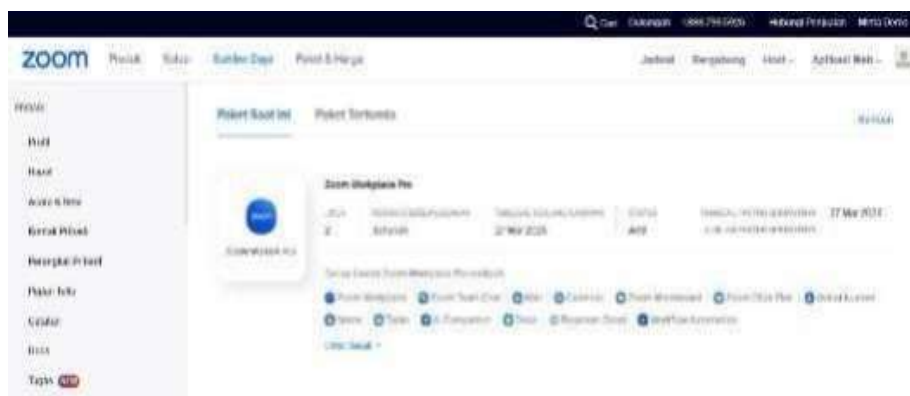
- k) Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini

I) Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

m) Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

- a. Pengelolaan Mini Command Center DKIS dan penyelenggaraan Layanan Sistem Informasi Kota Cerdas. Kegiatan yang dilakukan yaitu belanja honorarium non ASN Operator Komputer Mini Command Center (MCC).
- b. Petugas Operator Mini Command Center (MCC) bertanggung jawab pada kegiatan yang dilaksanakan di Mini Command Center DKIS Kota Cirebon.
- c. Penyediaan layanan virtual meeting melalui sewa akun Zoom sebagai sarana rapat secara daring yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cirebon.



- n) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
- a. Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil). Kegiatan ini diikuti oleh anggota Relawan TIK dan anak yatim piatu yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Ramadhan dengan detail berikut :
- i. Jum'at, 7 Maret 2025 di Yayasan Yatim Piatu dan Dhuafa Al



Gambar 3. 18 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan Al Ichsan
Ichsan diikuti oleh 35 peserta

- ii. Jum'at, 14 Maret 2025 di LKSA Yayasan Al Falah diikuti oleh 39 peserta



Gambar 3. 19 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan Al Falah

- iii. Jum'at, 21 Maret 2025 di LKSA Parahita diikuti oleh 23 peserta



Gambar 3. 20 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan LKSA Parahita

- iv. Jum'at, 26 Maret 2025 di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Darul Ulum diikuti oleh 30 peserta



Gambar 3. 21 Kolaborasi Kebaikan Cari Keberkahan bersama Literasi Digital (Kolak Candil) di Yayasan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Darul Ulum

- v. Rabu, 04 Juni 2025 bertempat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 45 dalam rangka peningkatan literasi digital/digital parenting diikuti oleh 35 Peserta ibu kader p2wkss RW.06 Suradinaya Utara Kota Cirebon



Gambar 3. 22 Peningkatan literasi digital/digital parenting kade P2WKSS RW06 Suradinaya Utara Kota Cirebon

- vi. Rabu, 04 Juni 2025 bertempat di TK Negeri Pembina materi coding dan pemanfaatan AI diikuti peserta 13 orang



Gambar 3. 23 Coding dan Pemanfaatan AI di TK Negeri Pembina

- b. Sosialisasi dan pelatihan CMS Situs Web Pemerintah Kota Cirebon (Website Berpijar) bertempat di Ruang Assessment Center Gedung Balai Kota Cirebon Lantai 2, Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada pengelola situs web dalam penggunaan CMS, memastikan keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan situs web di unit kerjanya, dengan detail berikut :

- Senin, 11 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 14 Perangkat Daerah



Gambar 3. 24 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon

- Kamis, 14 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 14 Perangkat Daerah



Gambar 3. 25 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (2)

- Selasa, 19 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 14 Kecamatan dan kelurahan



Gambar 3. 26 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (3)

- Rabu, 20 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 13 Kecamatan dan Kelurahan



Gambar 3. 27 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (4)

- Kamis, 21 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 22 Puskesmas



Gambar 3. 28 Sosialisasi dan Pelatihan CMS Website Kota Cirebon (5)

o) Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE terkena efisiensi dan tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor K/000.7.2.3/11/VEA/2025 tentang Rencana Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah efisiensi ini diambil sebagai bentuk penyesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan strategis.

p) Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

a. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon

i. Penyediaan jaringan pada DKUMKPP Kota Cirebon Pada hari tersebut Tanggal 25 Februari 2025 team sistem jaringan Infra TIK DKIS Kota Cirebon melaksanakan kunjungan Monitoring/Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon di Kantor DKUMKPP Kota Cirebon untuk melakukan penambahan kabel jaringan di salah satu ruangan pelayanan lantai 1. Uraian kegiatan:

- ✓ Pengecekan perangkat jaringan dan jalur kabel Lan
- ✓ Penarikan kabel jaringan dari router menuju ruangan yang akan di pasang jalur kabel internet
- ✓ Pengkrimpangan konektor kabel jaringan dengan komputer user
- ✓ Test bandwidth jaringan

Hasil Kegiatan:

Dari hasil pengecekan dan penyambungan penambahan kabel jaringan yang dilakukan oleh team sistem jaringan distribusi internet/jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon telah berjalan dengan baik maupun perangkatnya bekerja secara maksimal.

Rekomendasi Hasil Kegiatan:

Kami merekomendasikan untuk penggantian perangkat jaringan dengan kondisi teknologi yang terbaru dan pemasangan BOX perangkat jaringan.



Gambar 3. 29 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di DKUKMPP Kota Cirebon



Gambar 3. 30 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di DKUKMPP Kota Cirebon

- ii. Penyediaan jaringan pada Balai UPT Veteriner DKP3 Kota Cirebon
Pada tanggal 5 Mei 2025 team sistem jaringan Infra TIK Dkis Kota Cirebon melaksanakan kunjungan Monitoring / Pemasangan Jaringan

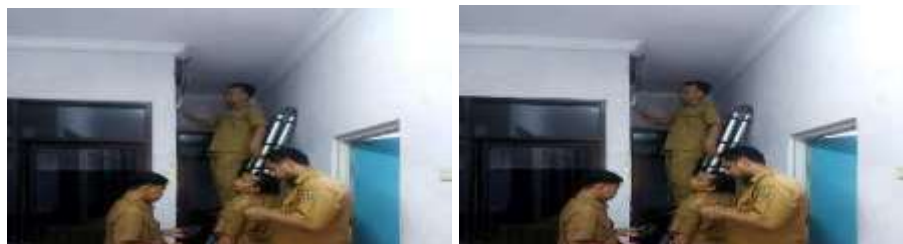
Intra Pemerintah Kota Cirebon di Balai UPT Veteriner DKP3 Kota Cirebon untuk memasang perangkat jaringan beserta pengaktifan Lokal Loop.

Uraian kegiatan:

- ✓ Pemasangan perangkat router jaringan
- ✓ Konfigurasi perangkat jaringan
- ✓ Test bandwidth melalui jaringan wireless dan Lan

Hasil kegiatan:

Dari hasil pemasangan dan pengaktifan perangkat Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon yang dilakukan oleh team sistem jaringan DKIS Kota Cirebon telah berjalan dengan baik maupun perangkatnya bekerja secara maksimal.



Gambar 3. 31 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di Balai UPT Veteriner DKP3 Kota Cirebon

- iii. Penyediaan Jaringan Pada Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon Pada tanggal 9 September 2025 hari Selasa team sistem jaringan Infra TIK Dkis Kota Cirebon melaksanakan kunjungan Monitoring / Pemasangan Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon di Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon untuk memasang perangkat jaringan beserta pengaktifan Lokal Loop kembali pasca renovasi kantor Kelurahan tersebut.

Uraian kegiatan:

- ✓ Pemasangan perangkat router mikrotik RB951
 - ✓ Konfigurasi perangkat jaringan DKIS Kota Cirebon
 - ✓ Test bandwidth melalui jaringan wireless dan Lan
- Hasil kegiatan:

Dari hasil pemasangan dan pengaktifan perangkat Jaringan Intra Pemerintah Kota Cirebon yang dilakukan oleh team sistem jaringan DKIS Kota Cirebon telah berjalan dengan baik maupun perangkatnya bekerja secara maksimal di Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon.

Rekomendasi Hasil Kegiatan:

Kami merekomendasikan untuk pembagian distribusi jaringan internet dengan penambahan kabel LAN dan access point/wifi agar internet dapat tersebar ke seluruh ruangan Kantor Kelurahan Harjamukti.



Gambar 3. 32 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di Kelurahan Harjamukti Kota Cirebon

- iv. Penyediaan akses internet dan intranet di UPT Farmasi Dinkes Kota Cirebon.

Pada hari Rabu Tanggal 24 Desember 2025 Team Sistem Jaringan Bidang InfraTIK DKIS Kota Cirebon melakukan penyediaan akses internet dan intranet di kantor UPT Farmasi Dinkes Kota Cirebon Jalan Sudarsono. Kegiatan ini bertujuan mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada pelayanan dan kinerja di instansi tersebut.

Uraian kegiatan:

- ✓ Penyambungan kabel Fiber Optic dan perangkatnya pada sumber kabel FO terdekat.
- ✓ Pemasangan perangkat jaringan internet dan intranet
- ✓ Instalasi dan Konfigurasi Sistem Jaringan
- ✓ Test Bandwidth melalui jaringan Lan dan Nirkabel

Hasil kegiatan:

Dari hasil kegiatan penyediaan akses internet dan intranet di UPT Farmasi Dinkes Kota Cirebon telah terpasang dengan baik dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan dan pelayanan Pemerintahan Kota Cirebon.

Rekomendasi kegiatan:

Kami merekomendasikan untuk dilakukan pemasangan lokalloop secara spesifik pada Tahun Anggaran yang akan datang.



Gambar 3. 33 Penyediaan jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon di UPT Farmasi Dinkes Kota Cirebon

3.4.2 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua

Sasaran 2: “Meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik”



Gambar 3. 34 Infografis Sasaran Kedua

Hasil pengukuran capaian kinerja dari Tujuan/Sasaran “meningkatnya pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik” dengan indikator kinerja:

Indeks Keterbukaan Informasi Publik, melalui Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat. Hasil kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon meraih predikat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi “Informatif” Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Berhak Menggunakan Label Badan Publik Zona Informatif selama Tahun 2026. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 menggunakan realisasi sesuai dengan hasil resmi Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kota Cirebon sebesar 91,40 Poin dengan target 94 Poin. Dengan demikian, capaian kinerja pada Sasaran 2 adalah **BELUM TERCAPAI**.

Dalam mewujudkan Sasaran 2, maka Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 11 sub kegiatan. Berikut rincian 11 (sebelas) sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Relasi Media

a) Media Gathering

Sub Kegiatan Relasi Media telah menyelenggarakan kegiatan Media Gathering yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Januari 2025 di Solo – Jawa Tengah Kegiatan ini bertemakan “Media Gathering Kota Cirebon tahun 2025”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Cirebon Drs. H. Agus Mulyadi M.Si beserta istri, Pj Sekda Kota Cirebon Dr. H. ling Daiman, S.Ip., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa, AP., MM. Pimpinan Bank BJB Cabang Cirebon, serta sejumlah kepala perangkat daerah.



Gambar 3. 35 Dokumentasi Media Gathering di RM. Ono Solo



Gambar 3. 36 Dokumentasi Media Gathering Malam Gala Dinner

b) Press Conference

Pada Sub kegiatan Relasi Media juga telah melaksanakan *Press Conference* pada tanggal 24 Maret 2025, dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan serta silaturahmi Pemerintah

daerah bersama dengan Jurnalis Kota Cirebon bertempat di rumah dinas Wali Kota Cirebon, Jl. Siliwangi No. 90 Kota Cirebon.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo, S.AP., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa, A.P., M.M., kepala perangkat daerah lainnya serta para Jurnalis Kota Cirebon.

Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah kota dengan media, serta sebagai bentuk apresiasi kepada para jurnalis yang telah berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga mengingatkan bahwa saat ini Cirebon tengah menghadapi tantangan cuaca yang cukup ekstrem, terutama dengan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan beberapa titik di kota ini terendam genangan air.

Wali Kota menjelaskan bahwa Pemda Kota Cirebon saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur, sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah genangan air dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Dalam upaya membangun Kota Cirebon, Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Sebagai penutup, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk selalu optimis dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Cirebon.



Gambar 3. 37 Dokumentasi Press Conference 24 Maret 2025

Kegiatan *press conference* juga telah dilaksanakan tanggal 12 Juni 2025 dalam rangka sosialisasi dan *soft launching* aplikasi “SIMERCI” (Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon) serta penyampaian informasi terkait Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon kepada para jurnalis. Kegiatan ini berlangsung di *Co-Working Space* DKIS Kota Cirebon dengan narasumber Kepala DKUKMPP sekaligus Ketua Pelaksana Hari Jadi Kota Cirebon, Dr. ling Daiman, S.IP., M.Si.

Dalam pemaparannya, Dr. ling Daiman, S.IP., M.Si. menjelaskan rangkaian Semarak Hari Jadi ke-598 Kota Cirebon yang akan diisi dengan berbagai macam kegiatan menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Beragam acara tersebut dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif

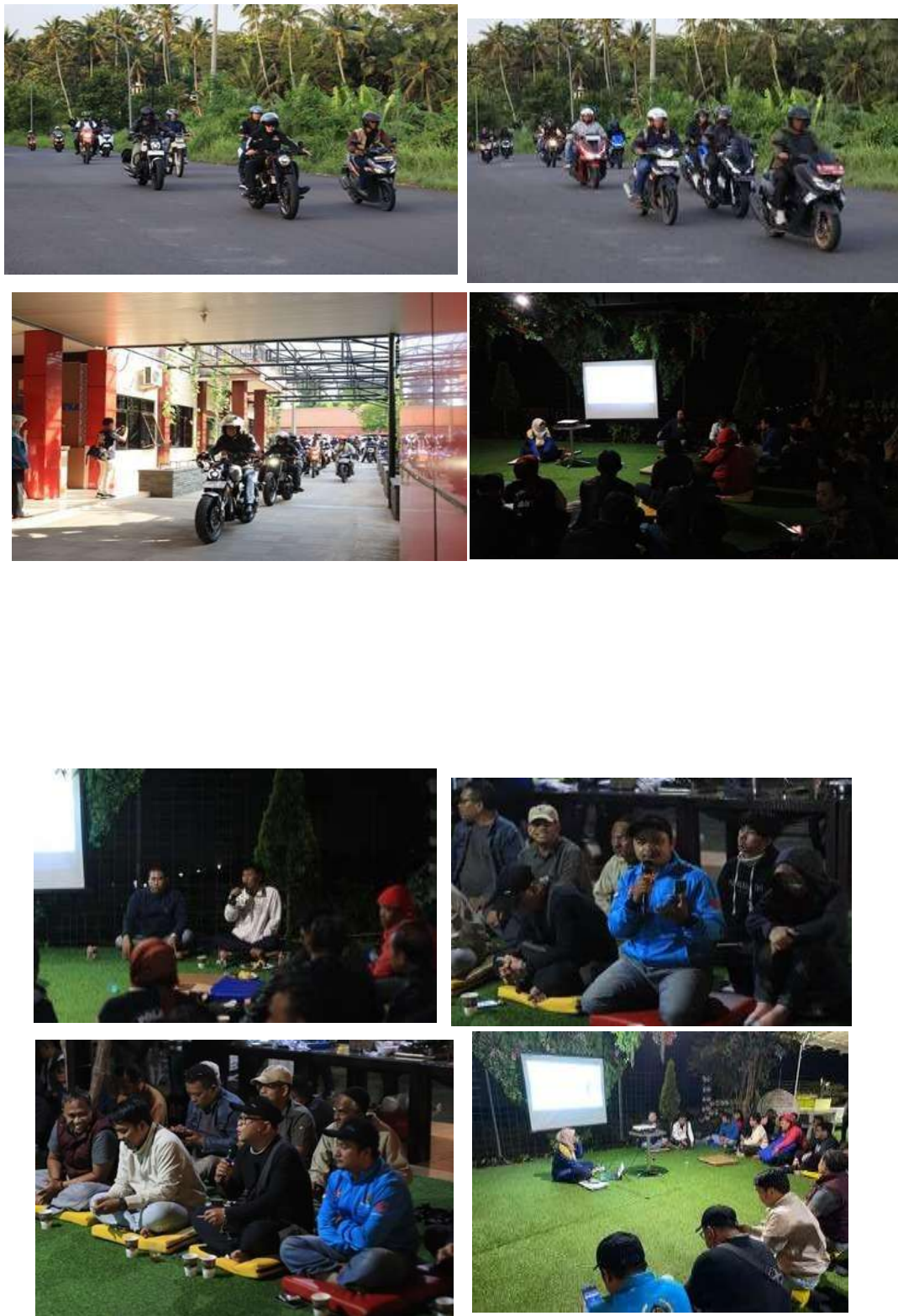
warga, sekaligus memperkuat identitas dan kebanggaan terhadap Kota Cirebon. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari insan pers dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait peringatan Hari Jadi Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam mendukung keterbukaan informasi publik.





Gambar 3. 38 Kegiatan Press Conference dan Launching Aplikasi SIMERCI

Kegiatan *press conference* lainnya juga telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025 dalam rangka Sinergitas Media dan Jurnalis dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Perangkat Daerah Kota Cirebon yang dikemas dalam bentuk *media event*. Kegiatan ini bertujuan selain untuk mempererat hubungan silaturahmi atau relasi yang baik antara media dan jurnalis dengan PPID, yang merupakan ujung tombak pelayanan informasi, juga untuk meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik yang lebih optimal.



Gambar 3. 39 Kegiatan Press Conference 28 November 2025

c) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Layanan Sistem Informasi Media

dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI)

Pengelolaan diseminasi informasi sangat penting untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah yang bertujuan membangun citra positif, meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi publik. daerah yang terarah dan teratur. Sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang terencana agar kebijakan dapat disampaikan secara efektif, karenanya dibutuhkan sistem yang jelas agar diseminasi informasi menjadi lebih optimal. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon membangun Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI).

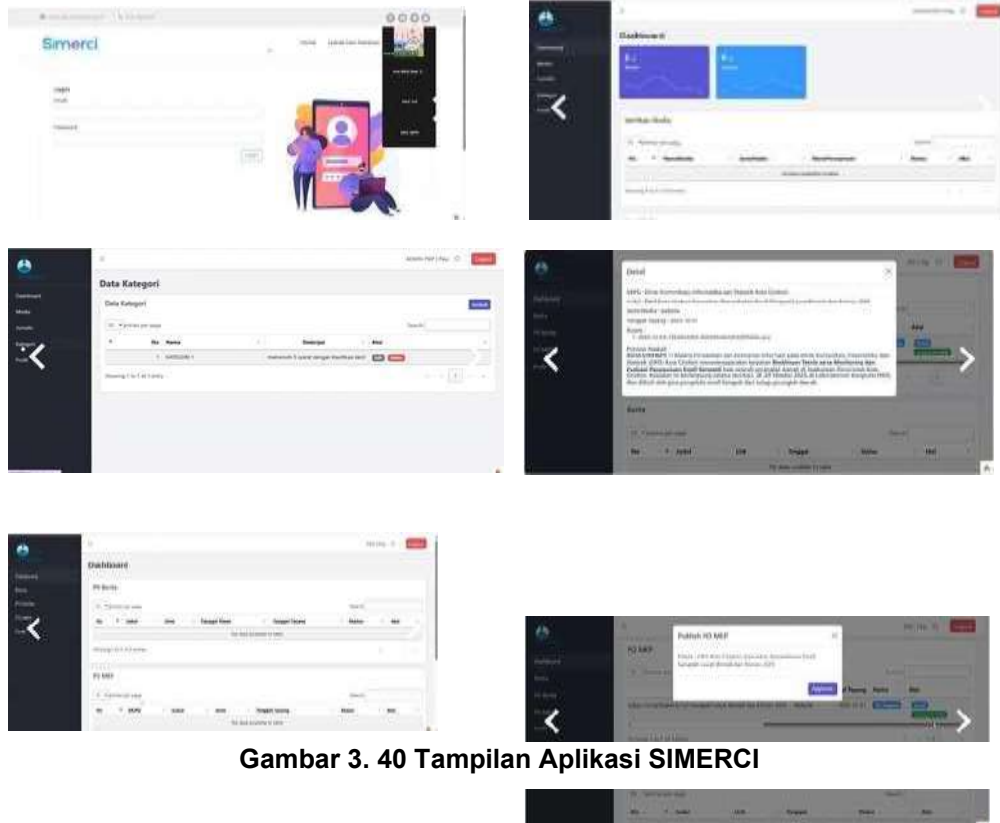
Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI) adalah aplikasi digital berbasis web yang dikembangkan untuk mengelola data media dan jurnalis secara terintegrasi.

Aplikasi ini menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Kota Cirebon dalam mengatur , memantau dan memverifikasi media serta jurnalis yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon. Tujuan utamanya adalah menyediakan basis data media dan jurnalis yang akuntabel dan terverifikasi.

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI) telah dilaksanakan baik untuk bidang PIKP, media dan jurnalis juga sekretaris beserta Tim Pengelola Diseminasi Informasi Perangkat Daerah se-Kota Cirebon.

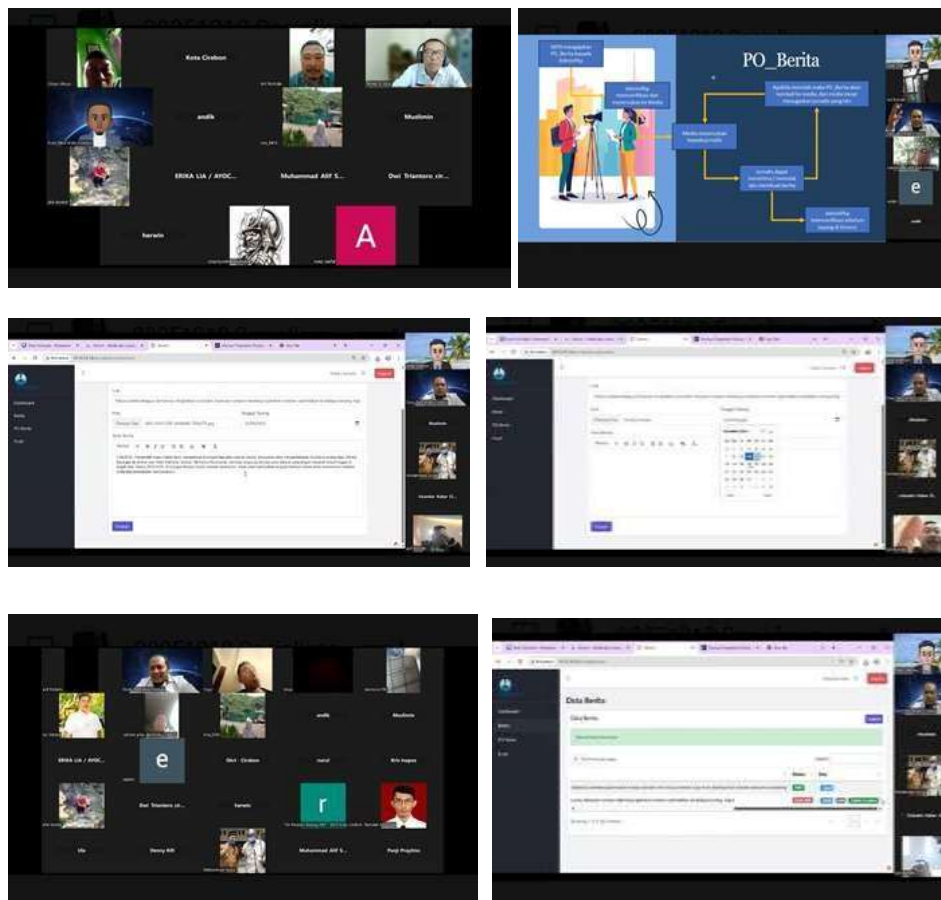
Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI) pada bidang PIKP telah dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Desember 2025, yang menyajikan materi tentang

pengertian, fitur yang dapat dikelola oleh admin pikp dan admin pip serta alur dari SIMERCI.



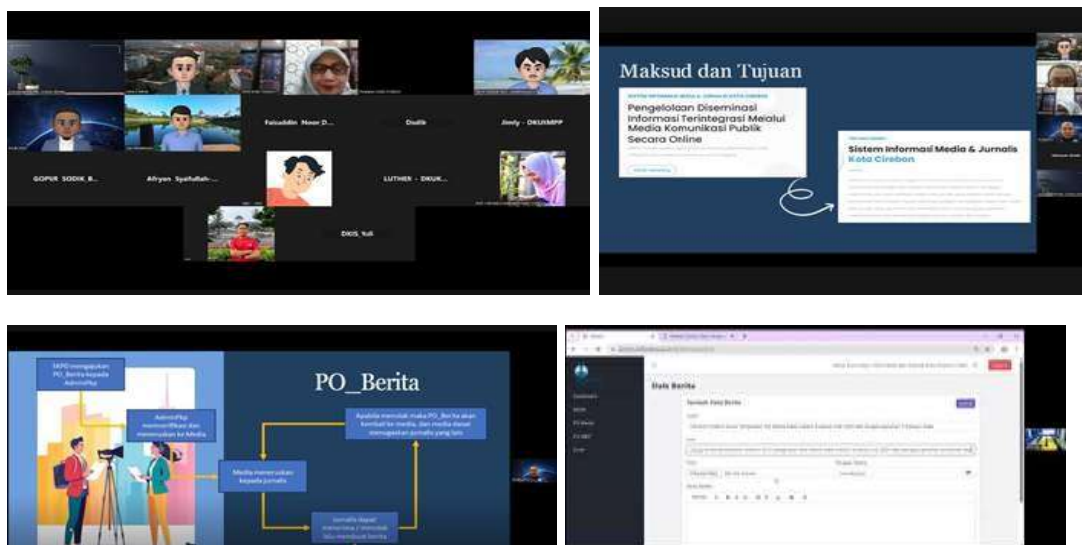
Gambar 3. 40 Tampilan Aplikasi SIMERCI

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI) pada media dan jurnalis telah dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2025 secara daring melalui *zoom meeting*., yang menyajikan materi tentang pengertian, syarat dan panduan, fitur yang dapat dikelola oleh media dan jurnalis, alur mula dari registrasi sampai dengan berita PO pada SIMERCI.



Gambar 3. 41 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMERCI melalui Zoom

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI) bagi para Sekretaris dan Tim Pengelola Diseminasi Informasi Perangkat Daerah se-Kota Cirebon, telah dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025 secara daring melalui *zoom meeting*, yang menyajikan materi tentang pengertian, fitur yang dapat dikelola oleh Sekretaris dan Tim Pengelola Diseminasi Informasi Perangkat Daerah, alur mula dari login sampai dengan berita PMKP dan berita PO pada SIMERCI.



Gambar 3. 42 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIMERCI melalui Zoom (2)

Kegiatan lainnya adalah layanan aplikasi Sistem Informasi Media dan Jurnalis Cirebon (SIMERCI) yang meliputi registrasi dan uploding data media dan jurnalis yang dilakukan secara langsung atau tatap muka telah dilaksanakan mulai tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan awal Januari tahun 2026.

d) Pendataan Media dan Jurnalis pada Aplikasi SIMERCI

Layanan pendataan Media dan Jurnalis pada Aplikasi SIMERCI yang dilaksanakan pada tanggal 15–31 Desember 2025 sebagai upaya untuk memperbarui dan memvalidasi data media serta jurnalis yang bermitra dan berperan aktif dalam penyebaran informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan basis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung kelancaran koordinasi, peningkatan kualitas publikasi, serta optimalisasi pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang transparan dan efisien.



Gambar 3. 43 Pendataan Media dan Jurnalis Melalui SIMERCI

e) Forum Silaturahmi Pimpinan Redaksi

Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan adalah Forum Silaturahmi Pimpinan Redaksi. Kegiatan ini merupakan wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun sinergi dengan insan media, guna memperkuat diseminasi informasi publik, mendukung transparansi kebijakan, serta mendorong pemberitaan yang konstruktif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

1. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

a. Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat Kota Cirebon

Sebagai bagian dari pelaksanaan sub kegiatan kemitraan komunikasi dengan KIM, Dinas telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti kegiatan Sarasehan Ketua FK-KIM Season 1 secara daring dan luring yang menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat, Kegiatan Sarasehan Season 2 dan Rapat Koordinasi Ketua FK-KIM, serta dirangkai dengan kegiatan Silaturahmi anggota KIM se-Kota Cirebon.



Gambar 3. 44 kegiatan Sarasehan Ketua FK-KIM Season 1

Pada tahun ini, agenda silaturahmi anggota KIM Kota Cirebon adalah melaksanakan sosialisasi perubahan regulasi KIM yang semula adalah Kelompok Informasi Masyarakat menjadi KIM dengan kepanjangan Komunitas Informasi Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, hal ini bertujuan untuk memperkuat peran KIM sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi publik dan peningkatan literasi digital di tingkat lokal.



Gambar 3. 45 Kegiatan Sarasehan Season 2 dan Rapat Koordinasi Ketua FK-KIM

Sosialisasi perubahan tersebut diteruskan kepada anggota KIM melalui pelaksanaan kegiatan Sarasehan Anggota KIM se- Kota Cirebon, sekaligus mengukuhkan perubahan Istilah 'kelompok' menjadi 'komunitas' sesuai regulasi yang bertujuan agar lebih inklusif dan melibatkan unsur masyarakat yang lebih luas, seperti pelaku usaha dan komunitas UMKM. Perubahan ini juga mendukung pergeseran pola komunikasi dari *communication to the people* menjadi *communication with the people*, serta mendorong adaptasi ke pola komunikasi digital agar penyebaran informasi berlangsung lebih cepat, efektif, dan efisien.



Gambar 3. 46 Kegiatan Silaturahmi anggota KIM se-Kota Cirebon

b) Kolaborasi bersama Pegiat Sosial Media

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah menyelenggarakan kegiatan Silaturahmi Pegiat Media Sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan pegiat media sosial, sekaligus mendorong kolaborasi dalam penyebaran informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan ini, turut ditekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan komunitas digital, dibahas pula peluang kerja sama jasa media melalui e-Katalog

LKPP, serta peran strategis pegiat media sosial dalam menangkal hoaks melalui edukasi dan literasi digital.



Gambar 3. 47 Kegiatan Silaturahmi Bersama Pegiat Sosial Media

c). Navigasi Era Digital: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelegent” (Arya Institute)

Pembinaan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat juga dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, yang pada tahun 2025 triwulan 4 in, telah diselenggarakan kegiatan Seminar Navigasi Era Digital dengan Tema: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelegent”, bekerja sama dengan Arya Institute.

Kegiatan ini dilaksanakan secara roadshow selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 17 s.d 19 November 2025, di tiga kampus di wilayah Kota Cirebon yaitu Kampus UINSSC, Kampus UCIC dan Kampus STMIK IKMI.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemitraaan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat melalui literasi digital, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan masyarakat khususnya para generasi muda dalam pemanfaatan AI, memberikan wawasan menyeluruh terkait konsep dasar AI, dampak positif maupun negatifnya, hingga peran teknologi dalam membentuk arus informasi di media sosial. Mahasiswa didorong untuk memahami cara kerja AI, serta mengembangkan kemampuan kritis dan etis dalam menyikapi perkembangan teknologi tersebut.

Hari Pertama – UINSSC Cirebon

Pelaksanaan hari pertama berlangsung di UINSSC Cirebon. Sesi materi dibuka oleh H. Saeful Badar, M.A., yang menjelaskan dasar-dasar pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kehidupan dan produktivitas sehari-hari. Materi kedua disampaikan oleh Abdu Zikrillah, M.Ds., yang memaparkan cara mengoptimalkan fitur-fitur AI untuk mendukung riset dan pekerjaan kampus.

Kegiatan hari pertama dihadiri oleh Fitria Pamungkaswati, Direktur Arya Institute, yang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas digital mahasiswa.



Gambar 3. 48 Kegiatan Seminar Navigasi Era Digital dengan Tema: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelegent” Hari pertama di Kampus UINSSC

Hari Kedua – Universitas Catur Insan Cendekia (CIC)

Pada 18 November 2025, kegiatan dilanjutkan di Universitas CIC Cirebon. Acara dibuka oleh Rektor CIC, Assoc. Prof. Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M., M.T.I., didampingi oleh Dekan Marsani Asfi, S.Si., M.Si., serta Sekretaris Rektorat Sudadi Pranata, S.E., M.Si. Pimpinan kampus menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap peran teknologi dalam komunikasi publik, serta penggunaan AI yang bijak dan bertanggung jawab.

Rudi Fahrudin, S.Kom., M.Kom., sebagai narasumber, memaparkan pemanfaatan AI untuk memprediksi tren, menyusun strategi konten, hingga mengevaluasi interaksi digital. Pemaparannya dilengkapi oleh materi dari Hartanto, S.E., M.M., yang menjelaskan mekanisme algoritma media sosial serta pengaruhnya terhadap perilaku pengguna.

Melalui sesi ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai peluang penggunaan AI untuk memperluas jangkauan informasi, sekaligus risiko yang perlu diwaspadai seperti *filter bubble* dan manipulasi konten digital.



Gambar 3. 49 Kegiatan Seminar Navigasi Era Digital dengan Tema: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelegent” Hari kedua di Kampus UCIC

Hari Ketiga – STMIK IKMI Kota Cirebon

Kegiatan ditutup pada 19 November 2025 di STMIK IKMI Kota Cirebon. Associate Professor Dr. Dadang Sudrajat, S.Si., M.Kom., membuka sesi dengan memberikan pengantar mengenai perkembangan teknologi digital di dunia akademik dan industri.

Materi utama disampaikan oleh Denni Pratama, M.Kom., dan Khaerul Anam, M.Kom., yang menjabarkan berbagai implementasi AI dalam bidang teknologi informasi, termasuk bagaimana algoritma mendukung proses deteksi data, otomatisasi, serta peningkatan kualitas layanan digital.

Dalam sambutan yang merupakan penutupan acara, Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa, A.P., M.M., menegaskan bahwa manusia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, dengan beradaptasi, meningkatkan keterampilan, dan melakukan *upskilling* agar tidak tertinggal, dan mengingatkan bahwa teknologi merupakan alat bantu yang menguatkan kreativitas dan produktivitas manusia.





Gambar 3. 50 Kegiatan Seminar Navigasi Era Digital dengan Tema: “Strategi Sosialisasi Informasi di Media Sosial Era Artificial Intelligent” Hari ketiga di Kampus STMIK IKMI

2. Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kegiatan ini merupakan pekerjaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Perangkat Daerah, dengan cara memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik dan mengevaluasi pelaksanaan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik. Kegiatan ini juga bertujuan agar dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat dan badan publik terkait hak-hak dasar dalam mengakses maupun menyajikan informasi publik, terlaksananya advokasi dan pendampingan untuk mewujudkan

keterbukaan informasi publik, terlaksananya penanganan permohonan sengketa informasi publik secara profesional proporsional dengan mengedepankan asas cepat, tepat waktu, biaya ringan sederhana dan terwujudnya kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mengakselerasi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon.

Pada tahun 2025 ini dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan peran Komisi Informasi dilakukan penganggaran secara hibah dengan menggunakan dana APBD yang dilakukan penyerapan anggaran sebanyak 2 termin, yaitu pada bulan Maret dan Agustus 2025.

Dengan adanya dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola yang kuat, diharapkan Komisi Informasi Daerah dapat menjalankan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjadi pilar utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Di Triwulan empat ini kegiatan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Daerah berupa Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Masa Jabatan 2025-2029 dan Bimtek untuk para Komisioner Komisi Informasi Masa Jabatan 2025-2029.



Gambar 3. 51 Kegiatan Pelantikan Komisioner Komisi Informasi

3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesepahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif, meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD agar menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik telah dilaksanakan dengan pekerjaan Layanan Cirebon Siaga 112, Layanan Permohonan Informasi, Layanan Pengaduan dan Aspirasi Rakyat.

BIMTEK SP4N-LAPOR

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada :

Tempat : Kantor Dkis Sudarsono

Tanggal : Rabu, 13 November 025

Hasil :

- **Pemetaan Isu Strategisi:** Belum ada SK Layanan Pengelolaan SP4N LAPOR; Akses akun bermasalah; Pemahaman fitur dashboard belum merata pejabat/perangkat daerah belum memahami pengelolaan LAPOR; Respon awal & tindak lanjut belum konsisten dan belum sesuai aturan dan Belum ada SOP/alur koordinasi yang jelas; pelaporan pengelolaan belum optimal.
- **Analisis Opini Publik:** Aduan di SP4N LAPOR tidak ditanggapi/berulang karena SOP tidak jelas dan admin berubah; Konten “before–after” yang kontras (jalan rusak, parkir liar, banjir/drainase) menyebar cepat; Isu retribusi/pajak naik tanpa penjelasan manfaat dan skema perlindungan kelompok rentan.
- **Rekomendasi Kebijakan:** Tetapkan SK Layanan SP4N LAPOR (atau minimal Surat Tugas); Normalisasi akun & akses: inventaris akun, reset terpusat, SOP pergantian admin (handover). Standarisasi respon awal: template jawaban awal + batas waktu respon (SLA) yang sama untuk semua PD; Buat alur koordinasi 1 halaman (flow sederhana):

masuk → verifikasi → disposisi → tindak lanjut → bukti → tutup → pelaporan.

- **Deteksi Dini Potensi Krisis:** Indikator peringatan dini (monitor mingguan), Skenario krisis yang paling mungkin, Protokol respon cepat (template)
- **Evaluasi Dampak Kebijakan:** Menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh publik
- **Perumusan Strategi Komunikasi Publik:** Menentukan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan atau kebijakan agar mendapat penerimaan luas.

Dokumentasi Kegiatan





Gambar 3. 52 Bimbingan Teknis SP4N-LAPOR!

MONEV PPID

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada :

Tempat : Kantor Perangkat Daerah

Tanggal : Jumat, 21 November 2025

Hasil :

- **Pemetaan Isu Strategis:** Fasilitas sarana dan prasarana dalam mengelola layanan informasi publik belum maksimal
- **Analisis Opini Publik:** Alur permohonan yang lama, jadwal pelayanan yang tidak diketahui secara jelas dan kenyamanan dalam mendapatkan informasi publik.
- **Rekomendasi Kebijakan:** Tetapkan SK Layanan dan Pembuatan SOP yang berkaitan dengan layanan informasi publik
- **Deteksi Dini Potensi Krisis:** Indikator peringatan dini (monitor mingguan), Skenario krisis yang paling mungkin, Protokol respon cepat (template)
- **Evaluasi Dampak Kebijakan:** Menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh publik
- **Perumusan Strategi Komunikasi Publik:** Menentukan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan atau kebijakan agar mendapat penerimaan luas.



Gambar 3. 53 Monev PPID

EVALUASI PPID

Kegiatan tersebut diselenggarakan pada :

Tempat : Ruang Prabayaksa Lt. 3 Sekretariat Daerah

Tanggal : Selasa, 18 November 2025

Hasil :

- Pemetaan Isu Strategisi: Pembaharuan DIP dan DIK untuk tahun 2026, Keterbukaan Klasifikasi Informasi, SOP dan SK Layanan PPID
- Analisis Opini Publik: Alur permohonan yang lama, jadwal pelayanan yang tidak diketahui secara jelas dan kenyamanan dalam mendapatkan informasi publik.

- Rekomendasi Kebijakan: Tetapkan SK Layanan dan Pembuatan SOP yang berkaitan dengan layanan informasi publik dan Komitmen Bersama semua pihak terutama pada Kepala Daerah
- Deteksi Dini Potensi Krisis: Indikator peringatan dini (monitor mingguan), Skenario krisis yang paling mungkin, Protokol respon cepat (template)
- Evaluasi Dampak Kebijakan: Menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh publik
- Perumusan Strategi Komunikasi Publik: Menentukan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan atau kebijakan agar mendapat penerimaan luas.





Gambar 3. 54 Evaluasi PPID



Gambar 3. 55 Layanan Cirebon Siaga 112

4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk menyampaikan, menjelaskan, dan memperluas pemahaman masyarakat atau pihak terkait mengenai sosialisasi kebijakan umum dan teknis di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, media, dan masyarakat umum, memahami hak, kewajiban, serta batasan dalam menyampaikan dan mengakses informasi.

Pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik telah dilaksanakan melalui pekerjaan penyusunan kebijakan terkait Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Penetapan Dana Hibah, proses pelaksanaan dana hibah dengan sasaran kepada Perangkat Daerah sedang berjalan.



Gambar 3. 56 Rapat persiapan peraturan penggunaan dana hibah yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Januari 2025



Gambar 3. 57 Rapat lanjutan pengesahan peraturan penggunaan dana hibah yang dilaksanakan pada Selasa, 7 Januari 2025

5. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Kegiatan pemantauan isu publik di media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, pemantauan aduan masyarakat yang dikelompokkan dalam kegiatan monitoring opini dan aspirasi serta pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemda yang ditempatkan dalam monitoring informasi kebijakan pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai rangkaian kegiatan. Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik ini dilaksanakan setiap hari berbentuk pembuatan e-kliping dan aduan yang masuk dalam kanal SP4N LAPOR Kota Cirebon serta kegiatan ini pun bertujuan untuk memantau isu publik di media massa dan media sosial,

terpantaunya aduan masyarakat dan terlaksananya evaluasi dan pemilihan isu publik.



Gambar 3. 58 Pemantauan isu publik pada media cetak dan media online yang dilaksanakan setiap harinya

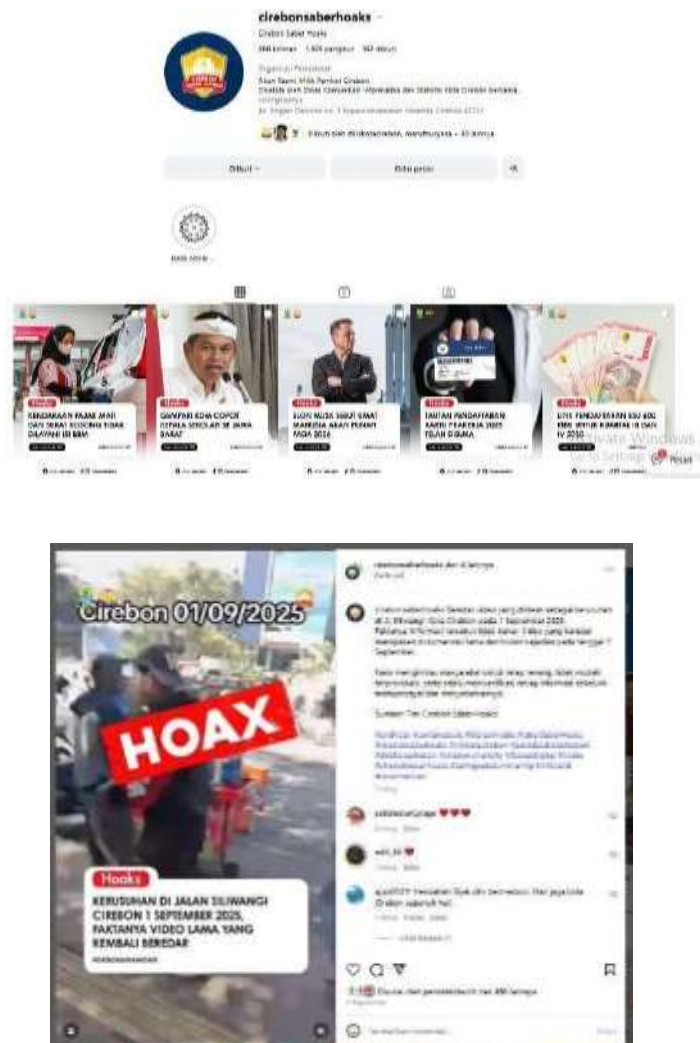
The image shows a web form for analyzing news from various media in Cirebon. The form includes fields for 'Instansi' (set to 'Pemerintah Kota Cirebon'), 'Periode Laporan Masuk' (01/05/2025 to 05/31/2025), and 'Masing Laporan Form Manual'. A 'SUBMIT' button is visible. Below the form, there is a 'Rekapitulasi Kinerja' table.

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Preses	Selesai	Tunda	Ansip	Total (Tanpa Ansip dan Tunda)	NTL	RTL	RHP	RV
0	0	15	16	0	14	31	100	1.5	5.00	0

The image shows a grid of report categories. The categories are organized into columns and rows, with some categories expanded to show sub-categories.

[+] Teknologi Informasi dan Komunikasi Informasi Terkait Aplikasi Pemerintah	[+] Pekerjaan Umum dan Perairan Dinasirasi Gering-Gering-Pul	[+] Politik dan Mak Asasi Man	[+] Infrastruktur Jalan Jalan Berulang	[+] Tidak ada pemert Kecamatan Gender dan Perkembangan
Informasi Terkait Aplikasi Pemerintah 3				SPN-LANDK
Layanan Online/Aplikasi Pem	Lainnya terkait	[+] Ketersediaan, Keterlambatan Ketersediaan dan Lainnya terkait	[+] Ketersediaan Lainnya terkait	[+] Ekonomi dan K Anggaran dan Per
			[+] Administrasi Kependudukan dan Pencatatan KTP (Kartu Tanda Penduduk)	[+] Pariwisata Destinasi Pariwisata

Gambar 3. 59 Pemantauan aduan di Kanal SP4N LAPOR Kota Cirebon yang dilaksanakan setiap harinya



**Gambar 3. 60 Dokumentasi Informasi
hoax/bohong yang beredar di Masyarakat**

6. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi

a. Publikasi Percepatan Penurunan Stunting

Publikasi konten mengenai percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon mencakup infografis dan artikel edukatif melalui berbagai kanal komunikasi publik milik Pemerintah Kota Cirebon yaitu website dan media sosial resmi, serta melalui media online lokal.

Tujuan utama dari publikasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting sejak dini,

memperluas jangkauan informasi program pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama menurunkan angka stunting.

Kegiatan publikasi konten percepatan penurunan stunting sebanyak 2 konten berupa infografis setiap bulan selama Januari sampai Maret 2025 melalui website resmi cirebonkota.go.id dan media sosial Instagram @pemdakotacrb, serta 1 konten infografis melalui 24 media online lokal Kota Cirebon. Selain itu, konten berupa artikel telah terbit melalui website resmi cirebonkota.go.id.

- 1) Website resmi Pemerintah Kota Cirebon (cirebonkota.go.id)



Gambar 3. 61 Publikasi Konten Penurunan Stunting
Website Kota Cirebon Januari – Maret 2025

2) Media sosial Instagram Pemerintah Kota
Cirebon
(@pemdakotacrb)

Cirebon



**Gambar 3. 62 Publikasi Konten Penurunan Stunting Instagram
Pemerintah Kota Cirebon Januari – Maret 2025**

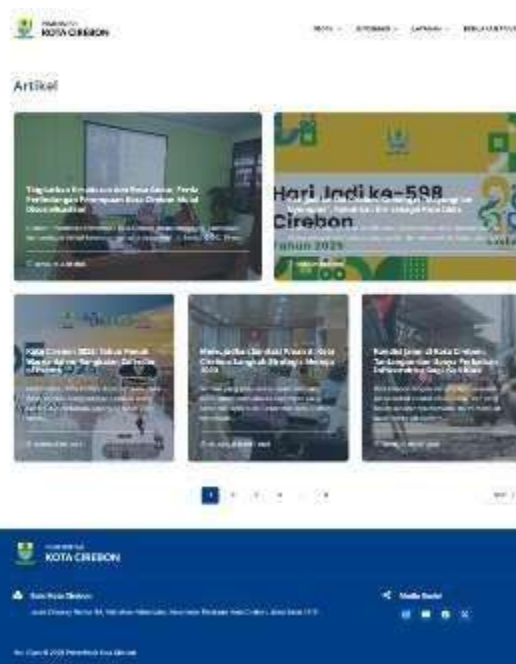
3) Media online lokal:



Gambar 3. 63 Publikasi Konten Penurunan Stunting Media Online Lokal Januari – Maret 2025

Kegiatan publikasi konten percepatan penurunan stunting sebanyak 6 konten berupa infografis setiap bulan selama April sampai Juni 2025 melalui website resmi cirebonkota.go.id dan media sosial Instagram @pemdakotacrb. Selain itu, konten berupa artikel telah terbit melalui website resmi cirebonkota.go.id.

- 4) Website resmi Pemerintah Kota Cirebon (cirebonkota.go.id)



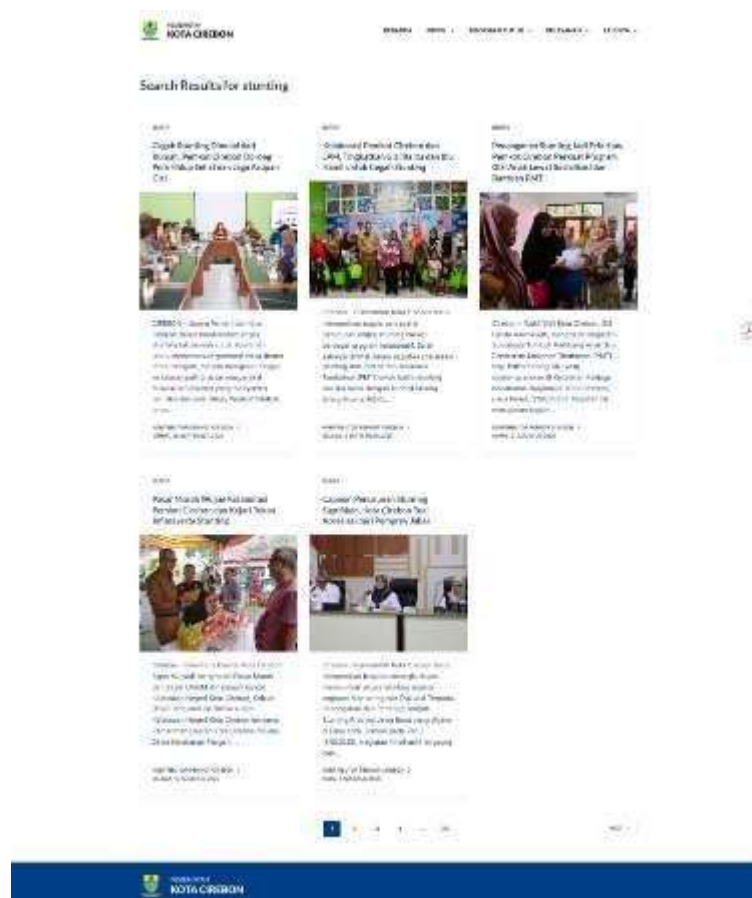
**Gambar 3. 64 Publikasi Konten Penurunan Stunting Website
Kota Cirebon April – Juni 2025**

5) Media sosial Instagram Pemerintah Kota Cirebon (@pemdakotacrb)



**Gambar 3. 65 Publikasi Konten Penurunan Stunting Instagram
Pemerintah Kota Cirebon April – Juni 2025**

Kegiatan publikasi konten percepatan penurunan stunting sebanyak 6 konten berupa infografis setiap bulan selama Juli sampai September 2025 melalui website resmi cirebonkota.go.id dan media sosial Instagram @pemdakotacrb. Selain itu, konten berupa artikel telah terbit melalui website resmi cirebonkota.go.id.



**Gambar 3. 66 Publikasi Konten Penurunan Stunting
Website Kota Cirebon Juli – September 2025**

- 6) Website resmi Pemerintah Kota Cirebon (cirebonkota.go.id)
- 7) Media sosial Instagram Pemerintah Kota Cirebon (@pemdakotacrb)



**Gambar 3. 67 Publikasi Konten Penurunan Stunting Instagram
Kota Cirebon Juli – September 2025**

- **Pembuatan Video Percepatan Penurunan Stunting**

Pembuatan video percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui video ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran bersama—baik pemerintah, tenaga kesehatan, maupun keluarga—dalam memastikan tumbuh kembang anak yang optimal, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gizi, kesehatan, dan pola asuh yang baik demi menciptakan generasi Kota Cirebon yang sehat dan berkualitas. Pembuatan video mengenai percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon telah dilaksanakan pada triwulan III.



Gambar 3. 68 Pembuatan Video Percepatan Penurunan Stunting

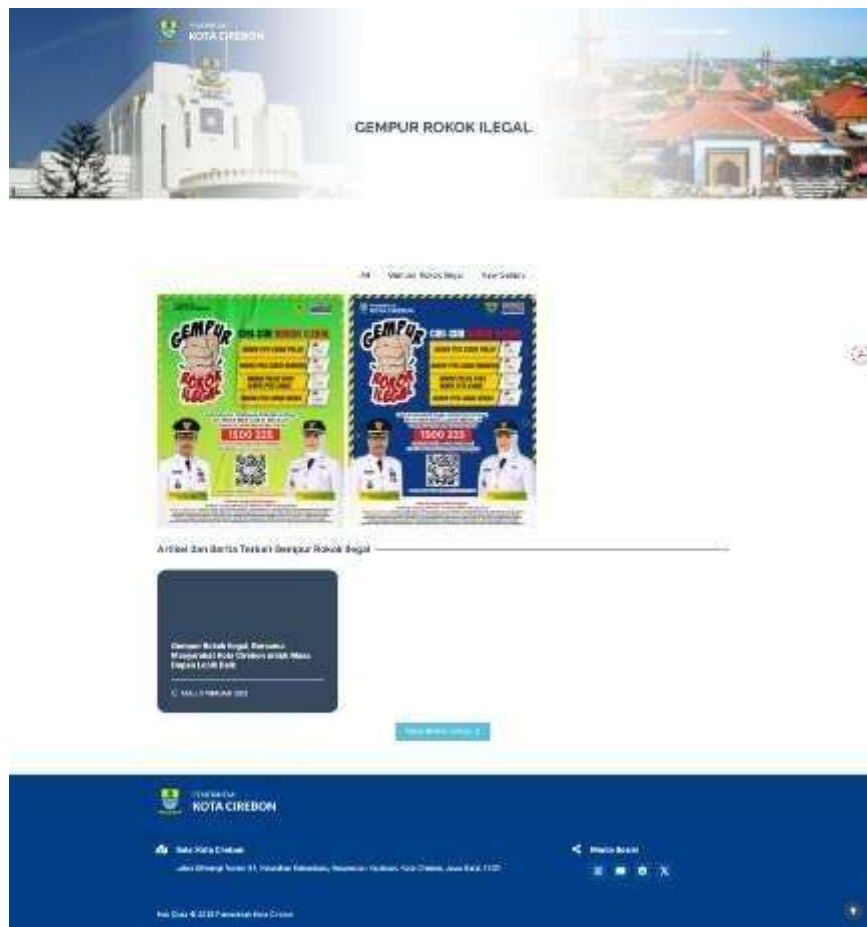
- Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Publikasi konten sosialisasi Gempur Rokok Ilegal oleh Pemerintah Kota Cirebon dilaksanakan melalui kanal komunikasi publik milik Pemerintah Kota Cirebon yaitu website dan media sosial resmi, serta melalui media online lokal. Konten yang dipublikasikan berfokus pada edukasi mengenai bahaya rokok ilegal, ciri-ciri fisiknya, serta dampaknya terhadap kesehatan, perekonomian negara, dan penerimaan daerah. Publikasi dilakukan dalam bentuk infografis digital dengan pendekatan visual yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Pada Triwulan I dan II, telah dilaksanakan publikasi konten sosialisasi Gempur Rokok Ilegal sebanyak 2 konten infografis melalui website resmi cirebonkota.go.id dan melalui iklan media online lokal Kota Cirebon sebanyak 79 kali tayang. Sementara pada Triwulan IV,

telah dilaksanakan publikasi konten Gempur Rokok Ilegal melalui media cetak sebanyak 16 tayang, 35 kali tayang pada media online lokal, 10 kali tayang pada 3 radio lokal, dan 1 kali talkshow pada televisi lokal. Selain itu, konten berupa artikel telah terbit melalui website resmi cirebonkota.go.id. Berikut publikasi yang telah dilaksanakan:

1) Website resmi Pemerintah Kota Cirebon (cirebonkota.go.id)



Gambar 3. 69 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Website Kota Cirebon

2) Media online lokal:



Gambar 3. 70 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok
Illegal Media Online Lokal Kota Cirebon

3) Media cetak lokal:



Gambar 3. 71 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Media Cetak Lokal Kota Cirebon



4) Talkshow pada TV lokal:



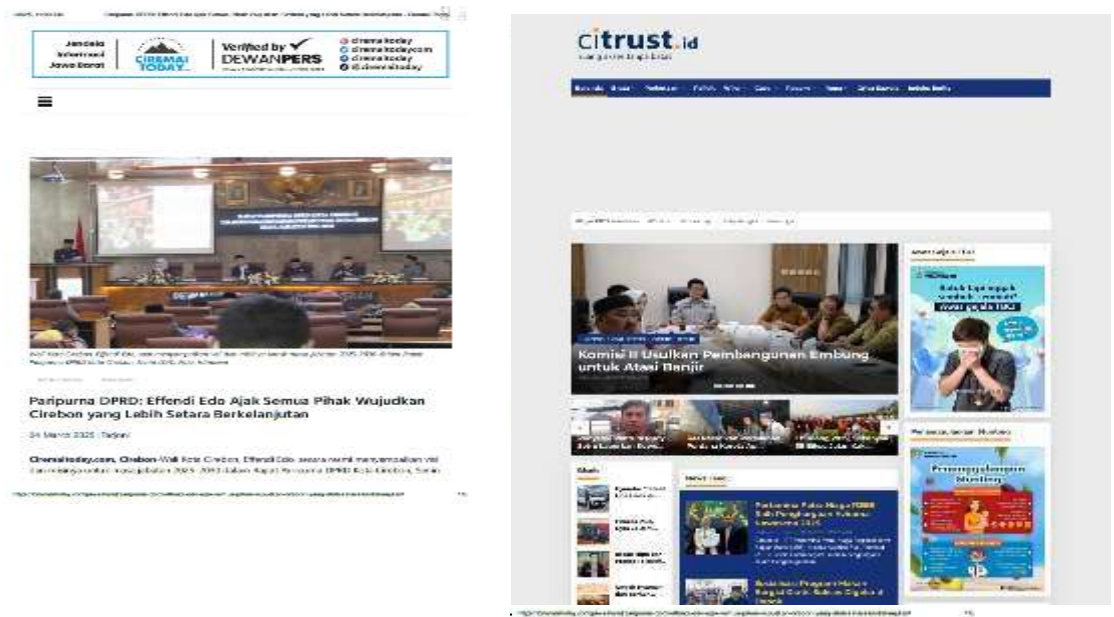
Gambar 3. 72 Publikasi Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Talkshow TV Lokal

7. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

a. Publikasi Media Online

Diseminasi pesan melalui media online dilaksanakan dengan menjalin kerja sama bersama lebih dari 70 media online lokal. Publikasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi mengenai program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada masyarakat. Materi yang dipublikasikan meliputi berita dan infografis yang menginformasikan capaian, agenda, dan program prioritas pemerintah daerah.

Pada Triwulan I, publikasi media online telah dilaksanakan melalui beberapa portal berita online yang ditunjuk. Berikut ini salah satu publikasi yang telah ditayangkan melalui media online pada Triwulan I:



Gambar 3. 73 Publikasi Portal Berita Online Capaian, Agenda, Program Prioritas Pemerintah Daerah Triwulan I

Pada Triwulan II, publikasi media online telah dilaksanakan melalui beberapa portal berita online yang ditunjuk. Berikut ini daftar beberapa publikasi yang telah ditayangkan melalui media online pada Triwulan II:





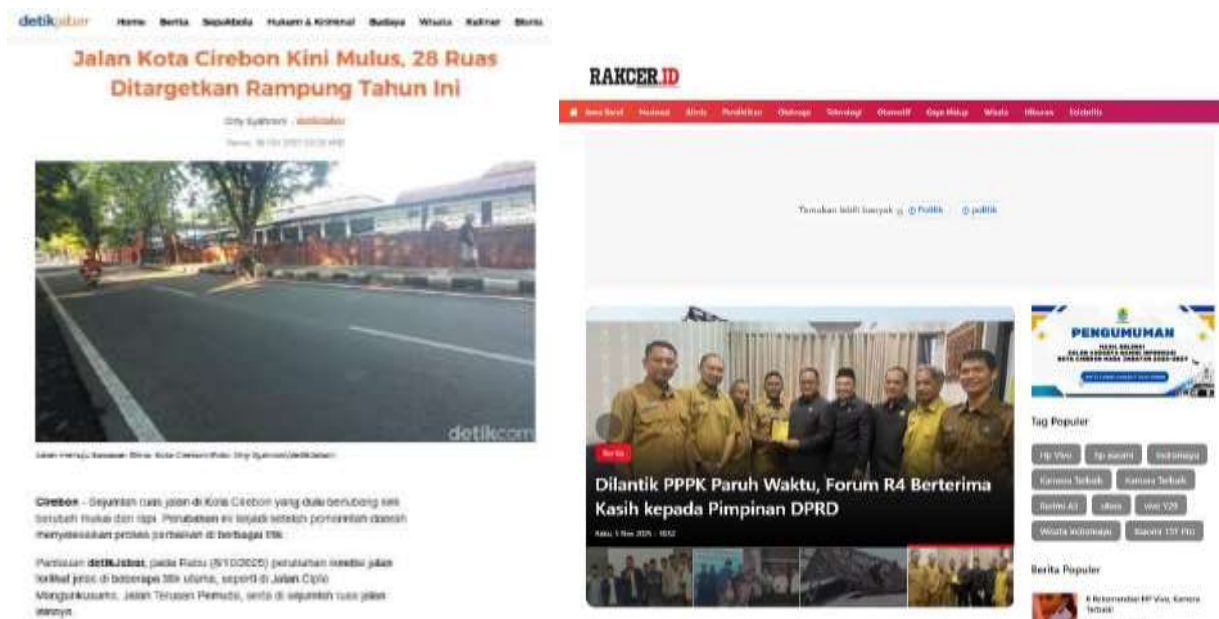
Gambar 3. 74 Publikasi Media Online Lokal Capaian, Agenda, Program Prioritas Pemerintah Daerah Triwulan II

Pada Triwulan III, publikasi media online telah dilaksanakan melalui beberapa portal berita online yang ditunjuk. Berikut ini salah satu publikasi yang telah ditayangkan melalui media online pada Triwulan III:



**Gambar 3. 75 Publikasi Media Online Lokal Capaian, Agenda, Program Prioritas
Pemerintah Daerah Triwulan III**

Pada Triwulan IV publikasi media online telah dilaksanakan melalui beberapa portal berita online lokal dan 3 media online regional. Berikut ini salah satu publikasi yang telah ditayangkan melalui media online pada Triwulan IV:



Gambar 3. 76 Publikasi Media Online Lokal Capaian, Agenda, Program Prioritas Pemerintah Daerah Triwulan IV

b. Publikasi Media Cetak

Diseminasi pesan melalui media cetak dilaksanakan dengan bekerja sama dengan enam media cetak lokal. Publikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita, infografis, atau advertorial mengenai program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pada Triwulan I, publikasi media cetak telah dilaksanakan melalui Rakyat Cirebon sebanyak satu kali tayang dan Kabar Cirebon sebanyak dua kali tayang. Materi yang dipublikasikan mencakup informasi terkait pelaksanaan program-program prioritas daerah.

Berikut beberapa materi yang telah dipublikasikan melalui media cetak.



Gambar 3. 77 Contoh Publikasi Media Cetak Lokal Triwulan I

Pada Triwulan II, kegiatan ini belum dapat terealisasi karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) DKIS Kota Cirebon mengalami proses perubahan diakibatkan pergantian Plt. Kepala Bidang PIKP karena belum adanya pejabat definitif.

Pada Triwulan III, publikasi media cetak telah dilaksanakan melalui Rakyat Cirebon sebanyak 11 (sebelas) kali tayang, Kabar Cirebon sebanyak 2 (dua) kali tayang, Fajar Cirebon sebanyak 3 (tiga)

kali tayang, Suara Cirebon sebanyak 11 (sebelas) kali tayang, dan Harian Pelita sebanyak 11 (sebelas) kali tayang. Materi yang dipublikasikan mencakup informasi terkait pelaksanaan program-program prioritas daerah. Berikut salah satu materi yang telah dipublikasikan melalui media cetak.



Gambar 3. 78 Contoh Publikasi Media Cetak Lokal
Triwulan III

Pada Triwulan IV, publikasi media cetak telah dilaksanakan melalui Radar Cirebon sebanyak 15 kali tayang, Rakyat Cirebon sebanyak 19 kali tayang, Kabar Cirebon sebanyak 7 kali tayang, Fajar Cirebon sebanyak 9 kali tayang, Suara Cirebon sebanyak 2 kali tayang, dan Harian Pelita sebanyak 2 kali tayang. Materi yang dipublikasikan mencakup informasi terkait pelaksanaan program-program prioritas

daerah. Berikut salah satu materi yang telah dipublikasikan melalui media cetak.



Gambar 3. 79 Contoh Publikasi Media Cetak Lokal Triwulan IV

c. Publikasi Media Radio

Publikasi melalui media radio lokal telah dilaksanakan pada triwulan I melalui Ringkas Radionet sebanyak 5 (lima) tayang spot iklan radio. Publikasi berupa spot Ucapan Selamat Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, Sertijab Wali Kota Cirebon; Visi Misi Wali Kota Cirebon di Rapat Paripurna DPRD; Time Signal Buka Puasa, dan Time Signal Imsak.

Pada Triwulan II, kegiatan belum dapat terealisasi karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) DKIS Kota Cirebon mengalami proses

perubahan diakibatkan pergantian Plt. Kepala Bidang PIKP karena belum adanya pejabat definitif.

Pada Triwulan III, publikasi media radio telah dilaksanakan melalui RRI Cirebon sebanyak satu kali tayang. Materi yang dipublikasikan terkait Dialog Interaktif Roadshow Bus KPK - Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Selain ini, publikasi melalui Ringkas Radio dan Cirebon Radio dengan materi Progress Perbaikan Jalan Kota Cirebon dan Imbauan kepada masyarakat Kota Cirebon untuk bersabar dan selalu dukung Pembangunan Infrastruktur Kota Cirebon.

Pada Triwulan IV, publikasi media radio telah dilaksanakan melalui RRI Cirebon. Materi yang dipublikasikan terkait Penataan Kawasan Sukalila.

d. Publikasi Media Televisi

Diseminasi pesan melalui media televisi dilaksanakan dengan memanfaatkan televisi lokal sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Publikasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan RCTV, dengan menayangkan sebanyak 10 kali.

Materi yang dipublikasikan meliputi berita, advertorial, serta iklan layanan informasi mengenai program-program prioritas Pemerintah Kota Cirebon. Melalui publikasi ini, diharapkan pesan pembangunan dan program daerah dapat tersampaikan secara luas, meningkatkan pemahaman, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Pada Triwulan II, kegiatan belum dapat terealisasi karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) DKIS Kota Cirebon mengalami proses perubahan diakibatkan pergantian Plt. Kepala Bidang PIKP karena belum adanya pejabat definitif.

Pada Triwulan III, publikasi media televisi telah selesai dilaksanakan sebanyak 10 kali tayang. Materi yang dipublikasikan

meliputi berita, advertorial, serta iklan layanan informasi mengenai program-program prioritas Pemerintah Kota Cirebon.

e. Live Streaming

Penyiaran konten secara langsung/real time dilaksanakan melalui kerja sama dengan penyedia jasa live streaming. Konten yang akan disiarkan secara langsung pada Facebook, Instagram dan Youtube Pemda Kota Cirebon. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III.

Pada Triwulan II, seluruh kegiatan belum dapat terealisasi karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) DKIS Kota Cirebon mengalami proses perubahan diakibatkan pergantian Plt. Kepala Bidang PIKP karena belum adanya pejabat definitif.

Pada Triwulan III, *live streaming* telah dilaksanakan melalui RCTV sebanyak 3 (tiga) kali tayang. Materi yang disiarkan langsung mencakup Kegiatan Shalat Idul Fitri 1446 H, Kegiatan Peringatan Hari Jadi Cirebon, dan Kegiatan HUT ke-80 RI. Berikut beberapa materi yang telah disiarkan secara langsung:



Gambar 3. 80 Contoh Publikasi Live Streaming Triwulan III

f. Pembuatan Dokumentasi Video

Pembuatan video dokumentasi dilaksanakan untuk merekam berbagai kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai bahan publikasi dan arsip informasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk menyajikan rekaman kegiatan secara utuh dan akurat, yang nantinya dapat digunakan dalam diseminasi informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran media resmi.

Pada Triwulan II, seluruh kegiatan belum dapat terealisasi karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) DKIS Kota Cirebon mengalami proses perubahan diakibatkan pergantian Plt. Kepala Bidang PIKP karena belum adanya pejabat definitif. Selain itu, pembuatan video dokumentasi mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 0,- karena terdapat perubahan parsial untuk dialokasikan ke kegiatan lain.

8. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

a. Dialog Interaktif

Program kerja sama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Cirebon yaitu Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” disiarkan setiap bulan melalui kanal youtube Pemerintah Kota Cirebon, LPP RRI Cirebon, dan Pro1 RRI Cirebon 94,8 FM.

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan akses informasi yang luas, akurat dan terpercaya bagi masyarakat terkait pembangunan dan potensi daerah.

Pada Triwulan I, telah dilaksanakan program Dialog Interaktif sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan selama periode Januari sampai Maret 2025 melalui kanal youtube Pemerintah Kota Cirebon, LPP RRI Cirebon, dan Pro1 RRI Cirebon 94,8 FM. Pada episode 1, tema yang diangkat ialah “Cirebon Terkini”, episode ke-2 dengan tema “Siapa Siaga Bencana”, dan episode ke-3 dengan tema “Persiapan Pemerintah Kota Cirebon Sambut Lebaran 1446 H”.

Sementara pada Triwulan II, selama periode April sampai Juni, tema pada episode ke-4 ialah “Uji Publik RPJMD Kota Cirebon 2025-2029”, episode ke-5 ialah “PPDB 2025 dan Arah Baru Pendidikan Kota Cirebon”, dan episode ke-6 ialah “Cirebon Mayungi lan Nyumponi, Cirebon Idola!”.

Pada Triwulan III, selama periode Juli sampai September, tema pada episode ke-7 ialah “Tantangan Penataan Wilayah Perkotaan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, episode ke-8 ialah “Dari Pemuda untuk Indonesia: Kobarkan Semangat, Genggam Masa Depan Indonesia”, dan episode ke-9 ialah “Peran Warga & Inovasi Laporan Tingkatkan Perbaikan PJU Demi Keamanan Lalu Lintas Cirebon”.

Pada Triwulan IV, selama periode Oktober sampai Desember, tema pada episode ke-10 ialah “Spesial Sumpah Pemuda: Pemuda Bersatu, Indonesia Maju”, episode ke-11 ialah “Antisipasi Cuaca Ekstrem: Strategi Mitigasi dan Pemetaan Titik Rawan”, dan episode

Berikut program Dialog Interaktif yang telah tayang pada Triwulan I, II, III, dan IV:

-

2) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Siap Siaga Bencana #2



Gambar 3. 82 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Siap Siaga Bencana #2

- 3) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Persiapan Pemerintah Kota Cirebon Sambut Lebaran 1446 H #3



Gambar 3. 83 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Persiapan Pemerintah Kota Cirebon Sambut Lebaran 1446 H #3

- 4) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Uji Publik RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 #4



Gambar 3. 84 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Uji Publik RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 #4

- 5) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - PPDB 2025 dan Arah Baru Pendidikan Kota Cirebon #5

- 6) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Hari Jadi Cirebon ke-598 "Cirebon Manyungi lan Nyumponi,Cirebon Idola" #6



Gambar 3. 85 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Hari Jadi Cirebon ke-598 "Cirebon Manyungi lan Nyumponi,Cirebon Idola" #6

- 7) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Tantangan Penataan Wilayah Perkotaan yang Inklusif dan Berkelanjutan #7



**Gambar 3. 86 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” -
Tantangan Penataan Wilayah Perkotaan yang Inklusif dan
Berkelanjutan #7**

- 8) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Dari Pemuda untuk Indonesia:Kobarkan Semangat, Genggam Masa Depan Indonesia #8



**Gambar 3. 87 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” -
Dari Pemuda untuk Indonesia:Kobarkan Semangat, Genggam
Masa Depan Indonesia #8**

- 9) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Peran Warga &

Inovasi Laporan Tingkatkan Perbaikan PJU Demi Keamanan Lalu Lintas Cirebon #9



Gambar 3. 88 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - Peran Warga & Inovasi Laporan Tingkatkan Perbaikan PJU Demi Keamanan Lalu Lintas Cirebon #9

10) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Spesial SumpahPemuda: Pemuda Bersatu, Indonesia Maju”



Gambar 3. 89 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Spesial SumpahPemuda: Pemuda Bersatu, Indonesia Maju”

- 11) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Antisipasi Cuaca Ekstrem: Strategi Mitigasi dan Pemetaan Titik Rawan



Gambar 3. 90 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Antisipasi Cuaca Ekstrem: Strategi Mitigasi dan Pemetaan Titik Rawan

- 12) Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Kota Cirebon Berkilau: Satu Tahun Aksi Nyata Jelang Nataru”.



Gambar 3. 91 Dialog Interaktif “Cirebon Menyapa Masyarakat” - “Kota Cirebon Berkilau: Satu Tahun Aksi Nyata Jelang Nataru”.

- Publikasi Terintegrasi
Publikasi terintegrasi yang dilakukan DKIS Kota Cirebon yaitu melaksanakan strategi komunikasi publik untuk mendukung Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) dan

Berikut beberapa publikasi yang telah tayang pada Triwulan I hingga IV:



ATUNTINA TBC HIV/AIDS



ATUNTINA TBC HIV/AIDS





Gambar 3. 92 Publikasi Terintegrasi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) dan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia, Pencegahan HIV-AIDS, dan Kampanye “Gempur Rokok Ilegal”.

9. Sub Kegiatan Penyusunan Konten

Sub kegiatan Penyusunan Konten terdiri dari Dokumentasi Foto (9 sesi) dan Pembuatan Video Shooting (28 video). Pada kegiatan ini, terdapat sewa aplikasi template desain grafis tiap bulannya yaitu Canva, Envato, dan Freepik. Pada Triwulan I, sebanyak 9 sesi Dokumentasi Foto telah dilaksanakan berupa sesi foto resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon. Selain itu, sewa aplikasi template desain grafis telah dilaksanakan setiap bulannya selama Januari sampai Maret. Berikut hasil foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon :



Effendi Edo, S.A.P., M.Si.
Wali Kota Cirebon



Siti Farida Rosmawati, S.Pd.I.
Wakil Wali Kota Cirebon

Pada Triwulan II, Pembuatan Video Shooting sebanyak 14 video telah selesai dikerjakan, berikut hasil video kegiatan Wali Kota Cirebon:

- 1) Pelantikan Sertijab Pidato Visi Misi
- 2) BPKPD Drainase Cipto Ciremai Raya Disperindag
- 3) Bapenda Jabar Ketupat Lodaya Ramp Check Pakta
- 4) Sertijab PKK Pengawas Sekolah DKUKMPP
- 5) Monitoring Posko Mudik



- 6) Halal Bi Halal Syukuran Halal Bi Halal PGRI
- 7) Taman Adipura Sungai Cipadu Sungai DerryPelantikan ASN
Musrenbang Mengecek Kotaku
- 8) Dekranasda olah kreasi Boxingcomp Hardiknas Renov
- 9) Pengerukan Sungai Cikalong dan Temu PKK Larangan



- 10) Musyawarah Apeksi Surabaya
- 11) Siaga Bencana Jaka Rara DetikCom
- 12) SOTR Forkopimda
- 13) Gotong Royong Warga Pengaspalan Jalan Sunyaragi



Pada Triwulan IV, Pembuatan Video Shooting sebanyak 14 video telah selesai dikerjakan, berikut hasil video kegiatan Wali Kota Cirebon:

- 1) Mengecek Galian C Argasunya
- 2) Monitoring Hewan Kurban Jelang Idul Adha 2025
- 3) Operasi Penerapan Jam Malam dan Kenakalan Remaja
- 4) Hari Jadi Cirebon
- 5) Cirebon Heritage Run 2025 dan Festival Nasi Jamblang dalam rangka Hari Jadi ke-598 Cirebon dan Hari Bhayangkara ke-79



- 6) Sapa Warga Kelurahan Pekirangan
- 7) Penertiban PKL dan Penataan Kawasan Bima
- 8) Sapa Warga Kelurahan Pegambiran
- 9) Pengerjaan Peningkatan Jalan Ciremai Raya
- 10) Satu Tahun Museum Topeng



- 11) Update Perbaikan Jalan Kota Cirebon
- 12) Roadshow Wawasan Kebangsaan di SMPN 11 Kota Cirebon
- 13) Mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Wakil

Gubernur Jawa Barat dalam kunjungan kerja di Kota Cirebon
14) Penataan trotoar di depan Stasiun Cirebon Kejaksan



10. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik dilakukan untuk membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh sumber daya komunikasi publik kepada masyarakat adalah jelas, akurat, dan mudah dipahami. Kemampuan untuk memanfaatkan media sosial secara efektif masih menjadi tantangan, dengan beberapa isu terkait pengelolaan konten dan respons yang kurang optimal. Maka dari itu, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Pelatihan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bagi pengelola layanan publik seperti admin layanan PPID, admin SP4N-LAPOR! atau admin media sosial Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Cirebon.

Pada triwulan IV, kegiatan Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik bagi Admin Media Sosial dilaksanakan pada Rabu, 26 November 2025 dengan tema Optimalisasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang dihadiri 38 admin media sosial Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 sesi dalam satu hari. Hasil

kegiatan tersebut yaitu mayoritas peserta menyatakan komitmen untuk Menjalankan standar caption dan template Pemkot, mengurangi konten seremonial dan memperbanyak konten informatif, membuat minimal 1 konten layanan per minggu, meningkatkan koordinasi internal tim admin, dan bersedia mengikuti pendampingan lanjutan jika diperlukan. Komitmen ini akan menjadi dasar monitoring kinerja admin OPD untuk periode berikutnya.

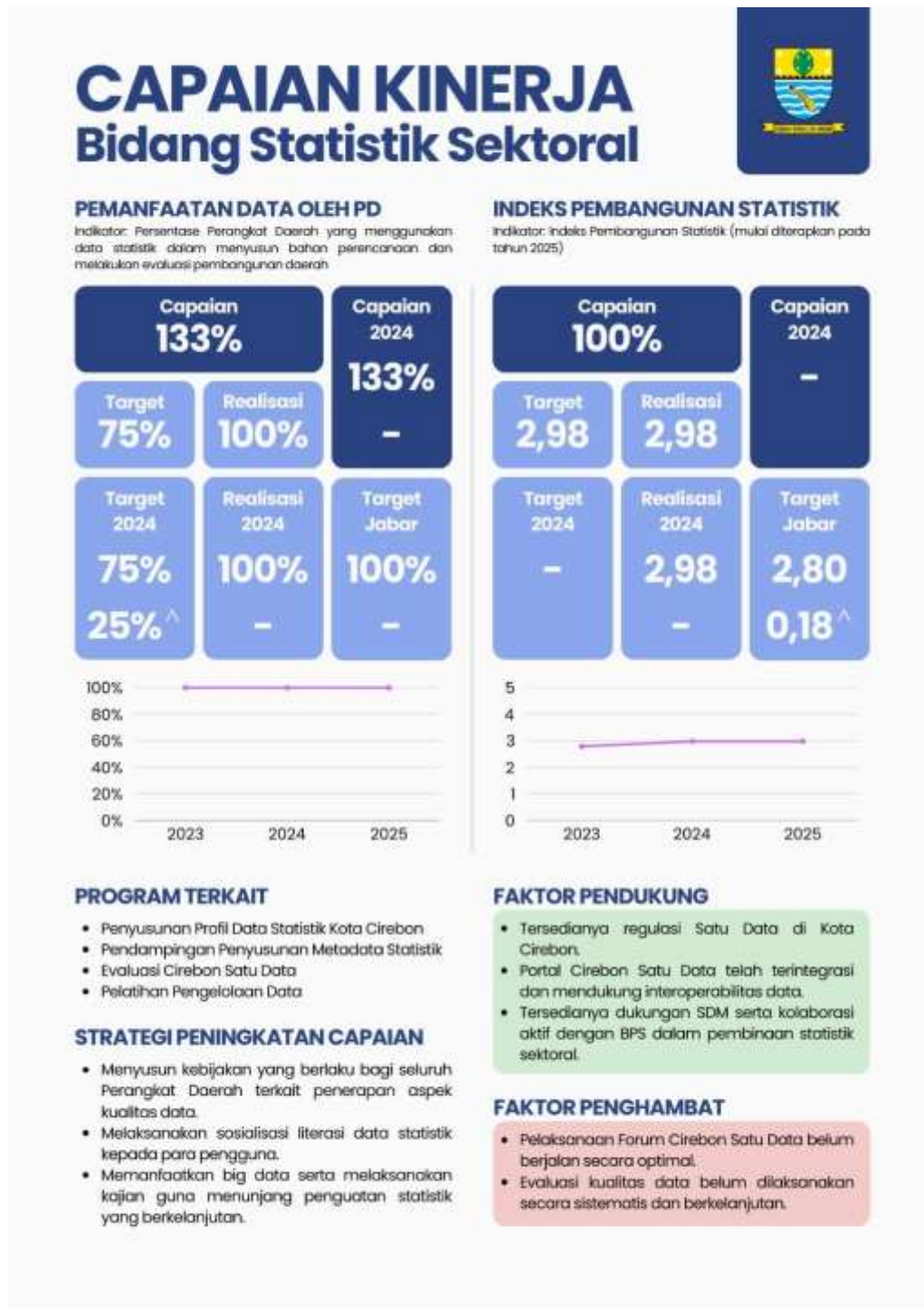




**Gambar 3. 93 Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Komunikasi Publik bagi Admin Media Sosial**

3.4.3 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Capaian Sasaran Ketiga

Sasaran 3: “Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Pembangunan Daerah



Gambar 3. 94 Infografis Sasaran Ketiga

Hasil pengukuran capaian kinerja dari Tujuan/Sasaran “Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi pembangunan daerah” dengan indikator: Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100 % dengan target 75%. Dengan demikian, capai kinerja pada Sasaran 3 adalah **TERCAPAI**.

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah:

$$\frac{\text{Jumlah PD yg menggunakan data statistik dlm menyusun bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Seluruh PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{32}{32} \times 100\% = 100\%, \text{ Maka pencapaian kinerja tersebut adalah}$$

32

$$\frac{100}{75} \times 100\% = 133 \%,$$

75

atau dengan predikat **MELEBIHI TARGET**.

Hasil pengukuran capaian kinerja dari Tujuan/Sasaran “Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah” dengan indikator: Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tanggal 7 Mei 2025 Nomor B-235/02000/TS.160/2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah, kegiatan EPSS Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS tahun 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja. Sehingga, nilai Indeks Pembangunan

Statistik Tahun 2025 menggunakan realisasi sesuai dengan hasil resmi EPSS Tahun 2024 Kota Cirebon sebesar 2,98 Poin dengan target 2,98 Poin. Dengan demikian, capaian kinerja pada Sasaran 3 adalah **TERCAPAI**.

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain				
Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,76
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	3,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,00
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,78
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,98

Hasil Indeks Pembangunan Statistik Kota Cirebon: 2,98 (Predikat Baik) Nilai Maksimal Indeks Pembangunan Statistik: 5,00

$$\text{Capaian: } \frac{2,98}{5,00} =$$

Keterangan:

Pencapaian Indeks Pembangunan Statistik Kota Cirebon adalah 2,98 poin dari nilai maksimal 5,00 poin atau setara dengan 60%.

Dalam mewujudkan Sasaran 3 maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program ini memiliki 5 sub kegiatan adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV meliputi honorarium pegawai Non ASN untuk jabatan Pengelola Data

Geospasial selama 12 (dua belas) bulan, pengadaan tas peserta kegiatan pelatihan dan baju taktikal bagi pegawai pada Bidang Statistik Sektoral, serta pelaksanaan pelatihan pengolahan data.

Pelatihan Pengolahan dan Penyajian Data dengan Google Workspace Basics

Pelatihan Pengolahan dan Penyajian Data dengan Google Workspace Basics dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon, dengan peserta seluruh pengelola data kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon serta narasumber dari UPTD Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis aparatur dalam mengolah dan menyajikan data statistik secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola data yang baik. Mengingat pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, penguasaan alat bantu digital seperti Google Sheets, Docs, dan Slides menjadi sangat relevan. Pelatihan ini juga merupakan bagian dari dukungan aktif DKIS terhadap Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), yang mendorong penguatan kapasitas aparatur desa/kelurahan dalam pengelolaan data sektoral secara mandiri dan berkelanjutan guna



Gambar 3. 95 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Penyajian Data dengan Google Workspace Basics

mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berbasis data di Kota Cirebon.

- Pelatihan Visualisasi Data Kewilayahan

Pelatihan Visualisasi Data Kewilayahan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola data dari kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, dengan narasumber dari Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis aparatur dalam mengolah dan menyajikan data statistik melalui media visual yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam membuat infografis yang mampu menyampaikan pesan data secara efektif, terutama terkait kondisi kewilayahan di Kota Cirebon. Selain memperkuat teknis, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pemanfaatan data sektoral secara lebih optimal oleh perangkat daerah. Visualisasi data yang baik diharapkan dapat membantu proses diseminasi informasi statistik kepada masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data di tingkat kecamatan dan kelurahan.



Gambar 3. 96 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Visualisasi Data Kewilayahan

2) Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektorial terhadap Sistem Statistik Nasional

Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV meliputi penyelenggaraan rapat Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, penyusunan Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025, dan penyusunan Analisis Data Statistik Sektorial Tahun 2025.

- Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Kegiatan Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 bertempat di CWS DKIS Kota Cirebon, sebagai upaya untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data yang dibutuhkan dalam publikasi Daerah Dalam Angka Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.



Gambar 3. 97 Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

- **Penyusunan Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025**

Dalam rangka penyusunan Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 telah dilaksanakan rapat persiapan internal pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Rapat ini membahas langkah awal penyusunan, pembagian tugas tim, serta rencana koordinasi dengan Produsen Data, sebagai upaya mendukung tersusunnya profil data yang akurat dan mutakhir.

Sebagai tindak lanjut dari rapat persiapan tersebut, telah dilaksanakan rapat rekonsiliasi data pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Rapat ini difokuskan pada proses pengisian dan verifikasi validitas data yang diperlukan dalam penyusunan Profil Data Statistik Kota Cirebon. Kegiatan ini dihadiri oleh Produsen Data yang berasal dari Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan perguruan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.



Gambar 3. 98 Dokumentasi Kegiatan Rekonsiliasi Data Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025

Buku Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon melalui Bidang Statistik Sektoral sebagai upaya menyediakan gambaran komprehensif mengenai kondisi pembangunan daerah. Publikasi ini menyajikan data primer dan sekunder yang mencakup berbagai bidang seperti geografis, pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian, industri, perdagangan, transportasi, keuangan, serta analisis spasial pembangunan ekonomi. Dengan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan analisis deskriptif, publikasi ini diharapkan menjadi sumber informasi statistik yang akurat dan bermanfaat bagi perencanaan, evaluasi kebijakan, serta pengambilan keputusan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.



Gambar 3. 99 Tangkapan Layar Sampul dan Kata Pengantar Buku Profil Data Statistik Kota Cirebon Tahun 2025

- **Penyusunan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025**

Kegiatan Penyusunan Analisis Data Statistik Sektoral merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Bidang Statistik Sektoral setiap tahunnya. Setiap pelaksanaan kegiatan mengangkat tema yang berbeda, menyesuaikan dengan isu strategis yang berkembang baik di bidang ekonomi maupun sosial di Kota Cirebon. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun hasil analisis yang mampu memberikan gambaran kondisi faktual sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan tahun 2025, telah diselenggarakan rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik Sektoral dan dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda, serta Dinas Lingkungan Hidup.



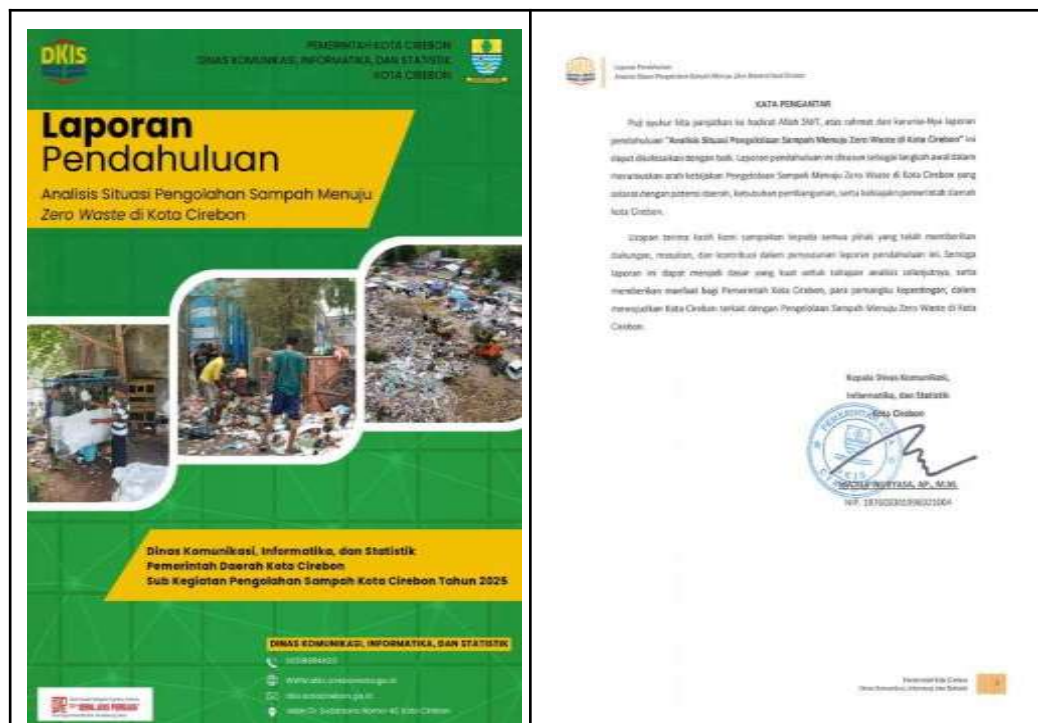
Gambar 3. 100 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025

Pokok pembahasan dalam rapat tersebut difokuskan pada penentuan tema yang akan diangkat dalam penyusunan analisis data statistik sektoral tahun berjalan. Berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan bersama, disepakati bahwa tema yang akan diangkat adalah “Analisis Situasi Pengelolaan Sampah Menuju *Zero Waste* di Kota Cirebon”. Tema ini dinilai relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung upaya pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan KAK tersebut, telah diselenggarakan rapat pembahasan Laporan Pendahuluan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Rapat ini membahas kerangka analisis yang akan digunakan, meliputi konsep dan definisi variabel yang dikumpulkan, serta desain kegiatan yang mencakup metode pengumpulan data, pengolahan data, dan teknik analisis yang akan diterapkan.



Gambar 3. 101 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025

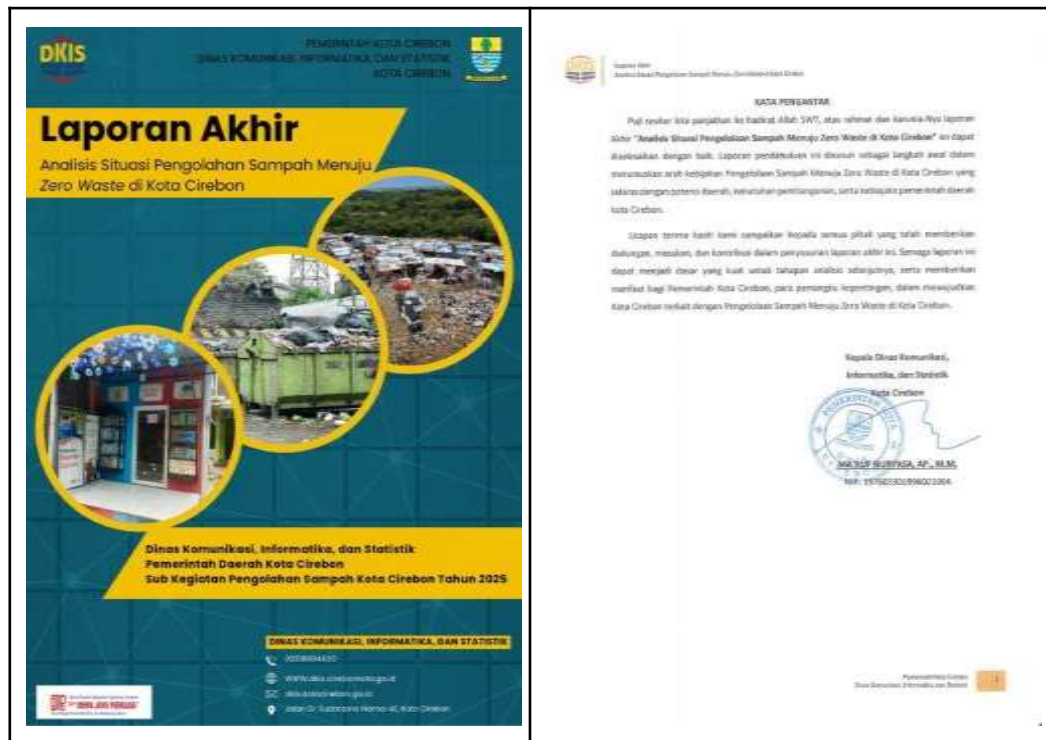


Gambar 3. 102 Tangkapan Layar Sampul dan Kata Pengantar Laporan Pendahuluan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025

Tahap akhir dari rangkaian kegiatan ini adalah rapat pembahasan Laporan Akhir sebelum dilakukan finalisasi dokumen. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 November 2025, bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Pembahasan difokuskan pada hasil akhir pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, yang menghasilkan rumusan rekomendasi serta strategi penguatan pengelolaan persampahan menuju penerapan konsep *zero waste* di Kota Cirebon.



Gambar 3. 103 Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025



Gambar 3. 104 Tangkapan Layar Sampul dan Kata Pengantar Laporan Akhir Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025

3) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV meliputi penyelenggaraan Desk e-Walidata, Evaluasi dan Penghargaan Cirebon Satu Data Tahun 2025, serta pengadaan perangkat pendukung pengolah data berupa UPS dan kamera digital.

a. Desk e-Walidata Tahun 2025

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 bertempat di Bappelitbangda Kota Cirebon, yang bertujuan untuk menyepakati Daftar Data e-Walidata Tahun 2025 (capaian tahun 2024). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Produsen Data dan Kepala Bappelitbangda selaku Koordinator Forum Satu Data.



Gambar 3. 105 Dokumentasi Kegiatan Desk e-Walidata Tahun 2025

b. Evaluasi dan Penghargaan Cirebon Satu Data Tahun 2025

Evaluasi Cirebon Satu Data merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon melalui Bidang Statistik Sektorial selaku Walidata. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Cirebon Satu Data selama satu tahun terakhir, khususnya terkait keterisian dan kualitas data pada Portal Cirebon Satu Data sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Pada tahun 2025, kegiatan Evaluasi Cirebon Satu Data diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 bertempat di Hotel Prima Cirebon. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Produsen Data Cirebon Satu Data di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon memberikan arahan bahwa tantangan utama dalam tata kelola data saat ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada kedisiplinan dan kesadaran

bersama dalam mengelola serta memanfaatkan data. Cirebon Satu Data diharapkan menjadi pondasi utama dalam seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.



Gambar 3. 106 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi dan Penghargaan Cirebon Satu Data Tahun 2025

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi, diselenggarakan pula Penganugerahan Penghargaan Cirebon Satu Data Tahun 2025 sebagai

bentuk apresiasi kepada Produsen Data yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. Penghargaan diberikan kepada 12 (dua belas) pemenang yang terbagi ke dalam 6 (enam) kategori, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penilaian dan Penetapan Pemenang Penghargaan Cirebon Satu Data Tahun 2025 Nomor B/800.1.12.8/728/Statistik/2025.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh Produsen Data untuk terus meningkatkan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan Cirebon Satu Data secara konsisten dan berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV meliputi penyelenggaraan Desk Metadata dan Sosialisasi Standar Data Statistik.

a. Desk Metadata Tahun 2025

Desk Metadata Statistik Sektoral dilaksanakan selama 4 (empat) hari, pada tanggal 28 sampai dengan 31 Juli 2025 bertempat di CWS DKIS Kota Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota





**Gambar 3. 107 Dokumentasi Kegiatan Desk Metadata Statistik Sektoral
Tahun 2025**

Cirebon sebagai Produsen Data, dengan fasilitator dari Bidang Statistik Sektoral.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas Perangkat Daerah dalam menyusun metadata statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pendampingan teknis dalam penyusunan 3 (tiga) jenis metadata, yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator, sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pelaksanaan desk dilakukan melalui pendekatan konsultatif antara fasilitator dan perwakilan masing-masing Perangkat Daerah. Selama kegiatan, peserta dibimbing untuk memahami struktur dan atribut metadata, melakukan pengisian dokumen sesuai standar baku, serta memverifikasi konsistensi dan kelengkapan informasi yang dihasilkan.

- b. Sosialisasi Standar Data Statistik dan Pemanfaatannya untuk Pembangunan Daerah

Sosialisasi Standar Data Statistik dan Pemanfaatannya untuk Pembangunan Daerah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Produsen Data, dengan narasumber dari Badan



Gambar 3. 108 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Standar Data Statistik dan Pemanfaatannya untuk Pembangunan Daerah Pusat Statistik Kota Cirebon.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah mengenai konsep dan penerapan Standar Data Statistik sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Selain membahas aspek teknis penyusunan standar data, sosialisasi ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik dalam mendukung pembangunan daerah, antara lain untuk mengetahui kondisi nyata wilayah, menyusun perencanaan yang tepat dan terarah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral

Sesuai Standar Pelaksanaan sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV meliputi Penyelenggaraan rapat penentuan dan penetapan lokasi fokus (lokus) penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 202, Sosialisasi Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2025 dan Tahun 2026, serta Desk Update Data.

a. Rapat Penentuan Lokus EPSS Tahun 2025

Dalam rangka menetapkan Perangkat Daerah yang menjadi lokus EPSS Tahun 2025, telah dilaksanakan rapat penentuan lokus pada hari Rabu 15 Januari 2025 bertempat di MCC DKIS Kota Cirebon. Rapat ini dihadiri oleh BPS Kota Cirebon dan calon lokus, yaitu Bappelitbangda, DPRKP, Disnaker, dan DP3APPKB.



**Gambar 3. 109 Dokumentasi Kegiatan Rapat Penentuan Lokus EPSS
Tahun 2025**

b. Rapat Penetapan Lokus EPSS Tahun 2025

Berdasarkan hasil rapat penentuan lokus EPSS dan koordinasi DKIS bersama BPS Kota Cirebon, telah diusulkan 2 (dua) Perangkat Daerah sebagai lokus EPSS Tahun 2025, yaitu Disdukcapil dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Kedua perangkat daerah tersebut ditetapkan secara resmi sebagai lokus EPSS Tahun 2025 pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Ruang Prabayaksa Sekretariat Daerah. Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Penilai Internal EPSS dan Kepala



**Gambar 3. 110 Dokumentasi Kegiatan Rapat Penetapan Lokus EPSS
Tahun 2025**

DKIS selaku Ketua Tim Penilai Internal EPSS.

c. Sosialisasi Desa Cinta Statistik Tahun 2025

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan inisiatif dari Badan Pusat Statistik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas statistik di tingkat desa atau kelurahan. Melalui program ini, diharapkan pengelolaan data dapat dilakukan secara mandiri, terstruktur, dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan yang berbasis data.



Gambar 3. 111 Dokumentasi Sosialisasi Desa Cantik Tahun 2025

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon melalui Bidang Statistik Sektoral telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Desa Cantik Tahun 2025 yang ditujukan kepada seluruh aparatur sipil kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 bertempat di Ruang Prabayaksa Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dan dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Penetapan Kelurahan Karyamulya sebagai lokus pembinaan Program Desa Cantik Tahun 2025.

d. Sosialisasi Desa Cinta Statistik Tahun 2026

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 diarahkan menjadi bagian integratif dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Cirebon, terutama dalam peningkatan kualitas data kelurahan demi perencanaan pembangunan yang akurat dan tepat sasaran.



Gambar 3. 112 Dokumentasi Sosialisasi Desa Cantik Tahun 2026



Gambar 3. 113 Piagam Pencanangan Desa Cantik Tahun 2026

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon melalui Bidang Statistik Sektoral telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi

Program Desa Cantik Tahun 2026 yang ditujukan kepada aparatur sipil kelurahan di Kecamatan Pekalipan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 bertempat di Ruang Kepatihan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Pada kesempatan tersebut juga telah ditetapkan Kelurahan Pulasaren sebagai lokus pembinaan Program Desa Cantik Tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Penetapan Lokasi Fokus Pembinaan Program Desa Cinta Statistik Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2026 Nomor B/500.14/741/Statistik/2025. Penandatanganan berita acara tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Evaluasi Cirebon Satu Data Tahun 2025 pada tanggal 27 November 2025.

e. Desk Update Data

Kegiatan Desk Update Data telah dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober 2025 bertempat di DKIS Kota Cirebon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis kepada seluruh Produsen Data dalam melakukan penginputan dan pembaruan data pada Portal Cirebon Satu Data, sehingga keterisian data dapat meningkat





Gambar 3. 114 Dokumentasi Kegiatan Desk Update Data

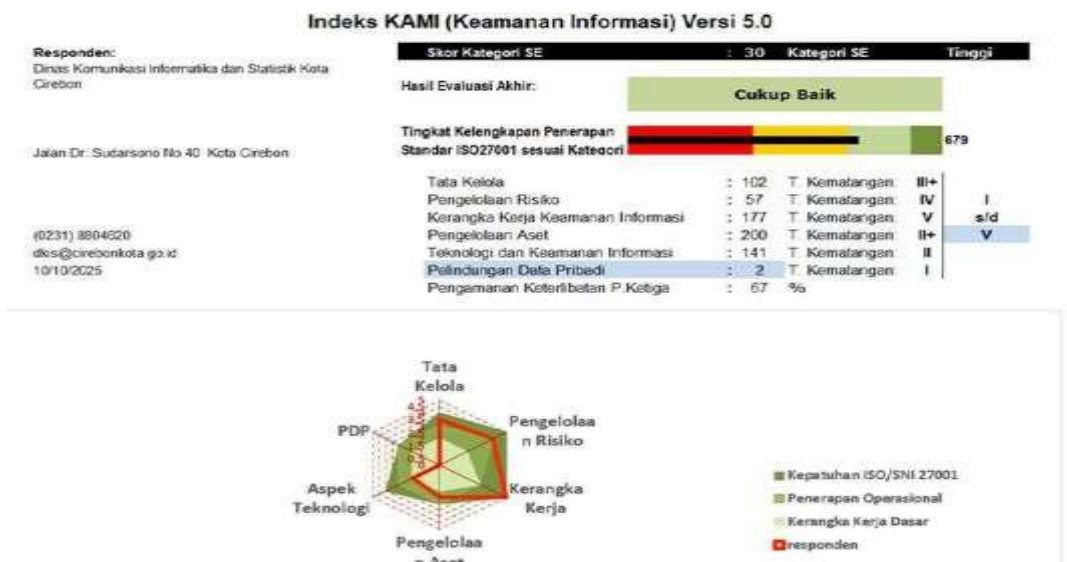
3.4.4 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Capaian Sasaran Keempat

B. Indikator



Gambar 3. 115 Infografis Sasaran Keempat

Hasil evaluasi capaian kinerja dari Tujuan/Sasaran “Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja Nilai Indeks Keamanan Informasi, dikarenakan adanya perubahan dari versi Indeks KAMI 4.2 ke versi terbaru 5.0 maka sedang terjadi penyesuaian untuk penilaian dan assessment. Sehingga belum adanya penilaian/assessment langsung dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku Lembaga pembina maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.maka dilakukan assessment secara mandiri dengan hasil nilai Indeks Keamanan Informasi dengan realisasi sebesar 679 poin dengan target 496 poin. Dengan demikian capai kinerja pada sasaran 4 telah **TERCAPAI**.



Hasil skor indeks KAMI Kota Cirebon sebesar: **679**

Hasil skor maksimal indeks KAMI: **918**

Didapat = $\frac{679}{918} = 74\%$

918

Keterangan:

Pencapaian Nilai Indeks KAMI adalah 679 poin dari nilai maksimal 918 poin atau 74%. Untuk mewujudkan Sasaran 4 maka Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pada Tahun 2025, program ini memiliki 2 kegiatan adapun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 4 (empat) sub kegiatan ..

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Audit Surveillance ISO 27001:2022

Kegiatan Audit Surveillance ISO/IEC 27001:2022 dilaksanakan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam memastikan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berjalan konsisten, efektif, serta selaras dengan standar internasional. Audit ini bertujuan mengevaluasi pemenuhan persyaratan standar, menilai keberlanjutan implementasi kebijakan keamanan informasi, serta memastikan pengendalian risiko terkait pengelolaan data dan layanan informasi diterapkan secara memadai.

Audit dilaksanakan oleh tim auditor eksternal yang tersertifikasi, melalui rangkaian tahapan meliputi pembukaan (*opening meeting*), telaah dokumen, wawancara, observasi lapangan, pengujian bukti objektif, hingga penutupan (*closing meeting*). Ruang lingkup audit mencakup kebijakan, perencanaan risiko, kontrol operasional, pengelolaan insiden, pengendalian akses, keberlanjutan layanan, perlindungan aset informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.



Gambar 3. 116 Kegiatan Audit Surveillance ISO 27001:2022

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Sosialisasi Perwal SMKI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keamanan informasi yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan komprehensif mengenai ruang lingkup SMKI, kebijakan, peran dan tanggung jawab, serta langkah-langkah pengendalian risiko keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam sosialisasi ini juga dipaparkan pentingnya perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, termasuk pengelolaan akses, pengamanan aset informasi, penanganan insiden, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Peserta diberikan contoh penerapan nyata di unit kerja masing-masing, disertai sesi diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman.

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan setiap perangkat daerah mampu mengimplementasikan SMKI secara konsisten, meningkatkan budaya sadar keamanan informasi, meminimalkan potensi risiko dan kebocoran data, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih aman, terpercaya, dan akuntabel.



Gambar 3. 117 Kegiatan Sosialisasi Perwal Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

2. Audit Internal ISO 27001:2022

Kegiatan Audit Internal ISO 27001:2022 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) telah berjalan sesuai standar, terdokumentasi dengan baik, dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja terkait. Audit internal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, peluang perbaikan, serta memastikan efektivitas pengendalian keamanan informasi yang diterapkan.

Pelaksanaan audit dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, serta penelusuran bukti penerapan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar keamanan informasi. Auditor internal

melakukan pengecekan pada aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi, termasuk pengelolaan risiko, pengendalian akses, pengamanan aset informasi, penanganan insiden, serta kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil audit, diperoleh gambaran tingkat kesesuaian implementasi SMKl, temuan ketidaksesuaian, serta rekomendasi perbaikan untuk peningkatan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan tindak lanjut korektif dan preventif sehingga sistem dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Dengan dilaksanakannya Audit Internal ISO 27001:2022 ini, diharapkan organisasi mampu mempertahankan kinerja keamanan informasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa pengelolaan informasi mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan/organisasi yang aman, profesional, dan akuntabel.



Gambar 3. 118 Kegiatan Audit Internal ISO 27001:2022

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 1. Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik

Kegiatan Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilaksanakan sebagai upaya mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Kegiatan ini difokuskan pada pegawai di 22 Puskesmas, dengan tujuan meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan TTE sebagai sarana legal dalam

proses administrasi, pelayanan publik, serta tata kelola dokumen pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan aman.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum TTE, alur penggunaan dalam dokumen kedinasan, standar keamanan informasi, serta praktik langsung pembuatan dan aktivasi akun TTE. Selain itu, dilakukan pendampingan teknis agar setiap pegawai mampu menggunakan TTE secara mandiri pada berbagai aplikasi layanan dan surat-menyurat elektronik.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh Puskesmas di Kota Cirebon dapat menerapkan penggunaan TTE secara konsisten, meminimalkan penggunaan kertas, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan keandalan dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan meliputi pembuatan email cirebonkota.go.id, pengisian data pengguna, perekaman wajah pengguna dan mendaftarkan pengguna untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik dari BSRé untuk semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.



Gambar 3. 119 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kesehatan



Gambar 3. 120 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Astanagarib



Gambar 3. 122 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Cangkol



Gambar 3. 121 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Drajat



**Gambar 3. 123 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di
Puskesmas Gunungjati**



**Gambar 3. 124 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di
Puskesmas Jagasatru**



**Gambar 3. 125 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di
Puskesmas Jalan Kembang**



Gambar 3. 126 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kalijaga Permai



Gambar 3. 127 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kalitanjung



Gambar 3. 128 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kesambi

Gambar 47



Gambar 3. 129 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Kesunean



Gambar 3. 130 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Larangan



Gambar 3. 131 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Nelayan



Gambar 3. 132 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Pamitran



Gambar 3. 133 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Pegambiran



Gambar 3. 134 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di Puskesmas Pekalangan



**Gambar 3. 136 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di
Puskesmas Perumnas Utara**



**Gambar 3. 135 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di
Puskesmas Pesisir**



**Gambar 3. 137 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di
Puskesmas Sunyaragi**



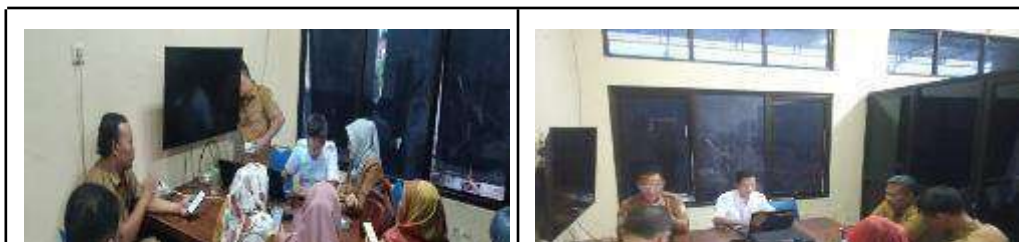
**Gambar 3. 138 Sosialisasi dan Pendaftaran Tanda Tangan Elektronik di
Puskesmas Sitopeng**

2. Help Desk Tanda Tangan Elektronik

Layanan HelpDesk Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon diselenggarakan sebagai bentuk dukungan teknis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam penerapan dokumen elektronik yang sah dan aman. Melalui layanan ini, pegawai mendapatkan pendampingan mulai dari proses pendaftaran, aktivasi, penggunaan, hingga penanganan kendala teknis terkait TTE.

HelpDesk TTE berperan sebagai pusat konsultasi dan koordinasi, menyediakan informasi mengenai dasar hukum, standar keamanan, prosedur penggunaan, serta integrasi TTE pada berbagai aplikasi layanan pemerintahan. Petugas HelpDesk juga melakukan verifikasi data, asistensi konfigurasi perangkat, serta monitoring penggunaan untuk memastikan setiap dokumen yang ditandatangani memenuhi aspek keaslian, integritas, kerahasiaan, dan tidak dapat dipungkiri.

Dengan adanya layanan HelpDesk TTE ini, diharapkan implementasi tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel. Layanan ini sekaligus memperkuat upaya transformasi digital, mempercepat proses administrasi, mengurangi penggunaan kertas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 3. 139 Layanan Help Desk Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon

3. Pelaksanaan Layanan Pentest

Layanan Pentest, atau penetration testing, adalah suatu metode pengujian keamanan sistem komputer atau jaringan dengan cara mensimulasikan serangan dari pihak luar atau dalam untuk mengetahui kerentanan dan kelemahan sistem.

Tujuan Pentest adalah:

- Mengidentifikasi/menemukan kerentanan dan kelemahan sistem sebelum diserang oleh pihak yang tidak berwenang
- Meningkatkan keamanan sistem dengan memperbaiki kerentanan dan kelemahan yang ditemukan
- Mengurangi risiko serangan keamanan dengan mengetahui dan memperbaiki kerentanan sistem



Gambar 3. 140 Pengujian Pentest pada website milik Disdukcapil Kota Cirebon

4. Sosialisasi Keamanan Informasi

Memberikan pemahaman tentang dasar-dasar keamanan informasi meliputi: kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan (KIK), serta praktik-praktik seperti penggunaan password kuat, autentikasi dua faktor, penggunaan enkripsi, dan waspada terhadap serangan siber (phishing, malware).



Gambar 3. 141 Sosialisasi Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

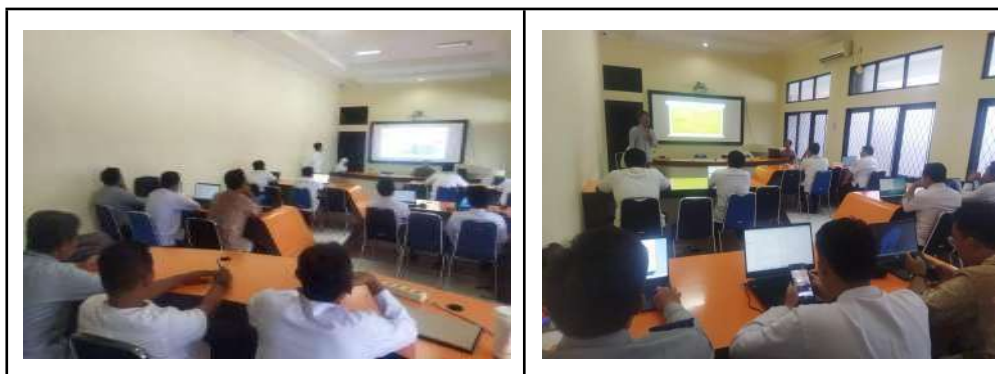
5. Bimbingan Teknis Agen CSIRT

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan insiden keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Kegiatan ini bertujuan membekali para agen CSIRT dengan pengetahuan, keterampilan, serta prosedur operasional standar dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi berbagai potensi ancaman terhadap sistem dan data pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan materi mengenai konsep dasar keamanan siber, pengenalan jenis-jenis insiden, alur pelaporan dan penanganan insiden, teknik analisis awal, serta koordinasi antar unit ketika terjadi gangguan layanan. Selain paparan materi, peserta juga mengikuti simulasi penanganan insiden sehingga mampu menerapkan langkah respons cepat, terukur, dan sesuai standar.

Pelaksanaan Bimtek ini diharapkan mampu membentuk agen-agen CSIRT yang sigap, bertanggung jawab, dan mampu berkolaborasi

dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi pemerintahan. Dengan dukungan agen CSIRT yang kompeten, Pemerintah Kota Cirebon diharapkan semakin siap menghadapi ancaman siber, meningkatkan keandalan layanan digital, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan informasi pemerintah.



Gambar 3. 142 Bimbingan Teknis Agen CSIRT di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

d. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Sandi Data

Kegiatan konsultasi dan pengecekan persyaratan Sandi Data dari BSSN sebagai implementasi dari penerapan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi pada aplikasi SIMPEG milik Pemerintah Kota Cirebon. Kegiatan sandi data, atau kriptografi, adalah suatu teknik untuk melindungi data dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang.

Tujuan Kegiatan Sandi Data antara lain:

- Kerahasiaan: Melindungi data dari akses tidak sah
- Integritas: Memastikan data tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin
- Autentikasi: Memastikan identitas pengirim dan penerima data



Gambar 3. 143 Konsultasi dan implementasi sandi data di aplikasi SIMPEG

- 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 5.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.350.000,00 (100%) pada Triwulan IV Tahun 2025.
 - a. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan monitoring dan evaluasi email sanapati yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
 1. Monitoring dan Evaluasi Email Sanapati

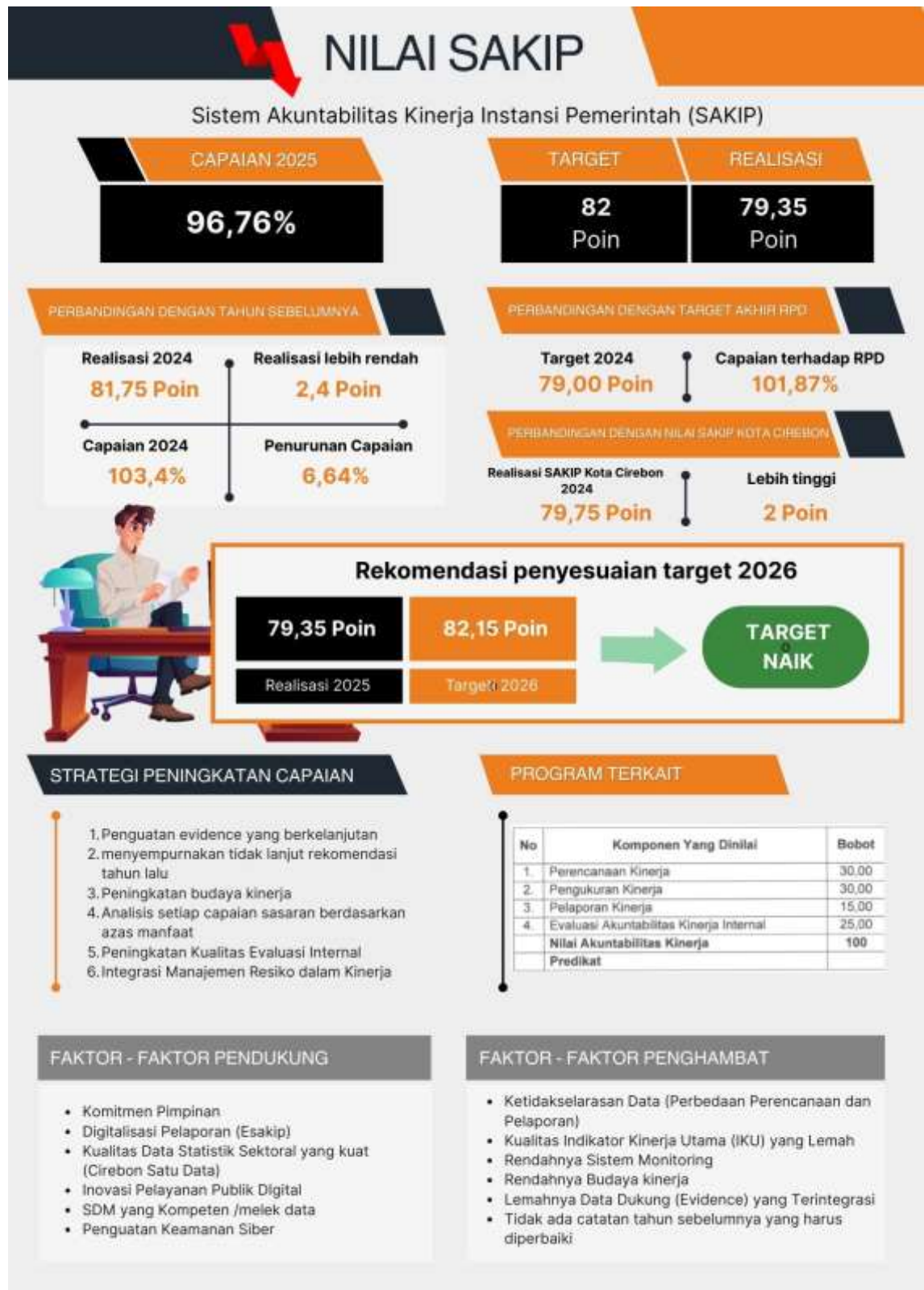
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengelolaan Email Sanapati dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan tata kelola komunikasi resmi pemerintah daerah serta memperkuat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan monev ini melibatkan 32 Perangkat Daerah, dengan fokus pada pemanfaatan, kepatuhan, dan keamanan penggunaan akun email Sanapati sebagai sarana komunikasi kedinasan.



Gambar 3. 144 Monitoring dan Evaluasi Email Sanapati

3.4.5 Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kelima

Sasaran 5: “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah”



Gambar 3. 145 Inforgrafis Sasaran Kelima

Hasil evaluasi capaian kinerja dari Tujuan/Sasaran “*Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah*” dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar **90,09 poin** atau **109%** dari target 83 poin. Dengan demikian, capaian kinerja pada sasaran ini dinyatakan **TERCAPAI**.

Hasil ini diukur melalui Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan data yang dihimpun melalui Aplikasi SUKMA, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Waktu Pelaksanaan SKM DKIS Kota Cirebon

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Februari 2025	20
2.	Pengumpulan Data (Distribusi dan Input)	Maret-Juli 2025	89
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Agustus 2025	20
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil SKM	Agustus 2025	20

Survei dilakukan terhadap 201 responden dengan kriteria populasi berupa individu (masyarakat umum, mitra kerja, atau pihak terkait) yang pernah menerima layanan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon. Jenis layanan yang menjadi objek survei meliputi:

1. Cirebon Satu Data (CSD)
2. Cirebon Siaga 112
3. Free WiFi (Cirebon Melet = Melek Internet)
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5. SP4N LAPOR!
6. Website Pemerintah Daerah Kota Cirebon

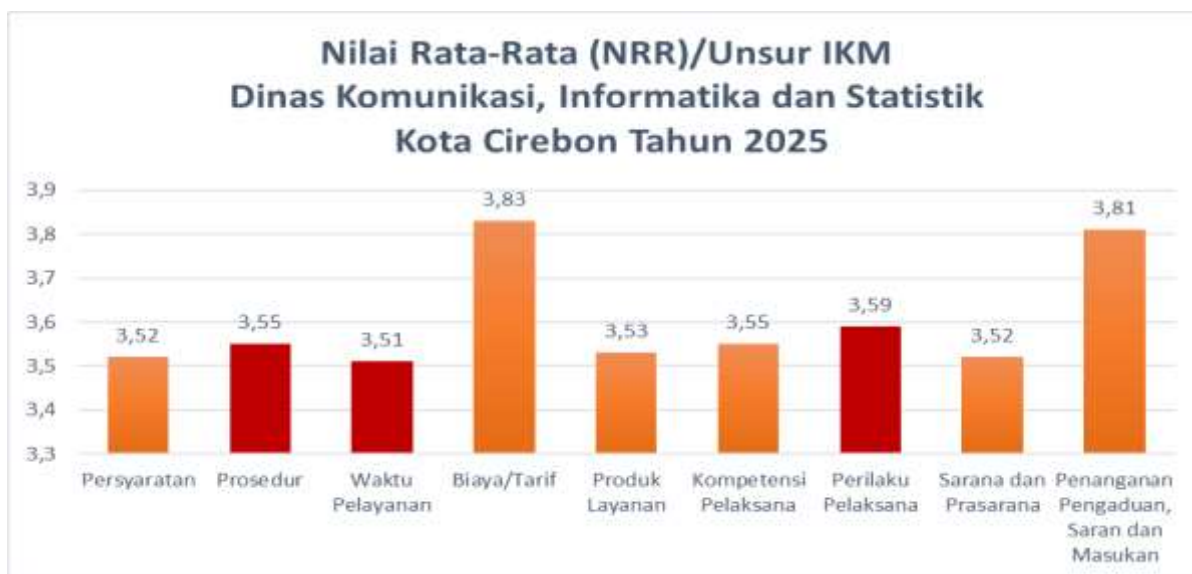
Adapun hasil pengolahan data melalui Aplikasi SUKMA, diperoleh nilai rata-rata unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Rekapitulasi Nilai Rata-Rata (NRR)/Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR/Unsur	3.52	3.55	3.51	3.83	3.53	3.55	3.59	3.52	3.81
IKM Unit Layanan	89.99 (Sangat Baik)								

Sumber: Olah Data Aplikasi SUKMA, 2025

Tabel 3. 9 Nilai Rata-Rata (NRR)/Unsur IKM



Sumber: Olah Data Aplikasi SUKMA, 2025

Nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan menunjukkan hasil yang cukup konsisten, berada pada rentang skor 3,51 hingga 3,83. Secara lebih rinci, unsur pelayanan dengan skor tertinggi adalah **Unsur 4 (Biaya/Tarif)** dengan nilai **3,83**, diikuti oleh **Unsur 9 (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan)** dengan nilai **3,81**.

Sementara itu, nilai terendah terdapat pada unsur **Unsur 3 (Waktu Pelayanan)** dengan skor **3,51**. Meskipun terdapat variasi nilai antarunsur, seluruh aspek pelayanan tetap berada pada kategori baik.

Dari keseluruhan penilaian tersebut, diperoleh nilai IKM Unit Layanan sebesar **89,99**, yang masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Hal ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah mampu memenuhi harapan masyarakat secara optimal.

Keunggulan utama DKIS terletak pada keterjangkauan biaya layanan serta responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, sedangkan tantangan yang perlu diperhatikan mencakup efisiensi waktu pelayanan, kemudahan persyaratan, dan penguatan sarana prasarana.

Agar capaian positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

- **Jangka Pendek:** Mempercepat sosialisasi layanan online, meningkatkan literasi publik, dan memperbaiki standar waktu pelayanan.
- **Jangka Menengah:** Menyederhanakan prosedur pelayanan, memperluas aksesibilitas sarana, serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi.
- **Jangka Panjang:** Membangun ekosistem layanan digital yang terintegrasi, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sesuai Renstra 2025-2029 untuk Sasaran 5 yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” terjadi perubahan indikator yang sebelumnya nilai indeks kepuasan masyarakat (RPD 2024-2026 berubah menjadi Nilai SAKIP. Hasil pengukuran capaian kinerja dari Tujuan/Sasaran “meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan indikator Nilai SAKIP, melalui Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah. Hasil kegiatan tersebut, DKIS Kota Cirebon meraih predikat sebagai **sangat baik (BB)** dengan nilai **79,35 poin** dari nilai target sebesar 82 poin. Dengan demikian, capaian kinerja pada Sasaran 5 adalah **BELUM TERCAPAI**.

Hasil evaluasi SAKIP DKIS Tahun 2025 dicapai dengan pengukuran sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	24,90
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75	11,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	18,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	81,75	79,35
	Predikat		A	BB

Hasil Evaluasi AKIP tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil penilaian Tahun 2024 yaitu dari 81,75 menjadi 79,35 pada Tahun 2025 atau penurunan sebesar 2,40 poin. Terdapat 3 (tiga) komponen yang mengalami pengukuran yaitu : Komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik agar lebih meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Rencana Aksi yang disusun akan berfokus pada dua hal yaitu mempertahankan pencapaian yang mendapatkan predikat A serta meningkatkan pencapaian yang masih mendapatkan predikat BB atau B. Komponen-komponen tersebut terdiri dari :

1. Komponen Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00) mendapatkan nilai 24,60 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 25,50. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi.
2. Komponen Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00) mendapatkan nilai 24,60 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 22,50. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi.
3. Komponen Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00) mendapatkan nilai 11,85 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 12,75. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi,

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00) mendapatkan nilai 18,00 pada tahun 2025, berbanding pada tahun 2024 dengan nilai 21,00. Terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi

3.5 Realisasi Anggaran Kota Cirebon

APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 dan Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 87 Tahun 2023 yang kemudian ditetapkan penjabarannya yang baru melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2024, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Adapun APBD Kota Cirebon Tahun 2025 untuk DKIS Kota Cirebon dianggarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Tabel Realisasi per jenis Belanja

JENIS BELANJA		TARGET	REALISASI
1		2	3
1.	Belanja Operasi	Rp19.307.514.114,00	Rp18.014.012.132,00
1.1	Belanja Pegawai	Rp9.459.224.047,00	Rp8.740.881.174,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.498.290.187,00	Rp7.945.142.535,00
1.3	Belanja Hibah	Rp1.349.999.880,00	Rp1.327.988.423,00
2	Belanja Modal	Rp2.477.790.351,00	Rp2.404.056.449,00
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.776.751.009,00	Rp1.746.428.449,00
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp701.039.342,00	Rp657.628.000,00
		Rp21.785.304.465,00	Rp20.418.068.581,00

Tabel 3. 11 Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI
1		2	3
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp12.753.386.998,00	Rp11.779.099.436,00
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp71.107.330,00	Rp69.484.475,00
1.1.1	sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp7.242.220,00	Rp7.155.900,00
1.1.2	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp1.898.324,00	Rp1.800.500,00
1.1.3	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp1.898.324,00	Rp1.800.500,00
1.1.4	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp1.898.324,00	Rp1.800.500,00
1.1.5	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp1.898.324,00	Rp1.849.250,00
1.1.6	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp7.711.620,00	Rp7.076.250,00
1.1.7	sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp48.560.194,00	Rp48.001.575,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp9.462.832.991,00	Rp8.744.490.118,00
1.2.1	sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.459.224.047,00	Rp8.740.881.174,00
1.2.2	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.276.800,00	Rp1.276.800,00
1.2.3	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp2.332.144,00	Rp2.332.144,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI
1		2	3
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00
1.3.1	sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp0,00	Rp0,00
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00
1.4.1	sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp0,00
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp651.949.083,00	Rp632.029.950,00
1.5.1	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp61.011.875,00	Rp59.639.950,00
1.5.2	sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp4.478.502,00	Rp4.275.000,00
1.5.3	sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp153.399.323,00	Rp153.046.100,00
1.5.4	sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp23.928.000,00	Rp23.928.000,00
1.5.5	sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
1.5.6	sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp379.131.383,00	Rp361.140.900,00
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp79.484.532,00	Rp78.389.500,00
1.6.1	sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp79.484.532,00	Rp78.389.500,00
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.137.165.420,00	Rp987.691.213,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI
1		2	3
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp434.101.000,00	Rp285.820.713,00
1.7.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp703.064.420,00	Rp701.870.500,00
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.350.847.642,00	Rp1.267.014.180,00
1.8.1	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp43.839.000,00	Rp40.895.100,00
1.8.2	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp388.261.000,00	Rp370.862.000,00
1.8.3	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp770.862.918,00	Rp710.373.800,00
1.8.4	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp98.894.724,00	Rp97.459.680,00
1.8.5	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp48.990.000,00	Rp47.423.600,00
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp4.570.706.892,00	Rp4.340.905.640,00
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.570.706.892,00	Rp4.340.905.640,00
2.1.1	Sub Kegiatan Relasi Media	Rp248.895.625,00	Rp248.611.625,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI
1		2	3
2.1.2	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp142.318.592,00	Rp142.318.592,00
2.1.3	Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Rp1.299.999.880,00	Rp1.277.988.423,00
2.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp667.285.080,00	Rp461.601.600,00
2.1.5	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp2.261.315,00	Rp2.261.000,00
2.1.6	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp32.494.900,00	Rp32.494.900,00
2.1.7	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Rp365.043.900,00	Rp364.344.000,00
2.1.8	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp1.383.990.640,00	Rp1.382.869.800,00
2.1.9	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Rp18.724.660,00	Rp18.723.400,00
2.1.10	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Rp281.747.000,00	Rp281.747.000,00
2.1.11	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Rp127.945.300,00	Rp127.945.300,00
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp2.875.626.910,00	Rp2.732.643.771,00
3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp63.694.000,00	Rp61.774.950,00
3.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Rp63.694.000,00	Rp61.774.950,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI
1		2	3
	Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
3.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.811.932.910,00	Rp2.670.868.821,00
3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Rp0,00	Rp0,00
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan proses bisnis	Rp0,00	Rp0,00
3.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp622.338.750,00	Rp618.270.000,00
3.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Rp0,00	Rp0,00
3.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp110.240.164,00	Rp107.561.502,00
3.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Rp0,00	Rp0,00
3.2.7	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp160.000.000,00	Rp159.388.256,00
3.2.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00
3.2.9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp0,00	Rp0,00
3.2.10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp622.820.561,00	Rp601.635.437,00
3.2.11	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan	Rp0,00	Rp0,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI
1		2	3
	Pemerintah Daerah yang terintegrasi		
3.2.1 2	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Rp0,00	Rp0,00
3.2.1 3	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp170.844.910,00	Rp58.547.701,00
3.2.1 4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Rp29.200.000,00	Rp29.200.000,00
3.2.1 5	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Rp0,00	Rp0,00
3.2.1 6	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp1.096.488.525,00	Rp1.096.265.925,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp314.789.613,00	Rp311.478.158,00
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp314.789.613,00	Rp311.478.158,00
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp87.452.179,00	Rp87.384.458,00
4.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp80.427.889,00	Rp80.127.555,00
4.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp127.056.998,00	Rp124.213.598,00
4.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp11.468.861,00	Rp11.368.861,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI
1		2	3
4.1.5	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Rp8.383.686,00	Rp8.383.686,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp1.270.794.052,00	Rp1.253.941.576,00
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.265.444.052,00	Rp1.248.591.576,00
5.1.1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp151.805.864,00	Rp147.547.200,00
5.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.650.000,00	Rp14.650.000,00
5.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp53.580.000,00	Rp53.580.000,00
5.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.045.408.188,00	Rp1.032.814.376,00
5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.350.000,00	Rp5.350.000,00
5.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.350.000,00	Rp5.350.000,00
		Rp21.785.304.465,00	Rp20.418.068.581,00

Berdasarkan tabel 3.7 proporsi realisasi anggaran terbesar terdapat pada porsi anggaran belanja operasi sebesar Rp.18.014.012.132,00 atau 93 % dari target dan untuk belanja modal, dengan proporsi realisasi sebesar Rp.2.404.056.449 atau 97% dari target. Secara keseluruhan tingkat capaian perjenis belanja DKIS Kota Cirebon adalah sebesar Rp. 20.418.068.581,00 atau 94% dari target sebesar Rp. 21.785.304.465.

Untuk tabel 3.8 pada tahun 2025 proporsi realisasi anggaran keseluruhan Adalah Rp. 20.418.068.581,00 Atau 94% Dari Target Sebesar Rp. 21.785.304.465. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp. 11.779.099.436 atau sebesar 54% dari target, Program Informasi Dan Komunikasi Publik terealisasi sebesar Rp. 4.340.905.640 atau sebesar 20% dari target, Program Aplikasi Informatika terealisasi sebesar Rp. 2.732.643.771 atau sebesar 13% dari target, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terealisasi sebesar Rp. 311.478.158 atau sebesar 1% dari target dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terealisasi sebesar Rp. 1.253.941.576 atau sebesar 6% dari target.

3.6 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan realisasi anggaran terhadap data capaian kinerja. Dalam hal ini akan terlihat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPJMD dengan realisasi anggaran yang menopang pencapaian sasaran tersebut dimana efisien jika capaian kinerja sama atau lebih dan realisasi anggaran dibawahnya, tidak efisien jika realisasi capaian kinerja di bawah realisasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Berdasarkan Renstra RPD 2024-2026

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3	4,13	125%	4,13

Tabel 3. 13 Berdasarkan Renstra RPJMD 2025-2029

	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Realisasi 2024
1	Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	4,13	4,13	100%	4,13

Tujuan/Sasaran Renstra 2024-2026 DKIS Kota Cirebon “Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik” dengan indikator: Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian tolak ukur dalam mewujudkan kinerja dalam peningkatan layanan publik berbasis elektronik. Pada tahun 2025 Pemerintah kota Cirebon telah mentargetkan ilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perhitungan Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 memiliki nilai 4,13. Pada triwulan IV tahun 2025 melalui penetapan RPJMD 2025-2029 tujuan Dkis Kota Cirebon berubah menjadi “Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital Didukung Oleh Layanan Statistik Yang Akurat dan andal Serta Peningkatan Keamanan Informasi” dengan indikator tujuan “Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)”. Hasil realisasi kinerja berdasarkan indikator Indeks Pemerintah Digital masih menggunakan sasaran SPBE tahun 2024 dengan nilai 4,13 dan untuk penilaian indeks pemerintah digital akan dilakukan pada tahun 2026 dengan penyesuaian beberapa indikator. Realisasi capaian indikator tujuan didukung oleh beberapa program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Hasil pelaksanaan kelima program tersebut tidak lepas dari peran serta semua perangkat daerah di Kota Cirebon.

Total realisasi anggaran pada kelima program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp 20.418.068.581,- atau sekitar 94% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 21.785.304.465,-.

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran dalam rangka Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator		Capaian kinerja	Realisasi anggaran	Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)
Nilai Pemerintah (Pemdi)	Indeks Digital	100%	94%	6%

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pada indikator tersebut. Untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh DKIS Kota Cirebon diantaranya: meningkatkan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah di Kota Cirebon, meningkatkan Bimtek dan Sosialisasi dengan Perangkat Daerah, tentunya masih banyak hal yang harus dipelajari dan dimengerti oleh Perangkat Daerah dan aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian segala upaya tetap dilakukan guna mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

3.7 Prestasi dan Penghargaan

1. Berdasarkan Surat dari Inspektorat Daerah dengan nomor 700.1.2.1/LHE. 092-PEP tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DKIS Kota Cirebon Tahun 2025 menyatakan bahwa dari hasil evaluasi AKIP pada DKIS Kota Cirebon, diperoleh nilai AKIP DKIS Kota Cirebon tahun 2025 sebesar 79,35 dengan rincian penilaian pada tabel berikut:

Tabel 3. 15 Tabel Laporan AKIP 2025

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60

2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	79,35
Predikat			BB

Dengan nilai AKIP DKIS sebesar 79,35 DKIS Kota Cirebon memperoleh piagam penghargaan atas prestasinya sebagai peringkat ke-13 dari 32 OPD untuk nilai AKIP tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan dari Pemerintah Kota Cirebon

2. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Selasa (30/12/2025). Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kota Cirebon kembali mempertahankan predikat Badan Publik Kategori Informatif dari Komisi Informasi Jawa Barat.



Gambar 3. 146 Penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Barat

3. Penghargaan dari Pemerintah Kota Cirebon



Gambar 3. 147 Penerimaan Penghargaan CSD Award oleh Kasubbag Program dan Pelaporan DKIS

Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan penghargaan kepada para produsen data terbaik melalui penilaian objektif terhadap ketersediaan, kualitas, ketertiban, serta pemanfaatan data. Dinas Komunikasi Informatika

dan Statistik Kota Cirebon mendapatkan penghargaan CSD Award Produsen Data Terbaik Kategori Perangkat Daerah.

4. Sertifikasi ISO **27001:2022**

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon kembali mempertahankan Sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang diraih pada 2024, setelah melalui *Audit Surveillance* pada akhir tahun 2025 ini. Keberhasilan tersebut menjadi indikator penting bahwa sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon konsisten dijalankan sesuai standar internasional, bukan sekadar dipenuhi untuk kebutuhan sertifikasi awal.



Gambar 3. 148 Audit Surveillance ISO 27001:2022

3.8 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penghambat serta Evaluasi

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi DKIS Kota Cirebon untuk mencapai target yang ditentukan, baik target sasaran kinerja, program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2025:

1. Masih terdapat Jaringan Intra yang menggunakan media akses

wireless

2. Masih terdapat layanan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi
3. Masih masifnya serangan siber pada website dan aplikasi milik Pemerintah Kota Cirebon
4. Masih rendahnya keterisian data pada Portal Cirebon Satu Data yang mengakibatkan keterlambatan penyusunan Buku Profil Data Statistik Kota Cirebon
5. Perencanaan konten belum disusun secara optimal

Dari permasalahan tersebut, telah dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan kendala dalam proses pencapaian tujuan dan indikator sasaran, diantaranya:

1. Mengganti media akses wireless dengan fiber optik
2. merencanakan, menyusun dan mengembangkan sistem informasi
3. Melakukan pengadaan perangkat keamanan informasi dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang keamanan informasi
4. Melakukan himbauan kepada Produsen Data terkait keterisian data, serta melaksanakan kegiatan desk rekonsiliasi data.
5. Menyusun kalender konten dan menerapkannya.

Untuk menjamin adanya perbaikan kinerja pada tahun berikutnya maka terdapat beberapa langkah maupun tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi jaringan intra Pemerintah Kota Cirebon
2. Pengumpulan data untuk merencanakan, menyusun dan mengembangkan sistem informasi
3. Melakukan desk dan sosialisasi tentang keamanan informasi
4. Melakukan sosialisasi tentang keterisian data kepada produsen data
5. Membuat jadwal konten/publikasi tentang program kegiatan Pemerintah Kota Cirebon

Tabel 3. 16 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Upaya Pemecahan Masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran DKIS Kota Cirebon

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika Kolaborasi antar SKPD di Kota Cirebon untuk mensukseskan SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terarahnya penyelenggaraan SPBE Belum semua Peta Rencana SPBE dengan baik Belum adanya templat evidence yang sama Belum adanya arsitektur to-be 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Regulasi Rencana Aksi setiap tahun Menyusun Peta Rencana SPBE Membuat templat evidence untuk memudahkan SKPD melengkapi evidence setiap indikatornya Menyusun arsitektur to-be

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja DKIS Kota Cirebon dalam mendukung Pemerintah Digital, dapat disimpulkan bahwa:

- **Akselerasi Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur digital (jaringan fiber optik dan WiFi publik) telah mencapai target, memperkuat fondasi konektivitas antar-OPD di Kota Cirebon.
- **Integrasi Layanan:** Aplikasi super-app (seperti Cirebon Siaga 112 atau layanan kependudukan) menunjukkan tren positif dalam memangkas birokrasi, meski masih ditemukan ego sektoral dalam penggunaan aplikasi tertentu.
- **Indeks SPBE:** Nilai Indeks SPBE Kota Cirebon menunjukkan peningkatan stabil, yang mencerminkan komitmen terhadap tata kelola data (Satu Data Cirebon) dan keamanan informasi yang lebih baik.
- **Literasi Digital:** Upaya edukasi masyarakat melalui berbagai kanal media sosial DKIS cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi publik dalam program pemerintah.

4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peran DKIS dalam mewujudkan ekosistem Pemerintah Digital yang lebih matang, disarankan:

- **Konsolidasi Aplikasi:** Melakukan audit dan penyederhanaan (simplifikasi) aplikasi milik pemerintah kota. Hindari pembuatan aplikasi baru jika fungsinya bisa diintegrasikan ke dalam platform yang sudah ada untuk efisiensi anggaran dan kemudahan warga.
- **Peningkatan Keamanan Siber:** Memperkuat infrastruktur *Cyber Security* dan rutin melakukan *vulnerability assessment* (uji celah) pada portal-portal strategis Pemkot Cirebon guna melindungi data masyarakat.
- **Optimalisasi Satu Data Cirebon:** Mempererat kolaborasi dengan seluruh OPD agar penginputan data sektoral dilakukan secara *real-*

time dan akurat, sehingga pimpinan daerah bisa mengambil kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).

- **Peningkatan SDM Digital:** Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi aparatur di tingkat Kecamatan dan Kelurahan agar layanan digital tidak hanya berhenti di tingkat dinas, tetapi menyentuh level akar rumput secara merata.
- **Transformasi Budaya Kerja:** Mendorong perubahan pola pikir (mindset) ASN dari manual ke digital agar pemanfaatan sistem yang sudah dibangun tidak sekadar menjadi formalitas, tapi benar-benar menjadi alat bantu kerja utama

Cirebon, 15 Januari 2026



KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA CIREBON

MA'RUF NURYASA,AP.,MM

NIP. 19760330 199602 1 004